



YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD



ISSN 2086-9312
9772086931295

EDISI DESEMBER 2020

**OPTIMALISASI SARANA PRASARANA DAERAH PERTAHANAN
DEPAN DAN INTEROPERABILITAS ORGANISASI SATUAN TUGAS
OPERASI PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA RI-MALAYSIA**



**SESKOAD MENCETAK PEMIMPIN DAN STAF MILITER
YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER**



***CEPAT, SENYAP
DAN TEPAT*** **DALAM**
MENJAGA KEDAULATAN NKRI

PROLOG



BRIGJEN TNI NEFRA FIRDAUS, S.E., M.M

Terlebih dahulu marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas ridho-Nya Tim redaksi dapat menyapa kembali para pembaca sekalian di mana pun berada dan bertugas melalui terbitan Jurnal *Yudhagama* Volume 40 Nomor IV Edisi Desember 2020. Dalam edisi ini, tulisan para Pati dan Pamen TNI AD masih menghiasi isi Jurnal *Yudhagama*.

Para penulis mengangkat topik yang bervariasi dalam Jurnal ini sesuai bidang tugas dan fungsi masing-masing. Hal ini, menjadi daya tarik tersendiri bagi para pembaca, karena makna dari tulisan-tulisan ini diharapkan akan memberikan manfaat serta menjadi khazanah pengetahuan.

Kami menyadari bahwa dalam jurnal ini masih terdapat kekurangan dan keterbatasan. Oleh karena itu saran dan masukan dari pembaca sekalian sangat kami harapkan untuk kesempurnaan Jurnal *Yudhagama* edisi yang akan datang.

Selamat membaca.



YUDHAGAMA

MEDIA INFORMASI DAN KOMUNIKASI TNI AD

Penanggung Jawab

Brigjen TNI Nefra Firdaus, S.E., M.M

Wakil Penanggung Jawab

Kolonel Inf Drs. Mu'tamar, M.Sc

Pemimpin Redaksi

Letkol Caj (K) Effy Sutana

Sekretaris Redaksi

Letkol Inf Drs. Abdon H Tampilang

Redaktur Pelaksana

Mayor Arm Hanafi Solaeman, S.I.P., M.S.S.S

Redaktur Pracetak

Letkol Caj (K) Yeni Triyeni

Redaktur Bahasa

Mayor Caj (K) Besarrah

Koordinator Liputan

Lettu Inf Moch Holil

Desain Grafis

Serka Herlambang

Serda Eko Darmawan

Editor

Serda (K) Intan Indah

Reporter

Mayor Inf Hartono

PNS Listin Andriani

Fotografer

PNS Bambang Sutyono

Alamat Redaksi

Dinas Penerangan Angkatan Darat

Jl. Veteran No. 5 Jakarta Pusat

Telp. (021) 3456838, 3811260

Fax. (021) 3848300

Email

palaganyudhagama@gmail.com
dispenad@mabesad.mil.id

Facebook

<https://www.facebook.com/AngkatanDaratTNI>

Instagram

https://www.instagram.com/tni_angkatan_darat

Website

<http://www.tniad.mil.id>

Twitter

https://twitter.com/TNI_AD_Official



DAFTAR ISI

OPTIMALISASI SARANA PRASARANA DAERAH PERTAHANAN DEPAN DAN INTEROPERABILITAS ORGANISASI SATUAN TUGAS OPERASI PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA RI-MALAYSIA



Hal 4

Oleh: Mayjen TNI Muhammad Nurrahmad

INTEGRATED FARMING SYSTEM: SEBUAH PROSPEK UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR



Hal 24

Oleh: Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro, S.I.P., M.Si



Hal 8

SESKOAD MENCETAK PEMIMPIN DAN STAF MILITER YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER

Oleh: Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A

STRATEGI DAN PERAN KOREM 172/PWY DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA



Hal 27

Oleh: Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan

AKADEMI MILITER, "CENTER OF EXCELLENCE", MENCETAK PEMIMPIN BERKEPRIBADIAN KEBANGSAAN DAN BERILMU MENDUKUNG



Hal 13

Oleh: Mayjen TNI Totok Imam S., S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han)

MENILIK "DAPUR" KOPASSUS DI ERA *NEW NORMAL*



Hal 31

Oleh: Brigjen TNI Thevi A. Zebua, S.E



Hal 17

KONTRIBUSI POLTEKAD DALAM MEMBANGUN SUMBER DAYA PRAJURIT YANG BERKUALITAS DI BIDANG TEKNOLOGI ALUTSISTA MATRA DARAT

Oleh: Brigadir Jenderal TNI Dr. Nugraha Gumilar, M.Sc.

PERANG ASIMETRIS DAN TANTANGANNYA BAGI KORPS ARMED



Hal 35

Oleh: Brigjen TNIM. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si

THE MOST BEAUTIFUL GIFT TO TNI: "ANEH! NEGARA ZONDER TENTARA!"



Hal 20

Oleh: Brigjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr.(Han)



Hal 39

Oleh: Kolonel Inf Drs. Mu'tamar, M.Sc.

ANALISIS PEMBENTUKAN SATUAN PENERANGAN DI TINGKAT KODIM



TUGAS PENGAMANAN
WILAYAH SEBAGAI KEWAJIBAN
BERSAMA APARAT KOREM
DAN KEPOLISIAN

Hal 46

Oleh: Kolonel Inf Asep Nugraha, S.E., M.Si

PELIBATAN KODIM 0418/
PALEMBANG KEPADA
PEMERINTAH DAERAH
DALAM RANGKA Mendukung
Pembangunan Daerah



Hal 59

Oleh: Kolonel Inf Henry Setyono



OPTIMALISASI
PUSKODALAD DALAM
MENDUKUNG KODAL
PIMPINAN TNI AD

Hal 49

Oleh: Kolonel Ti Haryono, S.Sos., M.M.

BABINSA *NEW NORMAL*
TRANSFORMASI UPSUS
TNI AD DALAM KETAHANAN
PANGAN



Hal 63

Oleh: Letkol Inf Budi Rahman

STRATEGI PENYIAPAN
KEMAMPUAN SDM TNI AD
DALAM MENGHADAPI
ERA INDUSTRI 4.0



Hal 53

Oleh: Kolonel Czi Muslim Jaya, S.E.



PERAN KODIM
1605/BELU DALAM
MENJAGA KEUTUHAN DAN
KEDAULATAN WILAYAH NKRI
DI PERBATASAN RI-RDTL

Hal 67

Oleh: Letkol Inf Wiji Untoro



UPAYA KODIM 1207/BS
PONTIANAK DALAM
PENANGANAN
KEBAKARAN
HUTAN DAN LAHAN

Hal 56

Oleh: Kolonel Inf Jajang Kumiawan,
S.IP., M.M

IMPLEMENTASI
SINERGITAS
TNI AD-POLRI DALAM
MEWUJUDKAN STABILITAS DAN
KONDUSIVITAS WILAYAH



Hal 70

Oleh: Mayor Inf Davit Sutrisno Sira it, S.E.,

PENGEMBANGAN KEKUATAN ARHANUD
KOSTRAD DALAM MENGHADAPI
PERANG MODERN



Hal 74

Oleh: Mayor Arh Helmy Ariansyah

Oleh: Mayjen TNI Muhammad Nur Rahmad
(Panglima Kodam XII/Tanjungpura)

OPTIMALISASI SARANA PRASARANA DAERAH PERTAHANAN DEPAN DAN INTEROPERABILITAS ORGANISASI SATUAN TUGAS OPERASI PENGAMANAN PERBATASAN NEGARA RI-MALAYSIA

Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan negara kepulauan yang terdiri dari pulau besar dan kecil sejumlah ±17.508 pulau. Secara geografi berbatasan dengan banyak negara di darat dan laut. Di daratan, Indonesia berbatasan langsung dengan 3 negara, yaitu: Malaysia (Kalimantan Barat dengan Sarawak dan Kalimantan Timur dengan Sabah), Prov. Papua dengan Papua *New Guinea* dan Nusa Tenggara Timur dengan Timor Lorosae.

Untuk wilayah laut, berbatasan dengan 10 negara, yaitu: India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Filipina, Palau, Papua *New Guinea*, Australia dan Timor Lorosae. Perbatasan negara sejatinya merupakan perwujudan utama kedaulatan wilayah suatu negara. Perbatasan suatu negara mempunyai peranan penting dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber kekayaan alam, menjaga pertahanan dan keutuhan wilayah.

Pembahasan



Peran Kodam XII/Tanjungpura dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan dengan Negara Malaysia terus berkesinambungan, selaku Komando Operasi (Koops) menjadi bagian dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan I (Kogabwilhan I), melaksanakan Operasi Pengamanan Perbatasan (Opspantas) di Wilayah RI-Malaysia sepanjang tahun di wilayah perbatasan Prov. Kalbar, menegakkan kedaulatan negara, melindungi keselamatan bangsa dan mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dalam rangka mendukung tugas pokok (Tupok) TNI. Namun dalam pelaksanaan operasi TA. 2019-2020, terjadi berbagai fenomena yang berpengaruh terhadap keberhasilan operasi. Fenomena tersebut, dirumuskan sebagai berikut: **Kesatu**, sejauh mana efektivitas dislokasi gelar Pos Pengamanan/Pos Pam, Jalan Inspeksi Patroli Perbatasan/JIPP, Jalan Administrasi/JA, Letak Patok Batas Negara RI-Malaysia yang menjadi sarana prasarana/Sarpras Daerah Depan ditinjau dari keberhasilan pencapaian Tupok? **Kedua**, bagaimana desain sinkronisasi/interoperabilitas antar Satgasrat

di bawah Korem 121/ABW selaku Komando Pelaksana Operasi/Kolakops terdiri: Satgaspur/Yonif 642/Kapuas dan Yonif 407/Padma Kusuma serta Satgas Teritorial/Satgaster dari Kodim 1202/Singkawang, 1204/Sanggau, 1205/Sintang, 1206/Putusibau, 1208/Sambas maupun yang di bawah Koops terdiri: Satgas Intelijen/Satgas Intel, Tim Penerbad, Satgas Laut/Satgasla Lantamal XII dan Satgas Udara/Satgasud Lanud Supadio serta implikasinya? **Ketiga**, bagaimana mengintegrasikan sistem operasi Satgas-Satgas di bawah kendali Koops guna mendukung Tupok serta implementasinya? Untuk mengetahui secara detail, pembahasannya sebagai berikut:

Kesatu, sejauh mana efektivitas dislokasi Gelar Pos Pam, JIPP, JA, Letak Patok Batas Negara RI-Malaysia yang menjadi Sarpras Daerah Depan ditinjau dari keberhasilan pencapaian Tupok? Untuk panjang garis batas negara RI-Malaysia ±973,022 Km sesuai tanggung jawab Koops termasuk di dalamnya Taman Nasional Betung Kerihun dan Danau Sentarum/TNBKDS ±370 Km yang menjadi **blank area**,



wilayah itu dijaga oleh 60 Pos Pamtas termasuk di dalamnya 4 Pos Gabungan Bersama TNI AD-Tentara Darat Malaysia/TDM. Hanya dislokasinya tidak sesuai Permenhan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan TNI dalam Pamtas (Jarak JIPP terdekat 50 M dari Patok Batas dan Daerah Prioritas Pertahanan dengan Jarak 4 Km). Untuk pembangunan JIPP TA. 2020 oleh Kemhan RI direncanakan rintisan jalan 107,87 Km dan perkerasan 94 Km, namun adanya wabah pandemi Covid-19 berakibat kegiatan itu tidak berjalan. Sedangkan, pada TA. 2021 rencana rintisan dan rencana perkerasan pada rencana tahun lalu akan direalisasikan berikut menambah rencana rintisan 85,75 Km dan rencana perkerasan 65 Km setelah ada persetujuan pemerintah.

Hasil patroli Satgas Pamtas ditemukan ada 94 jalur-jalur illegal dilalui tanpa pemeriksaan sesuai aturan lintas batas negara. Jalur pelintasan tersebut, dapat dilalui kendaraan roda 2 dan bahkan ada yang kendaraan roda 4 ukuran besar. Selanjutnya, patok jumlah 8.246 buah dan yang dapat di patroli 4.774 buah, sedangkan yang tidak dapat dipatroli berada di TNBKDS sebanyak 3.472 buah. Pencapaian hasil operasi Satgasrat Yonif 641/Beruang dan 133/YS saat patroli patok ditemukan kondisi Baik 4.103 Buah dan Rusak 266 Buah. Untuk JA secara umum tidak ada hal krusial yang menghambat keberhasilan Ops Pamtas. Setelah mencermati kondisi tersebut, maka Koops telah merencanakan redislokasi Pos Pamtas yang berada jauh dari border line/garis batas negara (Permenhan RI Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengerahan TNI dalam Pamtas bahwa garis batas negara ditarik ke belakang s/d 50 M menjadi safe area, lalu ditarik lagi ke belakang s/d 4 Km merupakan JIPP = \pm total keseluruhan 5 Km).

Rencana ini terbagi dalam 2 (dua) tahap, yakni: Prioritas pertama, diharapkan terealisasi di tahun depan 1. Sektor Barat di: ● Pos Seluas di Co. 6680-3806 jarak 30 Km dari patok batas negara; ● Pos Berjongkong di Co. 5450-6706 jarak 8 Km dari patok batas negara; dan ● Pos Seibening Co. 4270-9366 jarak 6,5 Km dari patok batas negara. Sedangkan, 2. Sektor Timur di: ● Pos Senang di Co. 0390-9985 jarak 15,5 Km dari patok batas negara; ● Pos Klawik di Co. 4059-2733 jarak 12,6 Km dari patok batas negara; ● Pos Ensanak Co. 8950-9429 jarak 11 Km dari patok batas negara; d. Pos Muakan Co. 8940-0745 jarak 7 Km dari patok batas negara; dan ● Pos Seriang Co. 0792-1962 jarak 6 Km dari patok batas negara; Prioritas kedua, diharapkan terealisasi di tahun berikutnya secara bertahap untuk sisa Pos Pamtas lainnya.

Kedua, bagaimana desain sinkronisasi/ interoperabilitas antar Satgasrat di bawah Kolakops dengan Satgasla, Satgasud, Satgasintel, Tim Penerbad yang di bawah Koops serta implikasinya? Untuk Ops Pamtas mendatang pada konsep operasi dan manuver akan menyesuaikan dengan keadaan daerah operasi di Prov. Kalbar yang memiliki kekhususan dari aspek geografi, seperti: adanya sungai lebar dan panjang mulai dari hulu hingga hilir, hutan luas dan lain-lain. Adapun beberapa pemikiran Koops terkait desain seluruh Satgas untuk mewujudkan sinkronisasi/ interoperabilitas, maka perlu adanya reorganisasi dan revitalisasi tugas agar tercapai Tupok, yakni: **1. Penambahan organisasi Satgas Bantuan Administrasi (Satgasbanmin)** terdiri, dari: a. Satuan Hukum bertugas memberikan dukungan hukum: 1) Mengkaji atau meneliti semua kebijakan, perencanaan, perintah sasaran dan prosedur terkait



Ops Pamtas demi menjamin konsistensi terhadap tugas yang sesuai dengan Hukum Nasional maupun Internasional terutama terkait customs dan illegal lainnya; dan 2) Memberikan pendapat/nasehat terkait situasi taktis, juga memberikan pendapat/nasehat mengenai persoalan yang berkenaan dengan *Rules of Engagement*. b. Satuan Zeni bertugas memberikan dukungan berupa bantuan pemasangan/penutupan pintu masuk di jalan-jalan tikus di daerah depan pertahanan yang melewati garis batas negara (patok-patok) hingga *safe area* hingga JIPP; c. Satuan Kesehatan bertugas memberikan dukungan selain kesehatan untuk personel Satgas sesuai kebutuhan operasi rutin juga, bantuan pemeriksaan Narkoba hasil tangkapan dari para pelaku/penyelundup;

d. Satuan Perhubungan bertugas memberikan dukungan sesuai sistem dan protap operasi juga mengintegrasikan/konektivitas komunikasi seluruh Satgas dalam rangka komando pengendalian/Kodal; e. Satuan Polisi Militer bertugas memberikan dukungan penyelesaian perkara pidana, penyelidikan kriminal, pengurusan tahanan militer, tahanan keadaan bahaya/operasi militer, tawanan perang, dan interniran perang terhadap combatan/non (para pelaku illegal); f. Satuan Peralatan bertugas memberikan dukungan sesuai fungsi teknisnya; g. Satuan Pembinaan Mental bertugas memberikan dukungan sesuai fungsi teknisnya; h. Satuan Penerangan bertugas memberikan dukungan sesuai fungsi teknisnya; dan i. Adanya perkuatan untuk Satgaspur dari Satuan Kapal Motor Cepat (KMC) TNI AD milik Pusbekangad yang dapat melalui perairan sungai mulai dari hulu hingga hilir, karena dalam Tupoksinya terdapat Bantuan jasa

angkutan air untuk kegiatan pemindahan personel dengan perlengkapannya dan atau materil secara administrasi dan taktis melalui wilayah perairan rawa, laut, sungai, dan pantai dengan menggunakan Kapal TNI AD lainnya dalam rangka mendukung Tupok.

Selain itu, juga bertugas memberikan dukungan Bantuan perbekalan rutin untuk operasi; **2. Penambahan jumlah personel Satgas Intel** dari unsur Lantamal XII dan Lanud Supadio, serta melengkapi peralatan khusus intelijen untuk mendukung SIGINT (*Signal Intelligence*), ELINT (*Electronic Intelligence*) dan IMINT (*Imagery Intelligence*) diantaranya radar, *drone*, *tracking position* dan sadap jarak jauh; **3. Penggantian Alutsista** Satgasla, yakni: KRI PC Class (Type, PC attac class/Siribua klas, Patkamla Selimpai I-XII-15 (Type KAL 12/Alumanum Marine) dan KAL Pulau Dato I-XII-15 (Typ, KAL 12.60) serta *include crew* dan logistik; **4. Penggunaan PPTA Lanud Supadio dan Lanud Harry Hadisumantri di Kab. Bengkayang** sebagai Lanud pendukung operasi yang terorganisir dalam Satgasud untuk mendukung Satgaspur; **5. Pengintegrasian Kodal** dari Koops ke seluruh Satgas dan terwujudnya konektivitas komunikasi Ops Pamtas dari **Puskodal Koops**.

6. Penambahan pesawat *include crew* (Tim Penerbad) menjadi **3 Unit** yang penggunaan dan disposisi berada 1 Unit untuk sektor barat, kemudian **1 Unit untuk sektor timur** guna mendukung Satgasrat dan 1 Unit di Koops sebagai Kodal Pangkoops; dan **7. Pemilahan Tupok Satgaster** yang selama ini melaksanakan kegiatan program rutin bidang teritorial (Petunjuk Pelaksanaan Program Anggaran/PPPA fungsi pembinaan), namun dalam pelaksanaan Ops Pamtas RI-Malaysia kelak disusun tersendiri dalam bentuk rencana operasi teritorial menggunakan pola/bentuk operasi bhakti (*Opsbhak*) yang dinamakan **TNI Manunggal Membangun Desa Perbatasan** (TMMDP) dan masuk dalam PPPA fungsi operasi dengan susunan konsep organisasi tugas, tujuan, sasaran, waktu, pembiayaan.

Ketiga, bagaimana mengintegrasikan sistem operasi Satgas-Satgas di bawah kendali Koops guna mendukung Tupok serta implementasinya? Teori Implementasi menurut Lister (Taufik dan Isril), “sebagai sebuah hasil, maka implementasi menyangkut tindakan seberapa jauh arah yang telah diprogramkan itu benar-benar memuaskan”. Selaras dengan teori tersebut, walaupun pelaksanaan operasi dapat berjalan lancar dan terdapat kendala namun dapat dioptimalisasi agar mencapai Tupok.

Langkah-langkah yang dilakukan, yakni: **1. Optimalisasi Satgas Pamtas:** a. Susunan Tugas Satgas Pamtas, akan direorganisasi unsur-unsurnya lebih komprehensif, saling sinergi dan terpadu serta memberikan penguatan dalam rangka pencapaian tugas masing-masing; dan b. Pola Ops Pamtas diklasifikasikan menjadi 3 (tiga), yaitu: 1) Lini 1, garis batas negara berupa garis khayal di medan di atasnya berdiri patok-patok ditarik garis ke belakang sepanjang 50 Meter menjadi *safe area*; 2) Lini 2, berupa JIPP yang di atasnya berada Pos Pamtas, Hellypad, BTS milik TNI AD dan Telkomsel Merah Putih; dan 3) Lini 3, JIPP ditarik ke belakang sampai dengan 4 Kilometer yang terdapat JA menuju perkampungan sampai dengan jalan paralel/jalan nasional, provinsi, kabupaten.

2. Optimalisasi Pembangunan Perbatasan: a. Usulan kaji ulang dari Kemenhan RI dan Mabes TNI terkait pola pengamanan saat ini khususnya keterpaduan unsur-unsur Satgas Pamtas dan apakah penempatan Pos Pamtas selalu formasi linier seperti sekarang atau menggunakan formasi lainnya dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi; b. Dukungan biaya operasional, peningkatan kondisi Pos Pamtas dan dukungan alat peralatan Satgas pamtas harus ditingkatkan sesuai kondisi wilayah pengamanan.

Penutup

Pada akhirnya, sebagai rekomendasi pemerintah untuk diatensi sebagai berikut: 1. Solusi penyelesaian masalah TNBKDS dengan merealisasikan perjanjian kerjasama/ PKS Kemhan dan Kemen LHK RI, BNPP berikut perijinan pengembangan daerah pertahanan depan (**hanya dibangun Pos Pamtas, runway sepanjang + 400 M untuk landing/take off pesawat jenis ultralight**

trike TNBK, hellypad Penerbad/Satgasud dan BTS Merah Putih Telkomsel) yang dalam pengerjaan kelak seyogyanya oleh Zidam XII/ Tanjungpura bekerjasama dengan Kemhan RI (Data terkini Surat Dirjen Kuathan Kemhan RI Nomor: B/2151/03/04/37/DJKUAT tanggal 20 Agustus 2020 perihal permohonan adendum PKS antara Dirjen KSDE Kemen LHK RI dengan Dirjen Kuat Kemhan RI.

2. Mendorong Kemen ESDM RI untuk bangun **Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS)** di sepanjang JIPP; 3. Revitalisasi kerjasama TNI dengan PT. Telkomsel untuk membangun **BTS Merah Putih di sepanjang JIPP** dengan **prioritas wilayah TNBK** berkelanjutan secara bertahap setiap tahunnya; 4. Mendorong Kemenkes RI untuk menyediakan fasilitas kesehatan di Pos Pamtas dalam menghadapi pandemi Covid-19 yang tidak ada kepastian waktu berakhirnya; 4. Mengajukan ke Mabes TNI untuk **reorganisasi dan revitalisasi Ops Pamtas** agar terwujudnya kesatuan Kodal; Mendorong Kodiklat TNI untuk menyusun buku petunjuk operasi pengamanan perbatasan guna menjadi pedoman di lapangan; dan Mengajukan adanya pemberian **reward** berupa **kenaikan pangkat luar biasa (KPLB)** bagi **personel Satgas** yang telah berhasil menangkap para pelaku illegal.

Demikian uraian singkat peran Kodam XII/ Tanjungpura dalam menjaga stabilitas wilayah perbatasan dengan negara Malaysia. Menutup esai ini, selaras dengan **motto Kodam XII/ Tanjungpura, “Charathana Jita Vina”** yang artinya **“Sekali Melangkah Pantang Menyerah”**. Salam hormat dari Bumi Khatulistiwa.



SESKOAD MENCETAK PEMIMPIN DAN STAF MILITER YANG UNGGUL DAN BERKARAKTER

Oleh : Mayjen TNI Dr. Anton Nugroho, MMDS, M.A
(Danseskoad)

“Kegiatan pendidikan perlu dilaksanakan dengan prioritas *safety* (aman), *comfort* (nyaman) dan *simple* (efektif dan efisien)” -Jenderal TNI Andika Perkasa-



Pendidikan adalah jantungnya profesionalisme militer dan memiliki implikasi langsung pada kekuatan bertempur dan postur militer ke depan.¹ Salah satu pondasi dari profesionalisme militer adalah institusi yang diawaki oleh sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berkarakter.

SDM unggul adalah mereka yang lebih pandai, lebih baik, lebih cakap, lebih terampil, lebih beretika, memiliki dorongan dari dalam dirinya sendiri untuk berprestasi dan bereputasi yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari.² Sedangkan SDM berkarakter adalah mereka yang memiliki kepribadian, perilaku dan sifat yang kuat. Kriteria unggul dan berkarakter tentunya bersifat variatif dan dinamis disesuaikan dengan perspektif dan *needs-assessment* suatu organisasi. Perwira unggul dan berkarakter dalam konteks profesionalisme dapat didefinisikan sebagai mereka yang memiliki keahlian (*expertise*) dan tanggung jawab (*responsibility*) yang memadai sesuai ‘*core*’ bisnisnya.³ Mereka terlahir manakala satuan kerja, komunitas sosial, dan lembaga pendidikan dapat memwadahi proses pembentukannya secara berkelanjutan. Tempat di mana mereka dididik, menjadi hal krusial yang perlu diperhatikan agar dapat membentuk kemampuan, keterampilan, pengetahuan, sikap, nilai (*value*), dan karakter untuk melahirkan jati dirinya sebagai manusia yang unggul.

Kriteria perwira unggul dan berkarakter dalam perspektif Seskoad diorientasikan pada visinya sebagai lembaga pendidikan tertinggi dan

pengkajian strategis TNI AD yang terbaik, terhormat dan disegani. Visi ini mengandung arti yang mendalam, Seskoad dituntut untuk konsisten menyiapkan kader pemimpin dan staf militer yang profesional dan berkualitas sesuai dinamika tuntutan dan tantangan tugas, serta postur dan kebutuhan organisasi TNI AD ke depan.

Menyadari hal ini, Seskoad memiliki komitmen untuk mendidik dan mengembangkan perwira TNI AD yang berpegang teguh pada Sapta Marga dan Sumpah Prajurit, dengan memiliki kemampuan berpikir analitis dan kritis, responsif dalam mengambil keputusan, serta adaptif dan mandiri terhadap segala dinamika. Komitmen ini merupakan pondasi yang dibangun oleh Seskoad, sehingga pemimpin dan staf militer yang dihasilkan dapat menerapkan nilai nasionalisme dan patriotisme, serta memegang



1. Edwin J. Arnold, *Professional Military Education: Its Historical Development and Future Challenges*, (USAWC, Pennsylvania, 1993). 1, disitasi dari Carl Vuono Change, Continuity and the Army of the 1990 (1988). 5, diakses pada 2 Oktober 2020, diunduh dari <https://apps.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a263673.pdf>.
2. Syaiful Sagala, *Human Capital: Membangun Sumber Daya Manusia Berkarakter Unggul Melalui Pendidikan Berkualitas*, (Kencana, Depok, 2017). 309.
3. Samuel P. Huntington, *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations* (Cambridge, MA: Belknap Press, 1967), 71.



teguh jati dirinya sebagai tentara pejuang, tentara rakyat, tentara nasional dan tentara profesional.

Pandemi Covid-19

Seskoad menghadapi tantangan besar dalam upaya memerangi pandemi Covid-19, dan melindungi keselamatan dan kesehatan di lingkungan Seskoad. Tentunya hal ini membuat Seskoad untuk menghadirkan alternatif operasional pendidikan yang aman dan nyaman, efektif dan efisien. Hal krusial yang perlu diperhatikan dalam menghadapi pandemi ini adalah bagaimana menjaga imunitas tubuh siswa. Imunitas tubuh dapat terjaga dengan cara memperhatikan pola tidur, memelihara kebugaran fisik, minum vitamin dan makan-makanan yang bergizi. Seskoad memahami bahwa istirahat merupakan kebutuhan tubuh yang wajib dipenuhi, sama seperti halnya olahraga atau mengonsumsi makanan yang kaya akan nutrisi. Oleh karenanya, Seskoad mengatur pola tidur dan olahraga siswa dengan mewajibkan untuk beristirahat selama delapan jam sehari, dan membina fisik sewajarnya dengan menjadwalkan olah raga berjalan kaki selama satu jam di pagi hari. Ini berguna untuk memelihara kebugaran fisik, mental, emosional dan spiritual siswa.

Selain itu, Seskoad menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Siswa diwajibkan untuk memakai masker, mencuci tangan dan menjaga jarak dalam setiap aktivitas sehari-hari baik di kelas ataupun di wisma. Dengan langkah-langkah ini diharapkan dapat menjaga sistem imun dan kualitas kesehatan siswa, agar siswa maksimal dalam mengikuti aktivitas pendidikan.

Sistem Belajar Dewasa (*Adult Learning System*)

Siswa bukanlah produk dari sistem pendidikan, melainkan produk dari partisipasi aktif dirinya dalam suatu komunitas pendidikan. Siswa bukanlah suatu 'wadah' yang kosong, melainkan 'wadah' yang sudah terisi, dan memerlukan tambahan 'air' (ilmu) untuk memenuhinya.⁴ Menyadari hal ini, Seskoad mengimplementasikan sistem belajar dewasa dalam operasional pendidikannya. Sistem ini mengedepankan pembelajaran secara mandiri dan independen, mewadahi model instruksi dan strategi yang memfokuskan pada siswa sebagai partisipan aktif, memfasilitasi kolaborasi kelompok dan usaha kolektif, serta mengedukasi siswa untuk aktif mengeksplorasi pengetahuan untuk keperluan dirinya sendiri.⁵

4. Shyam Kongari, *Education Is Not the Filling of A Pail, But the Lighting of A Fire: The Current Scenario in Corporate Education- A Close and Critical Illustration* (2018), diakses pada 8 Oktober 2020, diunduh dari <http://jrspelt.com/wp-content/uploads/2018/09/Shyam-Education.pdf>, disitasi dari William Buttler Yeats.
5. Joyce A. Castronova, *Discovery Learning for the 21st Century: What is it and how does it compare to traditional learning in effectiveness in the 21st Century?*, diakses pada 25 September 2020, diunduh dari <https://d1wqtxts1xzle7.cloudfront.net/36670086/1282044031.pdf>.

Dosen dalam proses belajar mengajar (PBM) berperan sebagai guru, pembimbing, mentor, konsuler, dan fasilitator. Hakikat sistem belajar dewasa adalah proses belajar untuk menjadi diri sendiri, bukan proses pembentukan menurut kehendak orang lain. Dalam penerapannya, Seskoad memberikan inisiatif penuh kepada siswa untuk aktif mencari wawasan baru yang dibutuhkannya. Siswa menentukan frekuensi belajarnya sendiri agar memicu timbulnya motivasi dan 'rasa memiliki' atas pelajarannya sendiri. Jadwal pelajaran diatur sedemikian rupa sehingga siswa masih mempunyai waktu luang untuk pengembangan dirinya.

Materi diskusi kelompok ditambah waktunya, agar memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada siswa untuk berdiskusi, menyelesaikan masalah, dan mengintegrasikannya guna menciptakan pengetahuan baru. Dosen dalam diskusi ini, memiliki peran sebagai narasumber, pengajar, mediator, fasilitator, dan negosiator yang menjembatani, membatasi, serta mengarahkan para siswa agar proses berjalan sesuai dengan koridor yang telah ditentukan di dalam kurikulum.

Manajemen Waktu

Merencanakan, mengatur, dan melaksanakan operasional pendidikan dengan memanfaatkan waktu seoptimal mungkin akan berkontribusi pada pencapaian efektivitas dan efisiensi pendidikan. Pendidikan akan lebih efektif jika pembelajaran diberi selang waktu dari materi satu ke materi selanjutnya, daripada materi diselesaikan secara masif dalam satu waktu. Duckworth dalam studinya menyatakan bahwa "belajar dengan metode spasial (*spaced learning*) adalah kunci untuk penyimpanan memori,"⁶ ini bermakna bahwa 'otak' layaknya 'otot' yang dilatih, memerlukan waktu pemulihan agar dapat meningkat fungsi kognitifnya.

Oleh karenanya, di dalam PBM Seskoad, siswa diberikan waktu istirahat secara konstan selama sepuluh menit setiap satu jam pelajaran, dan diadakan kegiatan berjemur selama dua puluh menit setiap harinya. Waktu belajar secara 'tatap muka' di kelas diakhiri lebih awal, dilanjutkan pemberian 'modul' oleh dosen secara *online* (*daring*) atau belajar dari paket instruksi digital yang diberikan di wisma siswa masing-masing. Mengatur waktu belajar malam dan pola tidur agar siswa dapat melaksanakan istirahat malam dengan cukup. Diharapkan dengan memberikan selang waktu istirahat kepada siswa, akan mejaga produktivitas, kebugaran fisik, meningkatkan memori, dan mencegah rasa mengantuk di kelas.

Budaya Membaca

Buku adalah jendela dunia, membaca adalah kunci untuk membuka 'jendela' dan melihat luasnya dunia. Tanpa membaca, dunia terasa menjadi sempit. Membaca dalam pendidikan militer menjadi kebutuhan pokok untuk menambah wawasan dan pengetahuan, karena ilmu militer bukanlah ilmu pasti (*exact*), namun lebih mengarah kepada *social science* yang dinamis. Untuk menghadapi ilmu yang dinamis ini, dibutuhkan analisis dari berbagai referensi, teori, ataupun sudut pandang.

Oleh karenanya, Seskoad menanamkan budaya membaca kepada siswa agar dapat memenuhi tuntutan intelektual, mengetahui hal-hal aktual, menstimulasi daya imajinatif, serta meningkatkan kemampuan analisis dan berpikir kritis. Dalam



6. Rommie L. Duckworth, *LP Duckworth on Education: Spaced Learning Improves Retention*, diakses pada 8 Oktober 2020, diunduh dari <https://www.emsworld.com/article/1222780/duckworth-education-spaced-learning-improves-retention>.

implementasinya, Seskoad menstimulasi budaya membaca dengan cara diskusi kelompok menggunakan *term of reference* (TOR) atau kerangka acuan kerja (KAK) yang berisi rumusan masalah, persoalan dan sumber referensi yang harus dibaca. TOR/KAK diberikan minimal tiga hari sebelum materi pelajaran diberikan, sehingga siswa memiliki waktu untuk membaca, baik referensi wajib ataupun referensi tambahan.

Sebagai contoh, pada materi pelajaran tehnik analisis, siswa diberi topik mengenai isu keamanan di Indonesia wilayah timur, kondisi wilayah 3T (terdepan, terluar dan tertinggal), dan penambahan komando kewilayahan. Untuk menganalisa permasalahan dalam topik tersebut, siswa diajak untuk membaca referensi wajib dari naskah departemen tentang tehnik analisis, buku membedah analisis SWOT karya Freddy Rangkuti, dan referensi tambahan dari buku, tulisan ilmiah, artikel, jurnal dan buletin yang menunjang proses analisis.

Contoh modal bacaan ini berguna untuk menjawab persoalan-persoalan, dan mendukung pelaksanaan diskusi di dalam kelas. Diskusi menjadi wahana bagi siswa untuk mengeluarkan pendapat, berbagi ilmu dan pengalaman (*sharing knowledge*), mengkaji relevansi doktrin, dan beradu argumentasi menggunakan referensi yang telah dibaca serta aspek empirik masing-masing. Pelaksanaan diskusi ini dapat mengukur apakah siswa membaca atau tidak, karena pada saat diskusi, masing-masing siswa akan ditanya oleh dosen/Patun yang berperan sebagai moderator, serta pada satu jam pelajaran (JP) terakhir dalam diskusi akan dilaksanakan *quiz*. Pertanyaan *quiz* ini langsung dipilih oleh Direktur Pendidikan, dimasukkan ke dalam *server* terpusat untuk ditampilkan pada proyektor yang ada di kelas masing-masing, sehingga mau tidak mau siswa harus membaca agar dapat berkontribusi pada diskusi dan menjawab *quiz* di akhir pelajaran. Diharapkan dengan langkah ini dapat menstimulasi daya ingat siswa, memperoleh *insight* terhadap 'bias' yang ada, dan menambah kedewasaan berpikir.

Budaya Menulis

Menulis dan membaca adalah hal yang tidak dapat dipisahkan, karena penulis yang baik bisa dikatakan adalah pembaca yang baik. Martin Luther pada abad ke-16 menyatakan "jika kamu ingin mengubah dunia, ambil penamu dan mulailah menulis,"⁷ ini mengandung arti bahwa tulisan memiliki implikasi terhadap perubahan.



Menulis melatih keterampilan siswa dalam berpikir, berkomunikasi, berargumentasi dan mengekspresikan ide dan gagasannya.

Dari tulisan yang dibuat, dapat diukur bagaimana kemampuan intelektualnya, pemahaman materinya dan kualitas hasil belajarnya. Menanamkan budaya menulis adalah hal yang krusial bagi siswa sebagai calon pemimpin dan staf militer. Karena perwira harus dapat mengkaji, menganalisa, dan menyarankan kepada pimpinan ataupun organisasi dalam bentuk tulisan secara efektif. Dalam implementasinya, Seskoad menerapkan budaya menulis dengan memberikan penugasan Taskap dan esai kepada siswa.

Taskap merupakan produk penelitian siswa yang disusun mulai awal hingga akhir pendidikan. Sedangkan tugas esai diberikan secara rutin setiap bulannya. Tema esai disesuaikan dengan TOR/KAK sesuai materi pelajaran, dan diketik dengan komputer sebanyak lima halaman. Sebagai contoh, pada materi operasi militer untuk perang (OMP) matra darat, siswa ditugaskan untuk menulis esai mengenai topik sejarah peperangan yang terjadi di berbagai belahan dunia dimulai dari jaman sebelum masehi hingga jaman modern, serta peperangan yang terjadi dalam sejarah Indonesia sejak jaman kerajaan, perang kemerdekaan, hingga penumpasan berbagai pemberontakan di dalam negeri.

Siswa dilatih untuk dapat mengambil *lesson learned* dari topik tersebut, dan menuangkan gagasannya secara mengalir, logis dengan berlandaskan pada teori dan referensi. Selain itu, dengan budaya menulis ini, siswa dilatih untuk terbiasa mengetik sepuluh jari, dan mampu mengoperasikan komputer khususnya aplikasi pokok seperti *microsoft word*, *excel* dan *power*

7. Joan Acocella, *How Martin Luther Changed the World* (2017), diakses pada 8 Oktober 2020, diunduh dari <https://www.newyorker.com/magazine/2017/10/30/how-martin-luther-changed-the-world> disitasi dari Paul L Maier, *A Man Who Change The World* (2004).

point, guna efektivitas dan efisiensi waktu dalam proses penyusunan tulisan ilmiah. Diharapkan dengan ditanamkan budaya membaca dan menulis di pendidikan Seskoad, pemimpin dan staf militer ke depan memiliki ‘hobi’ membaca dan menulis, sehingga dapat menjadi sumber ide, inspirasi dan gagasan yang bermanfaat bagi kemajuan organisasi TNI AD.

Sistem Evaluasi dan Transparansi Nilai

Salah satu upaya dalam memperbaiki kualitas pendidikan dapat ditempuh melalui penyempurnaan sistem evaluasi yang digunakan. Sistem evaluasi yang baik dapat menjadi indikator yang dapat menunjukkan pertumbuhan dan kemajuan siswa ke arah tujuan yang ditetapkan di dalam kurikulum, serta mengukur sejauh mana tujuan-tujuan pengajaran telah dicapai. Untuk mengetahui validitas dari indikator ini maka perlu dibangun sistem ujian yang transparan dan akuntabel. Dalam pelaksanaan evaluasi, Seskoad menyusun model evaluasi yang sistematis.

Pemilihan soal dalam evaluasi dibuat oleh dosen pengampu materi dengan tiga alternatif soal. Soal yang akan keluar dipilih langsung oleh Direktur Pendidikan, tiga puluh menit sebelum ujian dimulai, yang kemudian ditampilkan di proyektor kelas masing-masing. Lembar ujian dikirim ke bagian analisa dan evaluasi pendidikan (Anevdik) untuk di *barcode*, dipisahkan antara lembar biodata dan jawaban, sehingga korektor mengevaluasi tanpa mengetahui siapa pemilik lembar ujian tersebut. Setelah selesai dikoreksi, lembar ujian dikembalikan kepada siswa lengkap dengan rubrik komentar dari korektor agar siswa mengetahui apa keunggulan dan kekurangan dari pendapatnya. Dalam pendistribusian hasil ujian, nilai perorangan siswa akan dikirimkan melalui *email* dan hanya untuk keperluan pribadi siswa, sehingga dapat memelihara moral, dan menstimulasi siswa untuk berkompetisi dengan dirinya sendiri tanpa berkonflik dengan yang lain.

Komandan Latihan

Sebagai calon pemimpin dan staf militer, lulusan Seskoad harus mampu berperan sebagai Komandan Latihan. Komandan latihan yang profesional harus mampu merencanakan, menyiapkan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan latihan secara mandiri. Oleh karenanya, Seskoad menugaskan siswanya untuk mampu menyusun produk latihan seperti rencana garis besar (RGB) dan naskah latihan baik buku I, IIA, IIB, dan III, secara perorangan.

Masing-masing individu harus memahami bagaimana cara menyusun skenario latihan dimulai dari *setting* strategis hingga taktis secara kronologi, rasional dan relevan, serta mampu merancang asumsi waktu yang tepat dan dapat dioperasionalkan pada pelaksanaan Latihan Posko I. Dosen pengampu materi akan meluangkan waktu untuk melaksanakan bimbingan pengasuhan khusus secara rutin bagi siswa yang memiliki kendala dalam penyusunan naskah latihan. Validitas dan relevansi produk yang telah disusun akan diuji dan dipaparkan oleh siswa di hadapan dosen secara orang per orang.

Produk terbaik akan dijadikan sebagai pedoman dan dioperasionalkan pada Latihan Posko I. Produk terbaik juga akan berpengaruh pada penentuan jabatan pada Latihan Posko I, dimana jabatan penyelenggara atau pelaku seperti Komandan Latihan dan Pangkogasgab dipilih berdasarkan indeks nilai tertinggi pada penyusunan RGB dan naskah latihan. Dengan metode ini, diharapkan dapat memotivasi siswa untuk menyusun produk latihan secara serius yang bermanfaat bagi penugasannya sebagai komandan latihan ke depan.

Website Learning Management System

Seskoad akan merancang *website learning management system* (LMS) yang memiliki fitur kelas virtual interaktif dan aktivitas digital untuk mendukung pembelajaran mandiri maupun kolaborasi kelompok. LMS didesain untuk memfasilitasi, memonitor dan menilai aktivitas belajar Siswa. Sistem ini dapat diakses melalui aplikasi *desktop* ataupun *mobile phone* sehingga tidak membatasi ruang dan waktu dari proses pembelajaran. Fitur yang disediakan dalam LMS ini diantaranya kelas virtual, perpustakaan (*e-library*), aktivitas, nilai, dan plagiat detektor.

Dengan fitur-fitur ini membuka peluang bagi dosen untuk mendistribusikan paket instruksi, mengajar, memberikan *feedback* dan menilai aktivitas siswa. Begitu pula siswa dapat mengakses paket instruksi, diskusi, dan ujian dengan mudah, sehingga proses pembelajaran dapat berjalan secara efektif dan efisien. Sistem ini sangat bermanfaat untuk mengintegrasikan metode ‘tatap muka’ dengan metode fleksibel menggunakan pendekatan *web-based (online)*, serta sinkronisasi dan asinkronisasi secara ekstensif diantara peserta didik dan tenaga pendidik pada lokasi yang berbeda, atau terpisah secara geografis dengan zona waktu yang berbeda.

AKADEMI MILITER, “*CENTER OF EXCELLENCE*”, MENCETAK PEMIMPIN BERKEPRIBADIAN KEBANGSAAN DAN BERILMU MENDUKUNG

Oleh: Mayjen TNI Totok Imam S., S.I.P., S.Sos., M.Tr.(Han)
(Gubernur Akmil)

“Para Taruna nantinya akan menjadi pemimpin militer. Leiderschap tidak dapat dicari dalam buku-buku dan didengar dari kuliah-kuliah saja, ia harus dibangun dari diri sendiri dan dari sekarang latihlah diri untuk menjalankan kewajiban dan tanggungjawab sebagai militer dan sebagai pemimpin.”

-Presiden Sukarno, 11 November 1957, AMN



Sejarah Akademi Militer tidak lepas dari sejarah terbentuknya *Military Academy (MA)* di Yogyakarta tahun 1945 sampai 1950, yang merupakan cikal bakal pendidikan militer profesional yang terlembaga-kan dengan baik, guna menyiapkan para pemimpin tentara yang terstruktur dan terorganisir dengan modern. Setelah terputus beberapa saat, lembaga pendidikan tersebut diresmikan kembali di Magelang dengan nama Akademi Militer Nasional (AMN) pada tahun 1957 oleh Presiden Sukarno.

Dalam amanatnya pada peresmian AMN, Presiden Sukarno menekankan tujuan utama berdirinya Akmil adalah untuk mencetak perwira TNI AD sebagai pemimpin yang dapat menjalankan kewajiban dan tanggungjawabnya dengan baik. Sejak terbentuknya hingga saat ini telah banyak perubahan yang dilakukan untuk membentuk perwira TNI AD, yang sesuai dengan tuntutan perubahan ancaman dan situasi kondisi pada eranya. Seperti contohnya pada saat *MA* memiliki tujuan pendidikan adalah melatih calon pemimpin gerilya yang mempunyai dasar teori keilmuan militer modern yang luas.

Bercermin pada contoh tersebut, tentunya tujuan pendidikan pada saat AMN baru berdiri terdapat beberapa pola pembinaan yang perlu penyesuaian dan penambahan, terlebih bila dilihat dari perkembangan potensi ancaman, perkembangan global dan tuntutan yang harus dipenuhi Taruna saat ini, baik profesional di bidang kemiliteran maupun keahlian di bidang pertahanan.

Dengan didasari oleh dinamika perkembangan lingkungan strategis yang dihadapi, pergeseran paradigma ancaman, kemampuan dan batas kemampuan organisasi TNI AD secara umum pembahasan sistem pendidikan di Akmil perlu mendapat perhatian khusus dalam pola pembinaannya agar mampu menjawab tuntutan visi Akmil menuju *The World Class Military Academy*.

Beberapa pertanyaan mendasar, seperti: *Apakah proses pembentukan karakter dan kepribadian kebangsaan untuk Taruna sudah dilakukan dengan tepat? Apakah kurikulum pendidikan sudah dapat menjawab tuntutan visi Akmil dihadapkan dengan perkembangan global dan memberikan bekal ilmu serta keahlian yang cukup untuk nantinya? Bagaimana perkembangan Akmil untuk mencapai visinya sebagai Center of Excellence yang dapat mewujudkan hasil didik yang profesional, dicintai rakyat dan mempunyai keahlian di bidang pertahanan?*

Pembahasan Mewujudkan Visi Akmil sebagai *Center of Excellence* dan *world class Military Academy*

Dalam perkembangannya, Akademi Militer dituntut untuk menjadi lembaga pendidikan yang mampu mencetak calon-calon pemimpin TNI AD yang mempunyai karakter moral unggul, kualitas kemampuan SDM dan kesamaptaan jasmani prima serta berkemampuan di bidang pertahanan. Perwira lulusan Akmil nantinya harus profesional di bidang ilmu kemiliteran dan mempunyai keahlian di bidang pertahanan.

Hal ini menjadi suatu keniscayaan bagi Akmil dalam menyiapkan taruna dalam kurun waktu empat tahun. Namun di sisi lain Akmil saat ini masih belum tuntas dengan segala permasalahan internal yang dihadapi, mulai dari kinerja organisasi, kurikulum yang ada, kondisi tenaga pendidik, sarana prasarana dukungan sampai dengan terbatasnya waktu untuk pembinaan Taruna.

Dengan demikian, diharapkan dalam pelaksanaan kegiatan PBM yang dilakukan nantinya mampu melatih, mentransformasi dan mengedukasi segala sesuatunya untuk menyiapkan Taruna sebagai kader pemimpin masa depan secara tereferensi, tepat, terukur, profesional dan ahli pertahanan menuju *Center of Excellence*.

Sebagai lembaga yang melaksanakan program pendidikan tinggi sesuai yang tertuang pada Undang-undang No. 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, Akademi Militer (Akmil) berperan untuk menghasilkan lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa.¹

Akmil harus senantiasa beradaptasi selaras dengan perkembangan jaman, sehingga menghasilkan lulusan Perwira TNI AD yang mumpuni dan mampu bersaing dengan lulusan Akmil negara lain. Oleh karena itu, dalam rangka menyiapkan Perwira TNI AD yang profesional, Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* juga harus mampu memproyeksikan segenap upaya yang komprehensif untuk mencetak kader pemimpin yang berkarakter dan berkepribadian kebangsaan, cerdas serta memiliki kapabilitas yang unggul.

Secara dini, Akmil telah menyikapi perkembangan lingkungan strategis berimplikasi pada semakin dinamisnya spektrum ancaman negara yang berdampak signifikan pada meningkatnya tantangan dan tuntutan tugas para Perwira lulusan Akmil.² Akademi Militer telah melakukan Langkah-langkah dengan menyusun *Road Map* perencanaan pengembangan Lemdik menuju Akademi Militer yang berkelas dunia atau



1 Kementerian Pendidikan, Undang-undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Jakarta, 2012), pasal 5b.

2 Akmil, *Road Map Pengembangan Akademi Militer Menuju The World Class Military Academy* (Magelang, 2017)



The World Class Military Academy. Konsep *The World Class Military Academy* digagas dengan tetap berpijak dan memegang teguh jati diri TNI AD.

Untuk mencetak perwira lulusan Akmil yang “siap pakai dan *adaptable*” sesuai dengan standar TNI AD dalam rangka mewujudkan visi “*Center Of Excellence*”, Akademi Militer terus berbenah dengan memprioritaskan pembentukan karakter, peningkatan kualitas SDM Taruna sebagai pemimpin, pembenahan dan peningkatan komponen Pendidikan yang lain, pengembangan kurikulum pendidikan yang fleksibel dan adaptif berdasarkan pada perkembangan lingkungan strategis serta menjalin komunikasi intensif dengan civitas akademika setara.

Membentuk Taruna sebagai Pemimpin yang Berkarakter dan Berkepribadian Kebangsaan

Karakter merupakan kualitas pribadi yang bernilai sangat penting bagi seorang pemimpin. Karakter kepemimpinan akan menjadi daya tarik yang membentuk kepercayaan bawahan sehingga mendorong terwujudnya lingkungan satuan yang kondusif. Karakter yang kuat akan berimplikasi pada terbentuknya nilai-nilai positif yang melahirkan kesetiaan dari bawahan sehingga berpengaruh signifikan terhadap pencapaian tugas pokok satuan.

Pembentukan karakter dan kepribadian berkebangsaan merupakan suatu keniscayaan yang harus ditanamkan sejak awal baik melalui materi pelajaran maupun dalam kehidupan korp sendiri agar para Taruna mempunyai tanggungjawab moral yang tinggi. Sehingga secara perlahan akan terwujud watak perilaku disiplin, perubahan cara pandang yang visioner dan kesadaran yang tinggi dari para Taruna dalam Proses Belajar Mengajar.

Sebagai calon pimpinan setingkat Danton di satuan, Taruna harus mulai berlatih memimpin dan membentuk karakter serta kepribadian kebangsaan sejak dini. Salah satu tujuan dari pendidikan di Akmil adalah untuk menggali potensi-potensi tersebut agar menjadi aktual dan dapat dikembangkan.³ Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Akmil harus mendorong terciptanya kesempatan kepada para Taruna untuk memimpin.

Proses ini harus dilewati sebagai bagian dari pembelajaran peningkatan rasa percaya diri, pengendalian diri yang dikombinasikan dengan pengetahuan dan pengalaman. Regenerasi Kelompok Komando Korps Taruna (Pokdokorpstar) merupakan implementasi positif dari latihan kepemimpinan yang dilaksanakan oleh para Taruna.

Sebagai calon Perwira, Taruna harus memiliki kesempatan yang sama untuk berlatih memimpin. Seperti yang dikemukakan oleh pakar psikologi pendidikan Lee Joseph Cronbach bahwa belajar ditunjukkan dengan perubahan kebiasaan sebagai hasil dari pengalaman.⁴ Fase kepemimpinan yang fluktuatif melalui keberhasilan dan menghadapi kegagalan akan menjadi penyeimbang yang baik dalam perkembangan kehidupan mental dan karakter Taruna. Selain itu, kondisi tersebut akan menempa Taruna sebagai figur *ethical leader* yang akan menjadikan satuan-satuan TNI AD lebih humanis dan dicintai rakyat.

“It is not the strongest species that survive, nor the most intelligent, but the ones most responsive to change”

-Charles Darwin-

Merencanakan kurikulum pendidikan yang fleksibel dan adaptif untuk menjawab tuntutan Profesionalisme Militer dan Ahli Pertahanan

Tujuan pendidikan Taruna Akademi Militer, yaitu: membentuk Taruna Akmil menjadi Perwira TNI AD yang memiliki sikap perilaku sebagai prajurit Sapta Marga, Sumpah Prajurit, Pengetahuan dan keterampilan, dasar keprajuritan dan dasar golongan perwira sesuai dengan kecabangan; berkualifikasi Diploma IV di bidangnya dengan gelar Sarjana Terapan Pertahanan atau S.Tr(Han) dan mempunyai kondisi jasmani yang samapta.

3. Ibid, 4

4. Cronbach, *Educational Psychology* (Amerika Serikat, Harcourt Brace Jovanovich, 1977).

5. Sudirman, *Ilmu Pendidikan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1987)

Maka, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah disesuaikan tersebut, kebutuhan akan seperangkat kurikulum pendidikan yang fleksibel dan adaptif adalah suatu keniscayaan yang tidak dapat dihindari⁵, termasuk oleh Akmil sebagai lembaga pendidikan tinggi.

Seorang ahli dalam bidang politik bernama Samuel Huntington mengemukakan bahwa militer profesional adalah tentara yang memiliki keahlian berupa pengetahuan dan keterampilan khusus di bidangnya, sehingga mengemban tanggung jawab terhadap masyarakat sebagai kliennya dan memiliki kesadaran kelompok di antara anggota profesinya yang berbeda dari orang awam.⁶ Mengacu pada hal tersebut, untuk menjadikan Taruna sebagai Perwira yang profesional diperlukan adanya pembekalan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan proyeksi jabatan yang akan diemban, sekaligus sebagai Perwira yang ahli dalam bidang pertahanan.

Dihadapkan pada tuntutan penugasan di satuan, Akmil telah melaksanakan penyesuaian kurikulum pendidikan dengan menambah jumlah jam pelajaran kecabangan sebanyak 572 s.d. 635 JP, dari yang sebelumnya hanya berkisar 98 s.d. 110 JP. Peningkatan jumlah jam pelajaran kecabangan mengandung signifikansi untuk mengakselerasi peningkatan kemampuan Perwira lulusan Akmil sebagai Perwira yang profesional dalam bidang kemampuan kemiliteran matra darat.

Selain itu, guna meningkatkan kualitas hasil didik yang disetarakan dengan lulusan pendidikan vokasi D-4 atau setara Sarjana Strata-1⁷, Akademi Militer sebagai *Center of Excellence* harus mampu beradaptasi secara cepat untuk menjawab tuntutan akan kemampuan Perwira muda TNI AD yang lebih

kompleks. Menyikapi kondisi tersebut, kurikulum pendidikan yang kaku dan “konservatif” tidak lagi relevan untuk diaplikasikan.

Akmil harus mengagas sebuah langkah terobosan yang dapat mengintegrasikan kurikulum pendidikan yang mengarah pada pembentukan karakter prajurit pejuang Sapta Marga yang Profesional dan memiliki integritas terhadap nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan Delapan wajib TNI serta kurikulum berbasis ilmu pertahanan. Hal ini dilakukan untuk membekali para Taruna dengan kemampuan profesionalisme militer, Akmil juga konsern dalam mengefektifkan peran Program Studi Ilmu Pertahanan yang selaras dengan pengelompokan kecabangan. Kurikulum integratif kecabangan yang diselaraskan dengan pembinaan Program Studi Pertahanan, seperti: Manajemen Pertahanan, Administrasi Pertahanan, Teknik Mesin Pertahanan, Teknik Sipil Pertahanan dan Teknik Elektro Pertahanan diharapkan akan mampu meningkatkan penguasaan ilmu pertahanan bagi para Taruna secara berjenjang mulai dari tingkat Kopral Taruna (Koptar) sampai dengan Sersan Mayor Satu Taruna (Sermatutar).

Kesimpulan

Akademi Militer sebagai salah satu Lembaga Pendidikan Pusat TNI AD, “*Center Of Excellence*” tidak henti-hentinya berinovasi untuk mencetak pemimpin yang berkarakter dan berkepribadian kebangsaan serta berilmu melalui langkah-langkah: **Pertama**, pembentukan karakter, moral, beredukasi dan kepribadian berkebangsaan mulai ditanamkan sejak awal guna menumbuhkan rasa tanggung jawab moral yang tinggi.

Kedua, kurikulum Taruna dirancang secara fleksibel dan adaptif berlandaskan nilai-nilai Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI guna menjawab tuntutan Taruna nantinya sebagai prajurit profesional di bidang militer yang dicintai rakyat. **Ketiga**, untuk menjawab tuntutan sebagai ahli di bidang pertahanan, Akademi Militer mengefektifkan pengelompokan Program Studi Ilmu Pertahanan yang berbasis ilmu militer selaras dengan kecabangan Taruna. Perpaduan ini diharapkan akan dapat membulatkan profesionalisme Perwira lulusan Akmil sebagai seorang Perwira militer dan Ahli Pertahanan.



6. Samuel P. Huntington. *The Soldier and the State: The Theory and Politics of Civil-Military Relations*. (Cambridge: The Belknap Press, 1967). 8-10
 7. TNI AD, Keputusan Kasad Nomor KEP/1028/XII/2016 tanggal 15 Desember 2016, (Jakarta, 2016), 9

memiliki konsekuensi tertentu. Artinya, negara kita memiliki ketergantungan terhadap negara pengimpor alutsista. Fakta lainnya, bahwa negara kita memiliki SDM dan SDA yang potensial dan berlimpah.

Diharapkan SDM dan SDA tersebut mampu mengantarkan Indonesia menjadi sebuah negara maju, kuat dan mandiri. Mencermati kecenderungan negara yang maju dan kuat secara ekonomi serta pertumbuhan penduduk sangat tinggi, maka negara tersebut berupaya mengembangkan pengaruh dan kekuasaannya dengan mencari wilayah baru dan ingin menguasai sumber daya alamnya. Beberapa cara untuk menguasai suatu wilayah, diantaranya melalui jalur investasi dan/atau perdagangan, isu pemberantasan terorisme dan isu penegakan Hak Azasi Manusia (HAM). Guna menghindari penguasaan negara lain, segenap komponen bangsa Indonesia seharusnya terpanggil untuk turut berkontribusi dalam mewujudkan NKRI yang disegani dan dihormati oleh bangsa atau negara lain.

Komitmen Pimpinan TNI AD sebagai penjabaran Pasal 7 UU Nomor 34 Tahun 2004 diantaranya adalah menjaga keutuhan NKRI melalui pengembangan kekuatan dan kemampuan SDM matra darat. Harapannya, TNI AD akan diawaki oleh prajurit berkarakter dan berkualitas unggul yang ditandai dengan profesionalisme dan nasionalisme yang tinggi, serta didukung oleh postur organisasi yang efektif, efisien dan modern. Pemerintah Republik Indonesia telah mengalokasikan dukungan untuk membangun dan mengembangkan kekuatan alat utama sistem senjata (Alutsista) angkatan perangnya secara konsisten dan berkelanjutan. Hasilnya dapat dilihat dari data kekuatan Alutsista TNI pada tahun 2019 yang menempatkan Indonesia pada peringkat 14 dunia.

Mencermati data dan fakta berkaitan dengan kemampuan dan kekuatan alutsista setiap negara sebagaimana tabel di atas, seyogyanya data tersebut dijadikan parameter untuk mengukur kekuatan negara sendiri. Artinya, apakah NKRI mampu mempertahankan dirinya manakala gelar kekuatan militernya belum korelasi dan sebanding dengan luas wilayah maupun kemampuan menjaga kekayaan alamnya. Poltekad sebagai bagian dari TNI AD secara konsisten terus berupaya mengembangkan SDM dan teknologi matra darat sesuai tanggung jawab dan batas kewenangannya.

Adapun maksud bahasan ini adalah untuk memberikan gambaran tentang peran Poltekad



➤ Foto Produk Litbang Personel Organik

sebagai lembaga pendidikan tinggi teknologi satu-satunya di lingkungan TNI AD yang fokus pembelajarannya pada bidang Ilpengtek alutsista matra darat, dalam berkontribusi secara maksimal untuk mendukung pembangunan dan pengembangan kekuatan matra darat dari aspek SDM dan produk teknologi guna mendukung tugas pokok TNI AD. Tujuannya untuk memberikan informasi kepada Pimpinan TNI AD terkait upaya pembangunan dan pengembangan sebagian aspek kekuatan matra darat.

Secara akademis, Pendidikan Program Studi (Prodi) Diploma 4 yang diselenggarakan di Poltekad Kodiklatad, mengajarkan dan mengembangkan Ilpengtek tentang teknologi alutsista matra darat yang terdiri dari 4 Prodi yaitu Teknik Otomotif Kendaraan Tempur, Teknik Elektronika Sistem Senjata, Teknik Telekomunikasi Militer dan Teknik Balistik. Tujuan pendidikan Prodi Poltekad diarahkan untuk membentuk dan mengembangkan kemampuan SDM Prajurit TNI AD golongan Bintara agar memiliki pengetahuan dan keterampilan vokasi bidang teknologi alutsista matra darat.

Para lulusan pendidikan tinggi Poltekad telah diarahkan untuk mengisi jabatan di berbagai satuan di lingkungan TNI AD se-Indonesia. Namun, adanya pengaruh mekanisme birokrasi dan sistem hierarki yang ketat, maka pengarahannya lulusan Poltekad belum sepenuhnya sesuai dengan kebutuhan satuan dan belum berorientasi pada tuntutan keahlian dan kompetensinya. Pengarahannya jabatan para prajurit TNI AD lulusan Poltekad, seharusnya dikelola secara cermat melibatkan Pusat Kecabangan dan Fungsi selaku LKT dan Satuan Komando Atas yang terkait. Ke manapun pengarahannya lulusan Poltekad adalah kewenangan Komando Atas. Pada prinsipnya,

Poltekad sudah mampu mencetak SDM prajurit TNI AD sesuai amanah Pasal 8 butir c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004.

Berikut gambaran tentang kontribusi penyelenggaraan pendidikan tinggi Poltekad dalam rangka mewujudkan SDM prajurit TNI AD yang berkualitas unggul dalam bidang teknologi alutsista matra darat. SDM Poltekad dibagi menjadi dua unsur, yakni personel organik militer terutama tenaga dosen dan tenaga pendukung pendidikan lainnya. Kedua, para mahasiswa Poltekad yang terdiri dari golongan Perwira dan Bintara dari berbagai kecabangan TNI AD se-Indonesia yang telah lulus seleksi dan mengikuti pendidikan Poltekad.

Berdasarkan predikat atau kualifikasi akademik, komposisi personel Poltekad saat ini terdiri dari 3 orang strata S3, 37 orang strata S2, dan 52 orang strata S1/D4 serta 11 orang strata D3, sementara personel lainnya minimal lulusan SMA. Guna menunjang proses pembelajaran, Poltekad juga merekrut dan melibatkan beberapa dosen dari perguruan tinggi lain sesuai kebutuhan dengan keilmuan yang linear dengan program studi yang diselenggarakan. Pelibatan personel berkualifikasi akademik akan sangat mewarnai kualitas lulusan Poltekad.

Disamping tuntutan tugas mengajar, SDM organik Poltekad dituntut pula mengembangkan kemampuan diri dengan membuat karya penelitian sesuai kaidah yang berlaku dan harus sejalan dengan kebijakan nasional tentang pengembangan industri pertahanan dalam rangka menuju kemandirian bangsa. Produk penelitian Poltekad diantaranya adalah program pengembangan Raket dan Propelan, Granat Mortir, Sistem menembak senjata ringan yang efektif, Roda Tanpa Udara, Kontes Mobil Hemat Energi serta berpartisipasi aktif dalam Indo Defence Expo & Forum setiap 2 tahun sekali, dan sebagainya yang tidak cukup diuraikan dalam naskah ini.

Berkaitan dengan pengembangan SDM dari unsur mahasiswa, Poltekad telah berupaya membekali dan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para Bintara TNI AD agar memiliki keahlian dalam bidang teknologi alutsista matra darat. Jenis pembelajaran mata kuliah praktek lebih diutamakan daripada mata kuliah teori dengan maksud agar mahasiswa mampu dan siap mengaplikasikan keilmuan dan keterampilan setelah lulus pendidikan dengan predikat Ahli Terapan dengan gelar Sarjana Terapan Teknik (S.Tr.T.).

Partisipasi di berbagai event perlombaan Ilpengtek yang diselenggarakan oleh komunitas pendidikan tinggi Kemenristek Dikti lingkup nasional, selalu diikuti oleh mahasiswa Poltekad, dan hasilnya akhirnya dapat menambah catatan prestasi Poltekad. Misalnya, juara favorit pekan kreativitas mahasiswa tahun 2018 dengan produk Perancangan Sistem Kendali Telemetri pada Robot Tempur yang diselenggarakan di Yogyakarta. Event lainnya adalah predikat juara III “*Diponegoro Science Competition 2019*” yang diselenggarakan di Universitas Diponegoro Semarang. Mahasiswa Poltekad juga memperoleh predikat juara II pada event “*UNY National Innovation Technology*” tahun 2020 yang diselenggarakan oleh Universitas Negeri Yogyakarta.

Berkaitan dengan produk tugas akhir, mahasiswa Poltekad diarahkan untuk berinovasi dan memilih judul penelitiannya pada ilpengtek yang hasilnya diharapkan dapat mendukung tugas-tugas TNI AD yang bersifat Operasi Militer Perang (OMP) maupun Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Produk tugas akhir mahasiswa diantaranya:



Ke depan, kontribusi Poltekad Kodiklatad yang diimplementasikan melalui penyelenggaraan pendidikan tinggi teknologi pada level pendidikan program Diploma diharapkan mampu memenuhi ekspektasi Pimpinan TNI AD dalam rangka mewujudkan TNI AD yang profesional, efektif, efisien, dan modern serta menjadi andalan menuju kemandirian bangsa di bidang teknologi alutsista matra darat.

THE MOST BEAUTIFUL GIFT TO TNI: "ANEH! NEGARA ZONDER TENTARA!"

Oleh: Brigjen TNI Dr. Rachmat S., S.I.P., M.M., M.Tr. (Han)
(Kadisjarahad)



Aneh! Negara zonder tentara!", demikianlah ungkapan dari Oerip Soemohardjo kepada pemerintah yang tidak segera membentuk tentara tetapi malah membentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR). Pembentukan BKR merupakan hasil putusan rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) tanggal 22 Agustus 1945 sebagai strategi untuk menghindari bentrokan dengan pihak tentara Jepang (Gunseikanbu) yang sangat menentang pembentukan tentara bagi negara Indonesia yang baru merdeka.¹

Bagi Soekarno yang menjadi Ketua PPKI pada waktu itu, perjuangan mempertahankan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia lebih baik mengedepankan aspek diplomasi sehingga bangsa Indonesia tidak akan berhadapan dengan pasukan Jepang dan Sekutu yang senjatanya sangat lengkap. Akan tetapi, banyak kalangan termasuk Oerip Soemohardjo memprotes kebijakan tersebut.

Mereka tidak habis pikir mengapa pemerintah tidak segera membentuk angkatan perang di saat negara yang baru merdeka ini sedang berada dalam ancaman militer dari luar.² Namun, pada akhirnya, dengan Maklumat Pemerintah 5 Oktober 1945, Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dibentuk sebagai jawaban atas situasi negara yang mulai tidak aman, terutama karena Inggris mulai masuk ke Indonesia.³

Pembentukan TKR merupakan keputusan yang tepat sebab tidak mungkin perjuangan mempertahankan kemerdekaan hanya dilakukan melalui jalur diplomasi saja, diperlukan jalur fisik bersenjata yang dilakukan oleh angkatan perang negara. Sejarah mencatat bahwa perjuangan untuk mempertahankan Kemerdekaan merupakan hasil bersama antara para elit politik melalui jalur diplomasi dan TNI bersama rakyat Indonesia melalui jalur perjuangan bersenjata.⁴ Masyarakat Indonesia mengakui bahwa mereka yang telah berjuang mempertahankan Kemerdekaan merupakan anak bangsa yang sangat berjasa bagi tetap tegaknya NKRI.

Karena jasa-jasanya itulah, mereka tidak hanya dimakamkan di Taman Makam Pahlawan (TMP) yang tersebar dari Sabang sampai Merauke tetapi banyak juga dari mereka yang diabadikan sebagai nama jalan atau gedung-gedung bahkan tidak sedikit di antara mereka yang diabadikan dalam bentuk monumen-monumen perjuangan yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

1. Lih. Dinas Sejarah Militer TNI-Angkatan Darat, Cuplikan Sejarah Perjuangan TNI-Angkatan Darat (Bandung, 1972), hal.39
2. "Negara 'zonder' Tentara Tanpa Oerip Soemohardjo", <https://militer.id/negara-zonder-tentara-tanpa-oerip-soemohardjo/>, diakses 23 September 2020
3. Pusjarah TNI, Sejarah TNI Jilid I (1945-1949) (Jakarta, 2000), hal. 17
4. "Menganalisis Perjuangan Bangsa Indonesia melalui Perang dan Diplomasi", <https://riyatipendidikanips.wordpress.com/2016/04/05/menganalisis-perjuangan-bangsa-indonesia-melalui-perang-dan-diplomasi/>, diakses 23 September 2020.

Fenomena ini menunjukkan bahwa Bangsa Indonesia adalah bangsa yang besar karena sangat menghormati jasa pahlawan mereka, persis seperti yang dikatakan Presiden Soekarno dalam pidatonya pada tanggal 10 November 1961 “Bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai jasa pahlawannya”.

Saat ini bisa dilihat bahwa TMP di seluruh Indonesia didominasi oleh makam prajurit TNI. Data pada tahun 2017 menunjukkan bahwa makam di TMP Kalibata Jakarta didominasi oleh makam Prajurit TNI. Dari total 9.789 pusara atau 9.813 jenazah, 6.905 makam berasal dari TNI AD, 944 makam (945 jenazah) dari TNI AL, dan 605 makam dari TNI AU sebanyak 605.⁵ Bila dilakukan pendataan di seluruh Indonesia, kemungkinan besar akan ditemukan fakta yang relatif sama bahwa TMP di seluruh Indonesia didominasi oleh makam prajurit TNI. Namun, dari sekian banyak makam Prajurit TNI tersebut, sangat terbatas sekali dari mereka yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional meskipun mereka dimakamkan di TMP karena gugur dalam pertempuran mempertahankan tegaknya NKRI.

Data yang berhasil dihimpun dari Kementerian Sosial RI, jumlah Pahlawan Nasional dari kalangan Prajurit TNI, terutama TNI AD relatif masih sedikit. Jumlah Pahlawan Nasional di Indonesia sejak dikeluarkannya Dekrit Presiden No. 241 Tahun 1958 hingga tahun 2019 ada sebanyak 185 orang. Dari jumlah tersebut, 26 orang berasal dari Prajurit TNI AD atau 14%

MASA KEPEMIMPINAN	JUMLAH PAHLAWAN NASIONAL	PAHLAWAN NASIONAL DARI PRAJURIT TNI AD
PRESIDEN SOEKARNO (1945-1966)	36	12
PRESIDEN SOEHARTO (1966-1998)	68	3
PRESIDEN BJ. HABIBIE (1998-1999)	4	-
PRESIDEN ABDURAHMAN WAHID (1999-2001)	4	-
PRESIDEN MEGAWATI (2001-2004)	8	2
PRESIDEN SUSILO B. YUDHOYONO (2004-2012)	39	4
PRESIDEN JOKO WIDODO (2012-....)	26	5
JUMLAH KESELURUHAN	185	26

► Data Jumlah Pahlawan Nasional Sampai Tahun 2019

dari seluruh anak bangsa yang menerima gelar Pahlawan Nasional.⁶

Meskipun jumlah Prajurit TNI AD yang dianugerahi gelar Pahlawan Nasional relatif masih sedikit, nampaknya masyarakat Indonesia memiliki cara tersendiri untuk menghormati jasa para Prajurit TNI AD yang sangat mereka banggakan. Mereka mengabadikan para Prajurit TNI AD sebagai nama jalan dan monumen di wilayah mereka. Data sementara yang berhasil dihimpun oleh Disjarahad menunjukkan bahwa di Kodam II/Sriwijaya, ada 50 nama jalan dari Prajurit TNI AD yang belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional, mulai dari pangkat Prada hingga Jenderal. Di wilayah Kodam III/Siliwangi, ada 47 nama jalan dari Prajurit TNI AD yang belum diberi gelar Pahlawan Nasional.

Sedangkan di Jember Jawa Timur, ada 2 monumen perjuangan dari prajurit TNI AD yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Jember yaitu Letkol Mochamad Sroedji dan Letkol dr. R.M. Soebandi. Di Temanggung, ada monumen Bambang Soengeng, Kasad ke-3, yang sangat dibanggakan oleh masyarakat Temanggung dan sekitarnya, namun hingga sekarang mereka ini belum dianugerahi gelar Pahlawan Nasional. Bila dilakukan pendataan secara menyeluruh lagi, kemungkinan besar akan ditemukan lebih banyak lagi nama jalan dan monumen perjuangan dari kalangan Prajurit TNI AD dari berbagai tingkat kepangkatan yang menjadi kebanggaan masyarakat lokal di seluruh wilayah Indonesia. Kesemuanya ini menunjukkan bahwa sesungguhnya banyak Prajurit TNI AD yang potensial

5. "Angkatan Darat Mendominasi Makam Pahlawan Kalibata", Tirto.id, 6 Februari 2017, <https://tirto.id/angkatan-darat-mendominasi-makam-pahlawan-kalibata-cipF>, diakses 13 Agustus 2020
 6. Wikipedia, Daftar Pahlawan Nasional Indonesia, https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_pahlawan_nasional_Indonesia, diakses 14 Agustus 2020. Daftar ini dilampirkan pada Naskah Akademik ini.



untuk diusulkan mendapat gelar Pahlawan Nasional.

Penganugerahan gelar Pahlawan Nasional tidak bersifat otomatis. Gelar itu harus diajukan dan diusulkan kepada Pemerintah. Mekanisme pengusulan gelar Pahlawan Nasional telah diatur dalam Peraturan Menteri Sosial RI (Permensos RI) Nomor 15 Tahun 2012. Dalam Permensos RI tersebut dikatakan bahwa pengusulan seorang warga negara yang berjasa besar kepada bangsa dan negara dilakukan secara berjenjang melalui Bupati/Walikota, kemudian diajukan kepada Gubernur dan selanjutnya diajukan kepada Menteri Sosial sebelum dimintakan persetujuan kepada Presiden RI. Pengusulan dari Bupati/Walikota dan Gubernur didasarkan pada pertimbangan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Daerah (TP2GD) dan hasil seminar atau diskusi di tingkat Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Selanjutnya usul dari Menteri Sosial disampaikan kepada

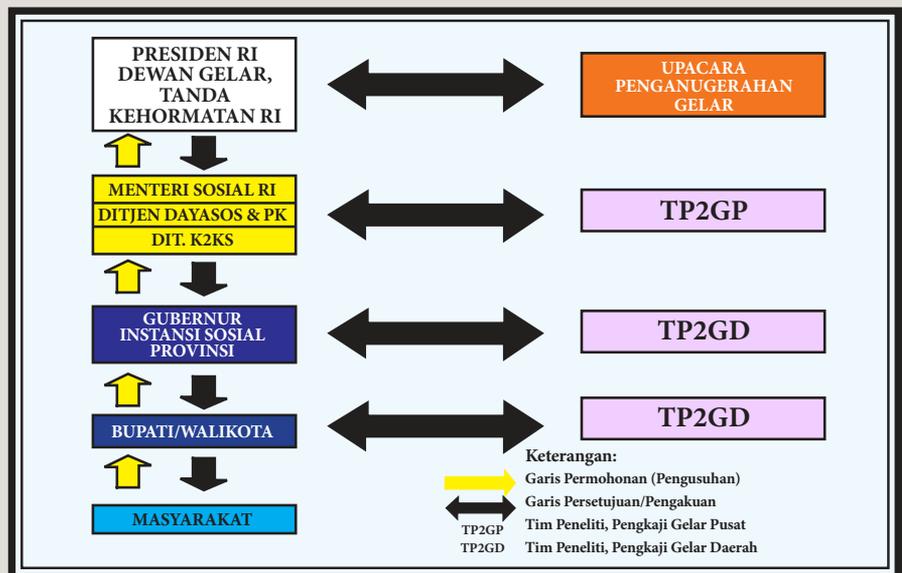
Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Tim Peneliti dan Pengkaji Gelar Tingkat Pusat (TP2GP). Usul tersebut menjadi kuat apabila didukung data-data berupa foto-foto/gambar dokumentasi. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah nama yang bersangkutan telah diabadikan melalui sarana monumental seperti digunakan sebagai nama jalan, bangunan, dan sarana umum lainnya serta adanya catatan, pandangan atau pendapat dari orang dan tokoh masyarakat tentang diri yang bersangkutan, termasuk catatan dari masyarakat internasional misalnya data sejarah yang bersangkutan tercantum dalam data sejarah di Leiden Belanda.⁷

Permensos RI tersebut membuka ruang yang cukup luas bagi TNI AD untuk mengusulkan Prajuritnya guna menerima anugerah Pahlawan Nasional. Namun menurut Permensos RI, inisiatif pengusulan itu harus melalui pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Oleh karena itu, sejalan dengan peraturan tersebut, inisiatif pengusulan dari TNI AD harus dimulai dari tingkat Kodim, Korem, dan Kodam yang bersinergi dengan Pemda Kabupaten/Kota dan Provinsi serta komunitas sejarawan di wilayah tersebut akan memproses lebih lanjut.

Permasalahannya adalah pengusulan gelar Pahlawan Nasional dari kalangan Prajurit TNI AD terkendala pada data sejarah. Tidak semua Prajurit TNI AD yang namanya diabadikan sebagai nama jalan maupun monumen perjuangan memiliki data sejarah yang relatif lengkap, bahkan banyak juga yang tidak ada data sejarahnya.

Bisa diambil contoh Kopral Daud sebagai nama jalan di Palembang Sumsel atau Sersan Surip yang menjadi nama jalan di Bandung tetapi data sejarah mereka sampai sekarang belum ada. Padahal data sejarah tersebut menjadi sangat penting dalam pengusulan gelar Pahlawan Nasional terutama di



➤ Bagan Prosedur Pengusulan Gelar Pahlawan Nasional

7. Hasil wawancara dengan Bapak Selamat Ginting, wartawan senior Republika dan pemerhati masalah sejarah pada tanggal 11 Agustus 2020

era demokrasi seperti sekarang ini yang sangat mengedepankan kajian dan pertimbangan ilmiah.⁸

Bisa dibayangkan, seandainya data sejarah para Prajurit TNI AD yang telah diabadikan jasa mereka dalam monumen perjuangan maupun sebagai nama jalan, pasti akan ada banyak Prajurit TNI AD yang bisa diusulkan dan diproses untuk menerima gelar Pahlawan Nasional.

TNI AD akan memiliki banyak Pahlawan Nasional bukan hanya dari golongan Perwira namun juga dari golongan Tamtama dan Bintara yang selama ini seakan-akan belum tersentuh oleh gelar tersebut. Dampak positifnya akan sangat signifikan di mana prajurit dari semua strata kepangkatan akan merasa bangga dan juga militansi Pahlawan Nasional bisa meneladan secara konkret bagi Prajurit TNI AD.

Pahlawan Nasional ini juga bisa dijadikan bahan mata pelajaran sejarah di Rindam-Rindam jajaran TNI AD, apalagi dengan sistem rekrutmen Prajurit TNI AD sekarang ini yang berbasiskan putera daerah, pengangkatan gelar Pahlawan Nasional dari putera daerah dapat menjadi materi ajaran yang relatif menarik bagi para siswa sekaligus akan menjadi bentuk keteladanan yang konkret sesuai dengan konteks geografis mereka. Mereka bisa dengan mudah membayangkan bagaimana perjuangan para pendahulu mereka yang dengan rela menyerahkan jiwa dan raganya demi tegaknya NKRI.



Dampak positif yang ditimbulkan dari penganugerahan Pahlawan Nasional bagi Prajurit TNI AD yang dibanggakan masyarakat lokal tidak hanya berhenti di situ saja. Meminjam teori Benedict Anderson dalam bukunya *Imagined Communities*, penganugerahan gelar Pahlawan Nasional dari putera daerah juga akan menciptakan suatu bayangan dalam pikiran dan perasaan masyarakat lokal bahwa mereka merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang sama-sama berjuang untuk menegakkan NKRI.⁹

Mereka bangga bahwa Prajurit TNI AD yang mereka banggakan diakui oleh negara sebagai pribadi yang berjasa bagi bangsa dan negara Indonesia. Anderson sendiri menegaskan bahwa dalam kasus Indonesia, adanya museum, monumen atau artefak-artefak sejarah lain termasuk di dalamnya pemberian gelar Pahlawan Nasional merupakan

sarana yang terbaik untuk memperkuat rasa nasionalisme warga negaranya.¹⁰

Dengan demikian, pengusulan gelar Pahlawan Nasional dari kalangan Prajurit TNI sesungguhnya merupakan the most beautiful gift (kado terindah) yang bisa diberikan oleh TNI di hari ulang tahunnya baik kepada Prajurit TNI maupun kepada masyarakat Indonesia. Gift yang dapat memberikan semangat militansi bagi Prajurit TNI dan sekaligus dapat meningkatkan kohesi nasional yang sangat mendukung tugas TNI dalam menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. ***Dirgahayu TNI Ke-75, Semakin Profesional dan Unggul di Segala Medan Penugasan.***

8. Bdk. Miftah Thoha, *Birokrasi dan Dinamika Kekuasaan* (Jakarta: Kencana, 2016), hal.289

9. Lih. Benedict Anderson, *Imagined Communities Reflection on the Origin and Spread of Nationalism* (London: Verso, 2006), hal. 6-11. Anderson mendefinisikan bangsa (nation): "It is an imagined political community - and imagined as both inherently limited and sovereign"

10. Lih. Ibid.

INTEGRATED FARMING SYSTEM: SEBUAH PROSPEK UNTUK MENUNJANG KETAHANAN PANGAN DI PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

**Oleh: Brigjen TNI Cahyo Suryo Putro. S.I.P, M.Si
(Danrem 091/ASN)**

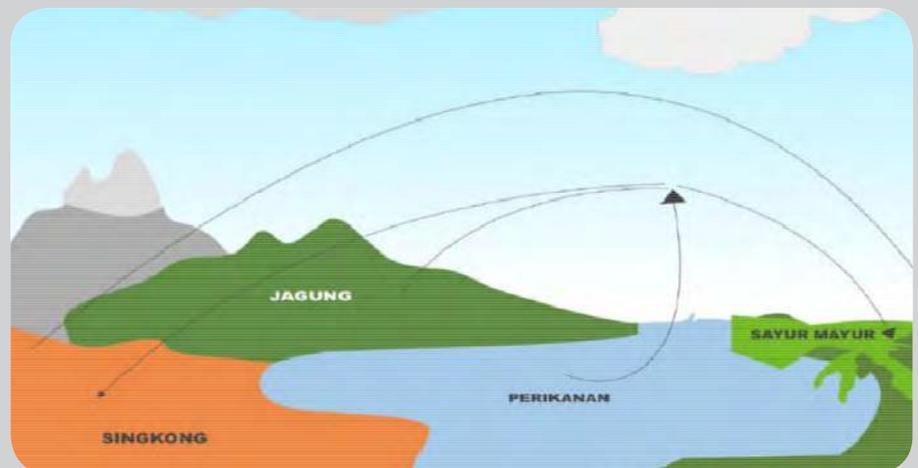


Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*) di Indonesia tidak dapat dicapai tanpa kontribusi sektor pertanian. Sektor pertanian dihadapkan dengan tantangan produksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk yang terus meningkat sementara sumber daya alam (SDA) terbatas.

Integrated Farming System (IFS) dapat menjadi solusi pada *farm level* untuk menyeimbangkan produksi pangan, profit, keamanan, kesejahteraan hewan, tanggung jawab sosial dan lingkungan. *Integrated Farming System* (IFS) di Provinsi Kalimantan Timur ini selaras dengan rencana pembangunan IKN baru di provinsi tersebut. IFS ini juga merupakan sebuah terobosan untuk mendukung “Pengembangan *Food Estate* Mendukung Ketersediaan Pangan Mandiri Khususnya Ibu Kota Negara” yang dicetuskan Menteri Pertahanan RI, Bapak Prabowo Subianto. Inisiatif ini sangat krusial karena dapat menjamin ketersediaan bahan pangan di wilayah IKN baru di masa yang akan datang.

Dengan adanya IKN baru, populasi di wilayah tersebut akan meningkat sehingga dibutuhkan perencanaan ketahanan pangan. Hal ini sejalan dengan apa yang dikatakan pakar demografi dan ekonomi Inggris, Thomas Malthus, bahwa populasi manusia akan terus meningkat secara substansi setiap 30-40 tahun. Sejalan dengan pertumbuhan populasi tersebut, kebutuhan pangan pun akan semakin meningkat.

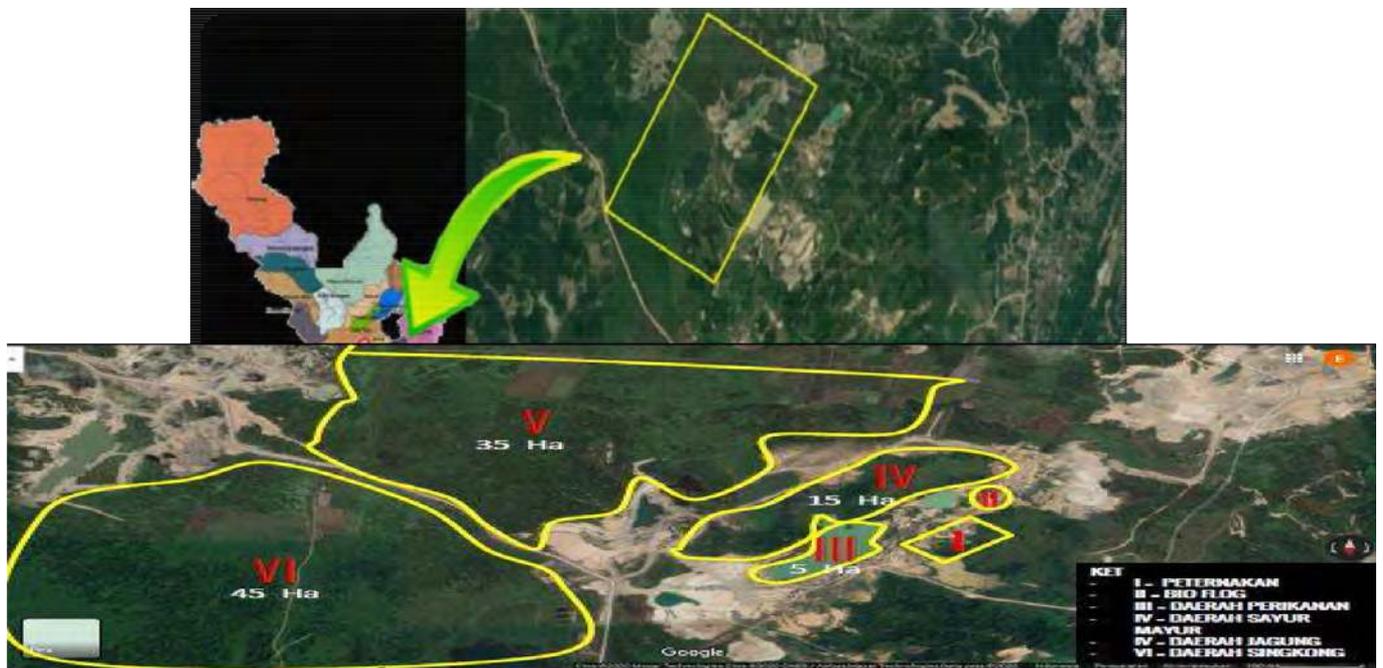
TNI-AD memiliki peran sentral dalam merumuskan strategi pertanian bersama pemangku kepentingan terkait di wilayah IKN yang kemudian menjadikan IFS sebagai program pertanian untuk menunjang kemandirian pangan. Korem-091/ASN, bekerja sama dengan pemerintah daerah, telah mengkaji potensi wilayah ditinjau dari sisi ekonomi, sosial dan ekologi untuk mengembangkan IFS.



Sekilas Tentang *Integrated Farming System*

IFS¹ mengadopsi konsep rantai makanan antara manusia, hewan dan tumbuhan sehingga melalui pendekatan ini, kebutuhan pangan dapat diproduksi secara berkelanjutan. Konsep ini sebenarnya sudah diterapkan oleh petani pada zaman dahulu namun masih bersifat konvensional sehingga tidak

¹ Merupakan pendekatan yang memadukan fungsi pertanian, peternakan, perikanan, serta kehutanan dalam satu kawasan terpadu untuk mendapat manfaat ekonomi, sosial dan ekologi (Ismaya, dkk. *Integrated Farming System: Dalam Pengentasan Kawasan Rawan Pangan*, 2015).



► Gambar 2. Desa Tani Bakti, Kec. Loa Janan

memadukan sumber daya secara holistik. IFS kemudian dikembangkan secara terpadu dan modern dengan konsep yang lebih canggih dan dinamis. IFS ini sangat penting karena dapat: (1) mengatasi kelangkaan SDA yang merupakan salah satu ancaman di masa depan karena IFS dapat menciptakan keseimbangan antara pangan, pakan dan sumber energi dari limbah peternakan; (2) membentuk sistem pembangunan berkelanjutan karena pemanfaatan secara menyeluruh dari peternakan ke pertanian untuk manusia kemudian dikembalikan ke alam melalui penghijauan; dan (3) menyadarkan konsumen akan pentingnya melestarikan alam karena IFS menekankan kelestarian lingkungan namun tetap meningkatkan manfaat ekonomi untuk kepentingan masyarakat.

IFS yang dijalankan secara tepat akan menghasilkan **4F** (*Food, Fuel, Feed, dan Fertilizer*); *Food* bagi manusia karena merupakan kebutuhan dasar manusia dan melalui IFS, kebutuhan nabati dan hewani dapat dipenuhi. *Fuel* bagi manusia di mana melalui IFS, biogas dapat diproduksi untuk kepentingan rumah tangga; *Feed* bagi ternak di mana belakangan ini terjadi kompetisi antara pakan dan pangan misalnya, jagung seharusnya merupakan sumber nabati bagi manusia, namun peternak juga membutuhkan jagung untuk pakan sapi. Melalui IFS, kompetisi ini dapat diatasi; dan *Fertilizer* bagi tumbuhan di mana pupuk kompos dari kotoran ternak dapat diproduksi melalui IFS.

Gambar 1 di atas menunjukkan siklus IFS yang apabila dikembangkan secara benar akan menghasilkan siklus yang saling menunjang antara sub-kategori pertanian. Siklus seperti ini sangat penting untuk menunjang keberlanjutan. Berdasarkan gambaran di atas, Korem-091/ASN menilai bahwa IFS ini sangat urgen diterapkan di Provinsi Kalimantan Timur karena selain provinsi ini memenuhi kriteria untuk pengembangan IFS sebagai akselerasi ketahanan pangan di wilayah penyangga IKN, provinsi tersebut juga membutuhkan terobosan dalam bidang pertanian berkelanjutan dan menjadi percontohan bagi provinsi lainnya.

Prospek *Integrated Farming System* di Provinsi Kalimantan Timur

Setelah melalui berbagai kajian oleh Korem-091/ASN, Provinsi Kalimantan Timur secara sosio-kultural dan kondisi geografis sangat potensial untuk dijadikan lokasi IFS karena struktur tanah, kelembaban, temperatur dan elemen pendukung lainnya termasuk luas lahan yang cukup. Korem-091/ASN menginstruksikan tiap Kodim dan jajarannya untuk memberdayakan ± 100 ha untuk pengembangan IFS yang tentunya berkoordinasi dan berkolaborasi dengan pemangku kepentingan di wilayah satuan masing-masing. Salah satu proyek pilotnya adalah rencana pengembangan IFS di Kabupaten Kutai Kertanegara yang dikerjakan oleh KODIM-0906/TGR dengan perincian sebagai berikut:

- Wilayah Kotabangun seluas 40 ha. Lahannya merupakan lahan tidur (hutan cadangan pangan KODIM-0906/Tgr)
- Wilayah Loa Kulu seluas 20 ha. Lahannya merupakan lahan tidur dan merupakan satuan hamparan; dan
- Wilayah Loa Janan seluas 100-200 ha. Lahannya merupakan lahan tidur (bekas lahan tambang).

Gambar 2 menunjukkan salah satu lokasi IFS di Desa Tani Bakti, Kecamatan Loa Janan yang merupakan lokasi terluas dari ketiga lokasi yang terpilih. Di lokasi ini rencananya akan dikembangkan berbagai komoditas pertanian dan perikanan seperti pada Gambar 3, sesuai tipologi kawasan.

IFS di wilayah penyangga IKN baru ini bertujuan untuk memperpanjang siklus biologis dengan mengoptimalkan pemanfaatan hasil samping pertanian yakni sayursayuran, jagung dan singkong dan peternakan yakni peternakan ayam, dan perikanan yakni keramba ikan. Setiap mata rantai siklus ini menghasilkan produk baru yang memiliki nilai ekonomis. Dengan adanya IFS, variasi sumber pendapatan dapat ditingkatkan untuk membantu petani keluar dari garis kemiskinan karena IFS menekankan pada sistem pertanian nirlimbah yang ekonomis, ekologis, dan berkelanjutan. IFS juga dapat menekan biaya produksi karena menggunakan pupuk organik yang berasal dari ternak atau sisa pertanian dan sangat membantu menjaga kesuburan tanah.

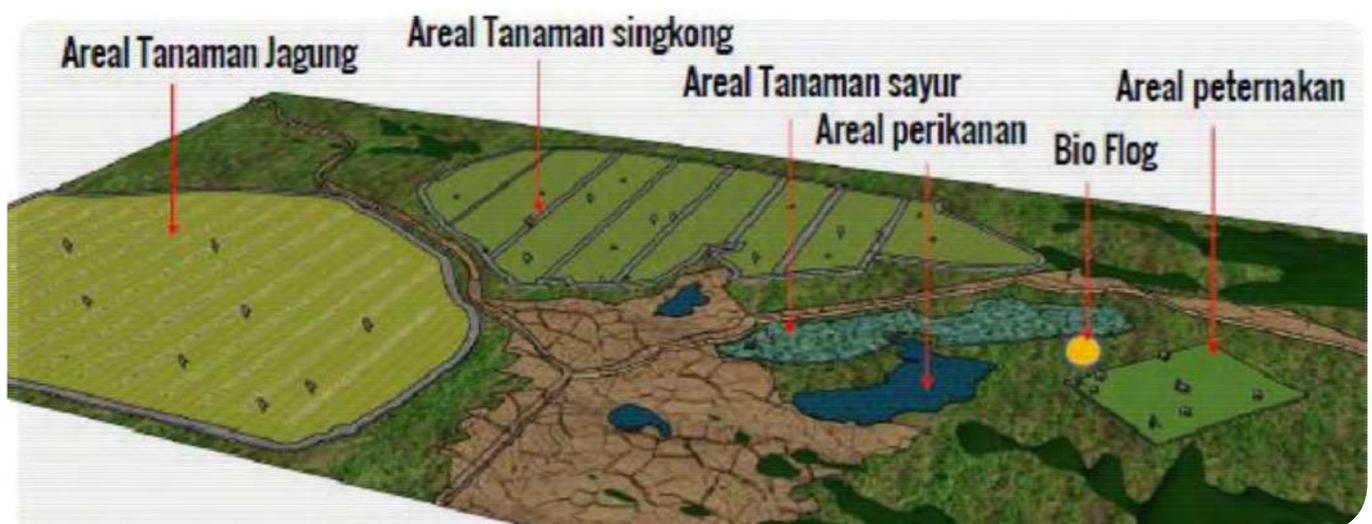
Optimalisasi pemanfaatan lahan akan dapat tercapai karena upaya intensifikasi tidak harus ditinggalkan untuk mencapai produktivitas pertanian

sebagai penghasil pangan dalam skala besar selama aspek konservasi lahan dan tanah tetap dipertahankan. Karena aspek biaya produksi dapat murah, kompetitif dan terjangkau, IFS ini dapat diterapkan pada lahan subur ataupun lahan marginal seperti gambaran di Kabupaten Kutai Kertanegara yang pada akhirnya akan mengoptimalkan fungsi lahan sehingga dapat membantu peningkatan pendapatan petani lokal.

Penutup

IFS sangat urgen diterapkan di wilayah penyangga IKN baru karena potensinya yang dapat mendukung ketercapaian SGDs di level nasional. Karena kondisi sosiokultural dan geografis yang menunjang, Provinsi Kalimantan Timur sangat berpotensi dalam pengembangan IFS untuk mengakselerasi ketahanan pangan di wilayah penyangga IKN baru. Di Kabupaten Kutai Kertanegara, misalnya, terdapat proyek pilot rencana pengembangan IFS yang mencakup tiga kecamatan dengan luas lahan dan komoditas yang bervariasi. Proyek pilot ini akan segera direalisasikan setelah koordinasi antara pemangku kepentingan dilakukan untuk menjamin keberlangsungan pengembangan IFS di kabupaten tersebut. Dengan demikian, IFS yang modern di wilayah penyangga IKN baru ini dapat menjadi jawaban terhadap kebutuhan pangan di masa mendatang, jadi pengembangannya membutuhkan kolaborasi dan sinergi dari pemangku kepentingan.

Dengan berbagai sumber daya, pengalaman dan kepemimpinan yang dimiliki, Korem-091/ASN dapat bertindak sebagai penggerak ketahanan pangan melalui pengembangan IFS dan menjamin kesuksesan IFS di Provinsi Kalimantan Timur.



➤ Gambar 3. Lokasi dan Jenis Komoditas IFS

STRATEGI DAN PERAN KOREM 172/PWY DALAM PENYELESAIAN KONFLIK DI TANAH PAPUA

Oleh: Brigadir Jenderal TNI Izak Pangemanan
(Danrem 172/PWY)

Penyelesaian konflik di tanah Papua telah melalui perjalanan panjang, namun ujung jalannya masih belum bisa dipastikan. Berbagai cara telah dilakukan, tetapi bagai Covid-19 yang masih membuat bingung semua pihak yang diberi tugas untuk mengendalikan penularan virus yang berbahaya tersebut, demikian pula dengan penanganan sentimen Papua Merdeka yang masih terus bergulir menginfeksi generasi demi generasi.

Korem 172/Praja Wirayakti sebagai salah satu satuan kewilayahan yang berada di garis depan dalam penanganan konflik di tanah Papua, berupaya untuk mewujudkan kondisi kondusif bagi keberhasilan penanganan konflik, dengan meningkatkan perannya sejalan dengan strategi penanganan yang ditetapkan oleh pemerintah. Juga berpedoman pada strategi penanganan yang ditetapkan oleh Pangdam XVII/Cenderawasih. Upaya yang dilakukan adalah mempertemukan perbedaan pendapat antara pemerintah dan masyarakat Papua tentang status politik Papua, meredam dan mengatasi dampak negatif dari penanganan yang telah dilakukan selama ini, dan meniadakan pengaruh asing yang masih mewarnai penyelesaian konflik Papua. Dari upaya yang dilakukan oleh Korem 172/PWY, diharapkan dapat memberi dampak signifikan bagi penyelesaian konflik Papua.

Sepintas tentang Konflik di Tanah Papua

Konflik di tanah Papua masih berlangsung hingga saat ini, walaupun sudah berusaha diatasi selama 59 tahun (terhitung mulai Operasi Trikora tahun 1961). Proses penyelesaian konflik ini dapat dibagi menjadi 4 babak, yaitu **pertama** babak konflik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda, **kedua** babak transisi, **ketiga** babak gerakan politik generasi peralihan Papua Indonesia, dan **keempat** babak gerakan politik generasi Papua Indonesia. Setiap babak tersebut memiliki arahnya sendiri, yang menuntut adanya kesamaan langkah untuk mengikuti kompas penyelesaian konflik yang sangat dipengaruhi oleh medan magnet pikiran, jiwa, dan perasaan rakyat Papua.

Konflik antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Belanda tentang status politik Papua, dimulai sejak dihasilkannya kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar (KMB) pada tahun 1949, yaitu bahwa Belanda mengakui kedaulatan Indonesia yang meliputi seluruh bekas jajahan Hindia Belanda, kecuali Papua yang akan diselesaikan dalam waktu 1 tahun kemudian.

Babak ini berlangsung sampai dengan kembalinya Papua ke Indonesia pada tanggal 1 Mei 1963. Pada masa ini sudah ada generasi yang telah terdidik dengan baik oleh Belanda (*well Dutch educated*), yaitu mereka yang lahir di era penguasaan Belanda, mendapat pendidikan dari sekolah Belanda dan telah menikmati kesejahteraan dari Belanda (saat ini berusia lebih dari 60 tahun). Walaupun jumlah generasi ini tidak banyak, namun berperan dalam menentukan arah konflik Papua, karena kapasitasnya sebagai saksi sejarah.

Babak transisi dimulai sejak 1 Mei 1963 sampai dengan Pepera tahun 1969, yang menghasilkan sikap dari seluruh perwakilan masyarakat Papua yang secara aklamasi memilih menjadi bagian dari Indonesia.





Pada masa ini lahir generasi peralihan, yaitu mereka yang sudah lahir di era Belanda, namun belum terdoktrin dengan baik oleh kehidupan pada masa penguasaan Belanda, tetapi harus menjadi orang Indonesia (saat ini berusia 50 s.d 60 tahun). Sekarang ini, generasi peralihan berada pada posisi yang mendominasi arah penyelesaian konflik Papua, karena eksistensinya pada semua simpul politik baik suprastruktur maupun infrastruktur.

Generasi peralihan Papua Indonesia adalah generasi yang lahir di era Indonesia, sekolah di sekolah Indonesia dan diajari oleh guru Indonesia, tetapi dibesarkan oleh orang tua yang masih menceritakan tentang kehidupan jaman Belanda. Generasi ini hanya mendengar dari orang tuanya tentang apa yang terjadi pada proses kembalinya Papua ke Indonesia. Pada era ini menguat trilogi perjuangan Papua merdeka yaitu pelurusan sejarah, tuntutan hak dasar, dan pelanggaran HAM. Era ini diwarnai oleh munculnya kelompok intelektual muda yang menuntut adanya perhatian secara khusus kepada masyarakat Papua (saat ini berusia 40 s.d 50 tahun).

Generasi ini yang mewarnai pro-kontra otonomi khusus bagi Papua yang dipahami sebagai jalan tengah antara permintaan pisah dari Indonesia dan Papua tetap menjadi bagian integral dari Indonesia. Sentimen utama yang dibangun oleh mereka adalah bahwa otonomi khusus gagal mewujudkan harapan masyarakat Papua dan referendum adalah solusinya.

Generasi Papua Indonesia adalah generasi yang lahir dan dibesarkan sepenuhnya dalam era Indonesia. Mereka mengetahui tentang konflik Papua hanya dari literatur dan cerita mulut ke mulut yang jarang dikonfirmasi kebenarannya. Generasi ini cenderung berpikir dan bertindak secara emosional, ketimbang rasional. Generasi ini sangat kritis terhadap setiap kebijakan pemerintah, tetapi minim pengetahuannya tentang arah kebijakan pemerintah tersebut. Sebagian besar mereka adalah garda depan dalam setiap aksi politik dalam dan luar negeri, bahkan menjadi kekuatan utama gerakan bersenjata OPM pada saat ini.

Dengan melihat perkembangan konflik Papua, dapat dipahami bahwa arah penyelesaian konflik Papua akan ditentukan oleh pemenang generasi. Siapa yang memenangkan generasi, dialah yang akan memenangkan konflik Papua. Generasi yang dimaksud adalah Orang Asli Papua (OAP). Dengan demikian penyelesaian konflik Papua akan ditentukan oleh Orang Papua sendiri. Sudah saatnya dilakukan penyesuaian strategi penyelesaian konflik Papua yang lebih fokus pada upaya memenangkan generasi.

Peran Korem 172/PWY dalam penyelesaian konflik di tanah Papua

Konflik Papua mengharuskan penyelesaian yang melibatkan seluruh komponen baik pada dimensi sipil maupun militer, dengan mengedepankan peran masyarakat Papua sebagai penentu utama.

Korem 172/PWY sebagai satuan kewilayahan yang bersentuhan langsung dengan Konflik Papua, menjadi unsur terdepan dalam mengupayakan terwujudnya kondisi akomodatif bagi penyelesaian konflik Papua, dengan fokus pada upaya untuk mempertemukan perbedaan pendapat yang sudah semakin dalam dan luas, dampak penanganan konflik (dendam, luka hati, dan hilangnya kepercayaan), serta pengaruh asing yang masih melekat dalam setiap dinamika perkembangan konflik Papua. Dendam, luka hati, dan hilangnya kepercayaan adalah pangkal dari semua sentimen yang dibangun oleh gerakan Papua merdeka.

Korem 172/PWY dalam penyelesaian konflik Papua menitikberatkan perannya dalam upaya untuk menemukan sentimen utama dalam potensi konflik dominan yang menyebabkan konflik Papua tetap eksis hingga saat ini, agar dapat diatasi melalui pembinaan teritorial. Karena pembinaan teritorial bertujuan untuk mewujudkan ruang, alat dan kondisi juang yang tangguh dalam menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara. Kemampuan untuk menemukan sentimen utama tersebut, ditentukan oleh pemahaman tentang konflik Papua, pokok permasalahan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

Sesungguhnya konflik Papua dapat diatasi manakala masyarakat Papua memiliki ketahanan untuk tidak mudah terprovokasi oleh propaganda Papua merdeka. Masyarakat harus memiliki kemampuan untuk membedakan benar atau salah dari setiap isu yang diterima, dengan melakukan konfirmasi kepada sumber yang tepat.

Untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap sentimen anti NKRI, Korem 172/PWY mengedepankan peran Tokoh agama, Tokoh adat, paguyuban lintas nusantara, pemuda adat dan mahasiswa dengan memberikan ruang partisipasi yang lebih besar kepada mereka dalam mengatasi setiap permasalahan sosial maupun politik. Sebab simpul-simpul massa tersebut memiliki kompetensi untuk membantu mengefektifkan komunikasi sosial yang dilakukan dalam pembinaan teritorial.

Strategi Korem 172/PWY dalam penyelesaian konflik Papua

Pada kunjungan Presiden Joko Widodo ke Papua, saat mengunjungi Korem 172/Praja Wira Yakti pada tanggal 9 Mei 2015, menuliskan pesan dengan tinta basah di atas kulit kayu, yang berbunyi: "Jaga Keamanan Papua Dengan Pendekatan Kesejahteraan". Pesan itu bermakna perintah sekaligus strategi negara yang harus

dilakukan oleh semua unsur yang terlibat dalam penyelesaian konflik Papua.

Korem 172/PWY menjabarkan perintah tersebut dengan melakukan beberapa langkah strategis, yaitu: reorientasi, reformulasi basis pemikiran tentang konflik Papua, reposisi peran, rekonsolidasi daya dukung penyelesaian konflik Papua, dan revitalisasi kemitraan. Langkah tersebut dilakukan dengan berpedoman pada kebijakan Pangdam XVII/Cenderawasih, yaitu penyelesaian konflik Papua dengan hati. Di mana segala upaya, pekerjaan dan kegiatan yang dilakukan dalam menangani setiap persoalan yang terkait dengan konflik Papua, harus bisa diterima oleh hati rakyat Papua, serta diwujudkan dengan implementasi konsep Binter TNI-AD.

Langkah reorientasi meliputi pengembangan pendekatan komprehensif, pengembangan sasaran strategis yang akan dimenangkan, dan pengembangan kebijakan yang mampu memberikan langkah maju bagi penyelesaian konflik Papua. Pengembangan pendekatan komprehensif meliputi pendekatan kesejahteraan, agama, budaya, kesetaraan, penghargaan HAM, dan pendekatan pelestarian lingkungan hidup. Sasaran strategis yang akan dimenangkan adalah pikiran, jiwa, dan perasaan masyarakat Papua, dengan mengedepankan dimensi kecepatan, akurasi dan luas cakupan.

Pengembangan kebijakan diarahkan untuk memberikan langkah maju bagi penyelesaian konflik Papua dengan membangun sentimen berbasis tindakan nyata menghentikan pertumpahan darah di tanah Papua, terbangunnya kohesi sosial yang lebih baik, dan mewujudkan keterpaduan operasi dari semua unsur yang terlibat dalam penanganan konflik Papua di wilayah Korem 172/PWY.

Langkah reformulasi basis pemikiran tentang konflik Papua meliputi pengembangan basis manajemen, pengembangan norma, standar, prioritas dan kriteria, serta pengembangan mekanisme dan komitmen. Pengembangan basis manajemen bertujuan untuk mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik Papua, berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan setiap permasalahan. Pengembangan norma, standar, prioritas dan kriteria ditujukan untuk menyelesaikan konflik Papua secara tuntas. Pengembangan mekanisme dan komitmen dilakukan mengikuti pola integrasi/keterpaduan yang dapat mencegah terjadinya tumpang tindih kepentingan.

Langkah reposisi peran dilakukan dengan pemanfaatan sarana dan prasarana, pengembangan simpul-simpul pertumbuhan, penguatan kapasitas Pemda dan masyarakat, dan peningkatan pengamanan dan penegakan hukum. Pemanfaatan sarana dan prasarana dilakukan dengan memberdayakan program pembangunan pemerintah pusat, antara lain jalan Trans-Papua sebagai sarana untuk mewujudkan kesejahteraan, bersamaan dengan upaya mengalahkan OPM.

Pengembangan simpul-simpul pertumbuhan difokuskan pada bidang pendidikan, kesehatan dan ketahanan pangan. Penguatan kapasitas Pemda dan masyarakat dilakukan dengan mengupayakan kondisi aman yang memungkinkan berjalannya roda pemerintahan sampai ke kampung yang memungkinkan tumbuh berkembangnya produktivitas dan kemandirian daerah. Peningkatan pengamanan dan penegakan hukum bertujuan untuk menguatkan eksistensi hukum nasional (bukan hukum adat) dengan memperkuat integrasi antara TNI dan Polri.

Rekonsolidasi daya dukung penyelesaian konflik Papua dilakukan dengan pengembangan sinergitas, optimalisasi pemanfaatan SDA dan SDM, pengembangan sistem pelayanan khusus, dan pengembangan wawasan kebangsaan. Pengembangan sinergitas diarahkan untuk mendorong terwujudnya efektifitas peran dari semua pemangku kepentingan (*stake holder*) yang terkait dengan pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua. Pemanfaatan SDA dan SDM dioptimalkan dengan menguatkan komitmen pelestarian alam, pemberdayaan lahan yang sudah ada secara berkelanjutan, dan peningkatan kemampuan SDM melalui pola pendampingan. Sistem pelayanan khusus difokuskan pada daerah yang masih terisolasi dan daerah pedalaman, khususnya pada bidang pendidikan dan kesehatan. Pengembangan wawasan kebangsaan ditujukan untuk mendukung upaya menjadikan masyarakat sebagai unsur utama dan terdepan yang menentukan penyelesaian konflik Papua.

Revitalisasi kemitraan dilakukan melalui peningkatan kerjasama dengan pelaku ekonomi, peningkatan ketahanan daerah, dan pengembangan fasilitas kemudahan. Kerjasama dengan pelaku ekonomi ditingkatkan melalui pemberdayaan potensi ekonomi yang sudah ada dengan proyeksi pengembangan jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Peningkatan kerjasama dengan pelaku ekonomi diarahkan untuk memberikan nilai tambah kepada produksi lokal, dalam rangka mendorong terbangunnya budaya investasi bagi orang asli Papua. Peningkatan ketahanan daerah bertujuan untuk membangun partisipasi aktif masyarakat Papua dalam mengatasi berbagai kesulitan hidup. Pengembangan fasilitas kemudahan merupakan kerjasama dengan semua pihak yang dapat memberikan terobosan bagi kebuntuan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, terutama dalam bidang yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan dasar (sandang, pangan dan perumahan).

5 (lima) strategi tersebut diterapkan oleh Korem 172/PWY dalam penanganan 5 isu pokok yang berkembang pada tahun 2020, yaitu pelurusan sejarah, tuntutan hak dasar, pelanggaran HAM, rasisme dan ancaman paguyuban nusantara (masyarakat pendatang/non OAP).

Penerapan strategi itu diarahkan untuk mengisolasi dan mematahkan isu yang disebar melalui berbagai media komunikasi (media cetak, elektronik, media maya dan mulut ke mulut), juga untuk menopang upaya mengantisipasi ancaman gerakan OPM yang akan dilakukan pada bulan Desember 2020, di mana ada tiga sentimen pokok yang akan diangkat yaitu peringatan hari kemerdekaan Papua (1 Desember 1961), penolakan kebijakan otsus lanjutan bagi Papua, dan pelaksanaan Pilkada serentak.

Penutup

Konflik di tanah Papua perlu direspons segera dengan langkah penyelesaian yang tepat, agar tidak menjadi semakin sulit diatasi. Memenangkan konflik Papua pada hakekatnya adalah memenangkan generasi, mengingat pengaruh dari semakin meningkatnya kualitas SDM akan membuat konflik menjadi semakin rumit, karena sentimen Papua merdeka akan berkembang seiring dengan perkembangan cara berpikir masyarakat Papua.

Peran Korem 172/PWY sebagai salah satu unsur yang bersentuhan langsung dengan konflik di tanah Papua, perlu terus ditingkatkan secara dinamis mengikuti perkembangan dinamika konflik Papua, agar semakin mampu melakukan pembinaan teritorial sebagai katalisator penyelesaian konflik di tanah Papua. Namun peran Korem 172/PWY memerlukan *support* dari peran unsur lainnya, dalam bentuk sinergitas yang saling mendukung dalam satu konsep penanganan konflik Papua.

MENILIK “DAPUR” KOPASSUS DI ERA *NEW NORMAL*

Oleh: Brigjen TNI Thevi A. Zebua, S.E.
(Danpusdiklatpassus)



Komando Pasukan Khusus (Kopassus) yang merupakan Komando Utama (KOTAMA) Pembinaan TNI AD dan KOTAMA Operasi TNI, sebagai tentara kelas dunia atau *world class army* mengharuskan Kopassus bisa merespons dengan cepat apa yang menjadi petunjuk pimpinan TNI maupun TNI AD.

Kopassus selain memiliki tugas pokok strategis melakukan operasi khusus di berbagai daerah dan medan pertempuran, Kopassus juga memiliki tugas penting dalam mencetak prajurit-prajurit TNI AD yang nantinya akan menjadi penerus dan penyambung tongkat estafet dari pendahulu yang sudah mengukir namanya di Indonesia dan dunia sebagai tentara nomor wahid, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) sebagai dapurnya Kopassus yang menyelenggarakan pendidikan dan latihan tempur berisiko tinggi, memiliki peran penting dalam membentuk para serdik untuk dapat meningkatkan dan mengembangkan kemampuannya dalam mendukung dan menghadapi tugas operasi.

Pusdiklatpassus dibentuk pada tahun 1959 oleh Moh. Idjon Djanbi dengan nama asli Rokus Bernardus Visser sebagai mantan anggota *Korps Speciale Troepen* KNIL sebagai pelatih pertama. Pusdiklatpassus tidak hanya melatih dan mendidik prajurit Kopassus saja, namun satuan lain di luar kopassus juga dididik dan dilatih di lembaga ini dengan menerapkan latihan yang adaptif sesuai dengan perkembangan zaman tanpa harus mengurangi kualitas keluaran pendidikan.

Koki yang ada di Pusdiklatpassus sudah teruji dan memiliki pengalaman perang mulai dari Operasi Timor-timur, Papua, Aceh, bahkan luar negeri sekalipun, yang dipimpin langsung oleh Brigadir Jenderal TNI Thevi A. Zebua, S.E sebagai Danpusdiklatpassus.

Nelson Mandela: “EDUCATION IS THE MOST POWERFULL WEAPON WHICH YOU CAN USE TO CHANGE THE WORLD”

Meninjau sejarah Pusdiklatpassus dari waktu ke waktu, khususnya di tahun 2020 ini, seperti yang kita ketahui bersama bahwa pengaruh suatu perubahan kehidupan dengan adanya pemunculan virus yaitu Corona. Corona melahirkan penyakit yang kita kenal sebagai Covid-19, dengan gejala menyerang organ pernapasan.

Pandemi virus Corona telah merenggut nyawa lebih dari 1 juta orang dan menginfeksi lebih dari 33 juta orang di seluruh dunia. Infeksi virus jenis baru, SARS-CoV-2 memberi dampak yang luar biasa, terutama pada kesehatan masyarakat dunia. *New Normal* atau keadaan normal baru adalah suatu tatanan kehidupan baru yang mengharuskan perubahan kebiasaan untuk tetap melakukan aktivitas normal dengan penerapan protokol Covid-19 guna mencegah terjadinya penularan.

Dengan diberlakukannya kebijakan *New Normal* oleh pemerintah Indonesia termasuk jajaran TNI, khususnya di Jajaran TNI AD, Kasad telah menerapkan pola kinerja di seluruh satuan yang meliputi satuan tempur, kewilayahan maupun lembaga pendidikan melalui ST Kasad Nomor ST/1733/2020 tanggal 8 Juli 2020 tentang pelaksanaan garopsdik sesuai tatanan normal baru. Hal ini diberlakukan, tentunya untuk membantu program pemerintah agar seluruh komponen bangsa khususnya prajurit TNI AD tetap dapat melaksanakan kinerjanya secara produktif dan aman terhadap penularan Covid-19. Penyebarannya sudah semakin meluas, dengan jumlah kasus yang semakin bertambah setiap harinya, yang hingga saat ini belum ditemukan obat atau vaksinya.

Ki Hajar Dewantara: “DENGAN ILMU KITA MENUJU KEMULIAAN”

Menghadapi masa pandemi dan penanganan Covid-19 perlunya gerakan dan kerjasama yang dilakukan secara benar dan komprehensif baik dari pemerintah, masyarakat, maupun TNI/POLRI guna mengurangi penyebaran dan penularan virus yang terjadi.

Jajaran TNI POLRI sendiri tahun 2020 melihat data dan fakta, beberapa lembaga pendidikan TNI maupun POLRI mengalami penularan wabah Covid-19 yang menyebabkan muncul adanya klaster baru, yaitu di Sekolah Calon Perwira TNI Angkatan Darat (Secapa AD) di Bandung, didapatkan keseluruhan yang positif dari klaster ini sebanyak 1.262 orang.

Sekolah Polisi Negara (SPN) di Sukabumi sebanyak 300 siswa Sekolah Pembentukan Perwira (Setukpa) Lemdikpol Polri di Kota Sukabumi, Jawa Barat, dinyatakan positif setelah menjalani *rapid test*. Hal inilah yang membuat Pusdiklatpassus berupaya mencegah agar penyebaran virus Corona tersebut tidak terjadi, baik di lingkungan prajurit dan keluarga maupun para serdik.

Kasad, Jenderal TNI Andika Perkasa: “SEGALA KESIAPAN PEMBUKAAN PENDIDIKAN MILITER AKAN SELALU DIPANTAU, BAIK PENERAPAN PROTOKOL KESEHATAN SERTA PENANGANAN PARA SISWA YANG POSITIF COVID-19”.

Hal tersebut di atas merupakan penekanan yang selalu diulas secara berulang oleh Danjen Kopassus, Mayjen TNI Mohamad Hasan khususnya kepada lembaga Pusdiklatpassus yang mana saat



ini memiliki 6 (enam) sekolah yang menjalankan semua program pendidikan dan latihan, yaitu terdiri dari Sekolah Komando, Sekolah Para, Sekolah Sandi Yudha, Sekolah Spesialisasi, Sekolah Pertempuran Khusus, dan Sekolah Raider.

Sekolah-sekolah menyelenggarakan pendidikan yang rata-rata berisiko tinggi dan sebagian besar dilakukan di lapangan dan tidak menggunakan metode virtual. Hal ini sangat riskan jika dihadapkan dengan perkembangan di masa Pandemi Covid-19, perlu adanya suatu inovasi dari setiap Komandan Sekolah untuk secara kreatif mendesain program pendidikan agar dapat mencetak hasil didik yang baik dengan tidak mengurangi jumlah materi, jadwal pendidikan, mekanisme kegiatan dan terutama kualitas keluaran pendidikan.

Beranjak usia ke 61(enam puluh satu) tahun Pusdiklatpassus, mulai sejak dibentuk sampai sekarang, belum pernah terjadi wabah yang secara besar-besaran melanda Indonesia termasuk institusi militer kecuali Covid-19.

Menindaklanjuti pola *New Normal*, maka perlu diterapkan adanya beberapa prosedur tetap guna menjamin keamanan dan kelancaran aktivitas yang dilakukan di lingkungan Pusdiklatpassus untuk mencegah penularan virus, dengan selalu memberikan arahan dan pemahaman secara komprehensif dan rutin kepada seluruh Gadik dan Gapendik beserta keluarganya tentang pemberlakuan *New Normal*, termasuk para calon serdik yang akan melaksanakan pendidikan. Hal ini perlu menjadi penekanan yang cukup penting agar mereka dalam menjalankan setiap aktivitas kesehariannya tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah ditetapkan.

Penerapan Protokol Kesehatan yang selama ini sudah dilaksanakan oleh Pusdiklatpassus

dalam menghadapi Pandemi Covid-19 adalah saat: Melakukan pemeriksaan kesehatan awal para caserdik yang masuk ke lembaga pendidikan Pusdiklatpassus sesuai prosedur protokol Covid-19 yang telah ditetapkan, seperti wajib menggunakan masker, mencuci tangan baik menggunakan sabun maupun *handsanitizer*, menjaga jarak serta wajib melaksanakan pembersihan saat selesai kegiatan baik itu serdiknya maupun perlengkapannya.

Mewajibkan serdik untuk turut menyesuaikan keadaan *New Normal* dan mematuhi protokol kesehatan di masa Pandemi Covid-19 yang telah ditetapkan oleh pemerintah maupun lembaga, serta melakukan isolasi mandiri di masing-masing sekolah, sehingga tidak ada peserta didik yang diizinkan untuk berinteraksi dengan orang luar. Terkecuali apabila ada mekanisme pendidikan yang mengharuskan untuk berinteraksi di luar maka harus tetap berpedoman pada protokol pencegahan Covid-19 dengan pengawasan dari pihak sekolah.

Menyediakan fasilitas belajar dan tempat-tempat cuci tangan yang disesuaikan dengan prosedur pencegahan Covid-19, memanfaatkan fasilitas pangkalan yang dimiliki seperti halnya rahlat Situ Lembang, Citatah, dan Ksatrian Amirul Isnaini Cilacap.

Memanfaatkan program pendidikan dan latihan yang ada untuk menambah imunitas tubuh para serdik dengan cara berjemur dan melakukan pembinaan fisik di bawah sinar matahari, sehingga kondisi fisik dan imun tubuh para serdik selalu terjaga dengan baik. Menyediakan fasilitas olah raga, ruang rekreasi dan kantin yang ada di

masing-masing Sekolah sesuai tatanan *New Normal*. Menerapkan pola hidup sehat kepada seluruh Gadik, Gapendik, dan Serdik dengan tetap melakukan pembinaan fisik atau olah raga, makan makanan bergizi, minum vitamin dan berlaku jujur apabila kondisi pribadi dirasakan kurang sehat atau sakit untuk melaporkan ke tenaga kesehatan, sehingga penanganan dapat dilakukan dengan cepat dan tepat.

Mengalir dari upaya yang telah dilaksanakan Pusdiklatpassus di atas, salah satu keberhasilan pelaksanaan protokol kesehatan saat pendidikan di Pusdiklatpassus yaitu Pendidikan Prajurit Komando selama 7 bulan dengan kelulusan 100%, dapat berjalan dalam keadaan aman dan lancar, dan tidak satu pun ditemukan personel yang terinfeksi Covid-19 baik pelatih maupun serdik.

Meskipun hampir semua kegiatannya dilakukan di luar Kesatrian, terutama saat memasuki tahap Hutan Gunung (2 bulan) di wilayah Situlembang, Cisarua, Citatah, serta pelaksanaan *Longmars* selama 10 hari rute Batujajar–Cilacap dan tahap rawa laut (1 bulan) yang dilaksanakan wilayah Cilacap dan Nusakambangan kompleks. Hal ini juga diterapkan di 5 sekolah lain.

Melihat dari kegiatan program pendidikan dan latihan yang diselenggarakan di Pusdiklatpassus cukup padat, tentunya jumlah personel serdik yang turut serta dalam pendidikan tersebut juga cukup banyak, apalagi sebagian besar berdatangan dari luar daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut guna mendukung proses pendidikan dan latihan agar dapat berjalan efektif dan efisien serta tidak mengurangi kualitas





tujuan dan sasaran dari pendidikan, maka perlu adanya langkah nyata serta inovasi baru dari Pusdiklatpassus di era *New Normal* ini, dalam mendesain mekanisme kegiatan yang akan dilaksanakan, antara lain: 1) Membentuk CORONA ZONE, dengan pembuatan klaster dalam masa isolasi peserta didik dan latihan yang baru masuk ke Pusdiklatpassus dipisahkan menurut asal daerah serdik/serlat tersebut.

2) Implementasi atau penerapan tatanan kehidupan baru pada giat operasional pendidikan dan latihan yang berjalan di Pusdiklatpassus, dilaksanakan secara *IMPRESSIVE SYSTEM* yaitu dengan tetap melaksanakan kegiatan praktek teknis tetapi dengan menggunakan kelas-kelas lapangan kecil. 3) *START LESSON CLASS* yaitu pemberian materi yang bersifat teori atau pengetahuan diberikan di awal pelaksanaan pendidikan dan latihan sehingga 14 hari awal masa pendidikan/latihan dapat berjalan dengan baik dengan tetap mengedepankan kualitas keluaran pendidikan dan latihan nantinya tetap bagus.

4) *TRAINER SHIFT SYSTEM* yaitu pengaturan mekanisme kepelatihan saat pelajaran praktek, sehingga pelatih tetap terjaga imunitasnya saat melatih. 5) *REDUCE PHYSICAL CONTACT SYSTEM* yaitu pembatasan kegiatan pesiar yang

dilaksanakan di tempat saja. Namun demikian, fasilitas untuk memenuhi hal tersebut disediakan oleh sekolah seperti diberikan HP saat jam pesiar terkecuali pendidikan yang bersifat pembentukan seperti halnya pendidikan Komando dan pendidikan Raider. Hal ini dilakukan agar mengurangi interaksi serdik dengan masyarakat luar. 6) Menentukan dan memetakan daerah-daerah latihan yang masuk dalam zona hijau dan kuning untuk digunakan dalam penyelenggaraan latihan, dan selanjutnya menentukan tempat-tempat yang akan disinggahi harus terbebas dari kerumunan masyarakat setempat guna mengantisipasi adanya penularan virus (*safe house*), sehingga pelaksanaan program pendidikan yang dijalankan dapat berjalan efektif, efisien, dan aman serta terhindar dari penularan Covid-19.

Demikianlah sekelumit tentang bagaimana Pusdiklatpassus berjuang menghadapi masa Pandemi Covid-19 ini dengan penerapan tata kehidupan baru *New Normal*. Pusdiklatpassus Kopassus yang merupakan dapurnya Kopassus tetap dituntut untuk konsisten dalam melahirkan prajurit yang mahir dan handal sehingga keluaran pendidikan dan latihan tetap memiliki kualitas yang tinggi, karena pada dasarnya Pusdiklatpassus Kopassus bekerja dengan prinsip “KEHORMATAN SEBAGAI DASAR”.

PERANG ASIMETRIS DAN TANTANGANNYA BAGI KORPS ARMED

Oleh: Brigjen TNI M. Naudi Nurdika, S.I.P., M.Si.
(DANPUSDIKARMED)



Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sedemikian pesatnya telah membawa perubahan dalam sistem pertahanan negara-negara di dunia, di samping karakteristik peperangan yang juga terus mengalami pengembangan. Menurut William Lind, ada lima tingkatan generasi perang yang dapat dibedakan menjadi; “*first generation, second generation, third generation, fourth generation* dan *fifth generation war* (Lind, 1989: 22).¹

Saat ini kita sedang memasuki era perang generasi kelima yang didominasi oleh penggunaan teknologi super canggih di mana berdampak pada berubahnya strategi untuk memenuhi kepentingan nasional negara-negara di dunia. Strategi tersebut dapat melibatkan aktor negara (*state actor*) maupun aktor non negara (*non state actor*).

Perubahan strategi ini juga berdampak pada terjadinya perubahan bentuk dan sifat ancaman di tingkat nasional, kawasan, maupun internasional yang semakin modern, multi dimensi, dan bersifat sangat kompleks. Bentuk dan sifat ancaman saat ini lebih mengedepankan bentuk perang dengan pola gaya baru yang lebih *soft power* di mana dalam praktek operasionalnya cenderung tanpa kekerasan dengan tujuan untuk menghancurkan nasionalisme dan ideologi suatu negara yang disebut dengan Perang Asimetris (*Asymmetric Warfare*).

Permasalahan yang timbul saat ini, perang asimetris ternyata tidak hanya dihadapi oleh negara maju saja melainkan harus dihadapi oleh negara berkembang termasuk Indonesia baik dalam bentuk ancaman *non state actor* maupun separatis yang menggunakan pola asimetrisnya. Menyikapi hal tersebut timbul pertanyaan, sudah siapkah TNI AD? Bagaimana kemampuan, strategi dan taktik khususnya Korps Armed dalam menghadapi perang Asimetris?



► GENERASI PERANG I S.D V

1. Angga Nurdin Rachmat, “Tantangan dan Peluang Perkembangan Teknologi Pertahanan Global Bagi Pembangunan Kekuatan Pertahanan Indonesia”.

Dewan Riset Nasional (DRN) mendefinisikan Perang asimetris adalah suatu model peperangan yang dikembangkan dari cara berpikir yang tidak lazim dan di luar aturan peperangan yang berlaku, dengan spektrum perang yang sangat luas dan mencakup aspek-aspek astagatra (perpaduan antara trigatra yaitu geografi, demografi, dan sumber daya alam serta pancagatra yaitu ideologi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya). Perang asimetris selalu melibatkan peperangan antara dua aktor atau lebih, dengan ciri menonjol dari kekuatan yang tidak seimbang.²

Presiden Amerika ke-35 John F. Kennedy menyatakan Perang asimetris adalah jenis perang lain, baru dalam intensitasnya, kuno dari asalnya, merupakan perang oleh gerilyawan, subversif, pemberontak, pembunuh, perang oleh penyergapan bukan oleh pertempuran, dengan infiltrasi, bukannya agresi, mencari kemenangan dengan mengikis dan melelahkan musuh bukannya melibatkan dia. Perang ini menciptakan kerusuhan ekonomi dan konflik etnis³

Sedangkan menurut *Global Future Institute* (GFI), perang asimetris merupakan metode

peperangan gaya baru secara nirmiliter namun daya hancurnya tidak kalah bahkan dampaknya lebih dahsyat daripada perang militer. Ia memiliki medan atau lapangan tempur luas meliputi segala aspek kehidupan (astagatra).

Perang asimetris dapat berupa skema penjajahan gaya baru, di mana dalam mencapai kepentingan geostrategi dan geopolitiknya, suatu negara berperan sebagai pihak ketiga (*Proxy War*) tidak terlibat secara langsung tetapi melakukan aksi di belakang layar dengan mengatasnamakan isu HAM dan kebebasan serta melakukan perang informasi yang merusak ideologi generasi muda. Di mana penggunaan *soft power* dalam perang asimetris hanyalah *starting point*, apabila tidak terlaksana maka operasi selanjutnya akan menggunakan *hard power*, seperti yang terjadi pada perang di Libya,⁴ serta perang di Irak di mana pada awalnya diterapkan perang asimetris, kemudian dilanjutkan dengan perang terbuka dengan isu senjata pemusnah masal. Indonesia sesungguhnya telah menjadi sasaran perang asimetris. Penyebaran berita, acara, dan pentas-pentas yang merusak mental SDM dan budaya



➤ MLRS ASTROS II MK 6

2. The Global Review, "mengenal Perang Asimetris" diakses dari <https://theglobal-review.com/mengenal-perang-asimetris-sifat-bentuk-pola-dan-sumber/>, pada tanggal 29 September 2020 pukul 13.30
3. Presiden John F. Kennedy, Pidato Kelulusan Akademi Militer Amerika Serikat, West Point, N.Y., 6 Juni, 1962
4. Maulida Fadhila, "Perang Asimetris" diakses dari <https://www.obsessionnews.com/perang-asimetris/>, pada tanggal 30 September 2020 pukul 10.00
5. Garuda Militer, "Seminar menghadapi Peran Asimetris" diakses dari <http://garudamiliter.blogspot.com/2012/06/seminar-menghadapi-perang-asimetris.html?m=1>, pada tanggal 30 September 2020 pukul 11.00



► RADAR ARTILERI DAN UAV

bangsa Indonesia⁵ serta munculnya aksi terorisme dan KKB di Papua merupakan contoh nyata adanya perang asimetris di Indonesia.

Kemampuan, Strategi, dan Taktik

Dalam perang konvensional, kekuatan musuh mudah sekali diperkirakan kuantitas maupun kualitasnya, misalkan tentang kekuatan komando dan pengendaliannya. Sehingga strategi yang hendak digunakan relatif mudah dipelajari dan dibaca, sehingga dapat digunakan untuk dasar-dasar mengantisipasinya. Namun dalam perang asimetris sangat sulit bagi kita memprediksi kekuatan musuh, secara kuantitas maupun kualitas.

Menghadapi ancaman perang asimetris perlu adanya strategi yang tepat. Perumusan strategi antara pertahanan militer dan nirmiliter harus dilaksanakan secara seimbang dan menyeluruh, sehingga memperkecil kemungkinan adanya kesalahan atau kegagalan. Konsep strategi dalam menghadapi ancaman nirmiliter berupa sinkronisasi dari seluruh komponen bangsa, baik pemerintah maupun sipil, yaitu untuk menciptakan sistem yang tepat dalam menghadapi ancaman yang kompleks. Sedangkan untuk mengantisipasi perang konvensional yang merupakan kelanjutan dari perang asimetris, dilakukan dengan mewujudkan postur TNI. Postur TNI adalah wujud penampilan TNI yang tercermin dari keterpaduan kekuatan, kemampuan dan gelar kekuatan TNI. Salah satu wujudnya adalah modernisasi alutsista. Termasuk di dalamnya modernisasi alutsista Korps Artileri Medan TNI AD.

Artileri Medan (Armed) merupakan salah satu kecabangan TNI AD berperan sebagai satuan bantuan tempur yang menyelenggarakan serangan artileri dan bantuan tembakan utama darat dan permukaan serta mengoordinasikan semua sarana bantuan tembakan yang terlibat dalam operasi guna memperbesar daya tembak satuan yang dibantu, selain perannya tersebut Armed melaksanakan fungsi-fungsi yang meliputi Penghancur dan Penetralisir Sasaran, Pemberantas Mortir dan Artileri Musuh, Pemberi Kedalaman Pertempuran, Pengoordinir Bantuan Tembakan, Pengukur Medan dan Cuaca, Pencari dan Penemu Sasaran, Pemberi Efek Cahaya Medan Operasi, Penimbul Efek Perang Urat Syaraf (PUS). Modernisasi alutsista Armed memberikan *deterrence effect* atau efek gentar terhadap negara lawan hal tersebut terwujud dengan adanya MLRS ASTROS II MK 6 yang memiliki efek kehancuran yang luas. Saat ini **kemampuan gelar** kekuatan Satuan Armed TNI AD terdiri dari 2 Resimen, 18 Batalyon dan 3 Raipur. Gelar satuan ini akan terus berkembang, sesuai dengan Renbanglarsat Armed, sampai dengan tahun 2029 gelar kekuatan satuan Armed TNI AD akan bertambah menjadi 4 Resimen, 27 Batalyon, dan 7 Raipur.

Menghadapi perang asimetris mengharuskan persenjataan Armed dapat beradaptasi dengan medan pertempuran yang mungkin akan dihadapi. Dapatnya pelibatan dan penggunaan untuk pertempuran di wilayah pemukiman/perkotaan (urban) maupun pertempuran jarak dekat seperti Operasi Lawan Insurgensi maupun pertempuran kota serta peningkatan akurasi (*high precision*)

untuk meminimalisasi kerugian non tempur (*collateral damage*), mengingat posisi insurjen yang menyatu dan berada di tengah-tengah masyarakat. Kemampuan tersebut terwujud dengan adanya Meriam 105 mm, Meriam 155 mm Caesar, dan Meriam 155 mm M109A4 BE yang dapat meluncurkan *smart munition* seperti *Excalibur*, PGK (*Precision Guided Kit*), *Bonus* dan *Fuse Spacido* dalam menghancurkan sasaran terpilih (*High Value Target*). Dalam melaksanakan operasi Alutsista ini dilengkapi dengan kesisteman yang memadai guna mencapai kemampuan intelijen yaitu penggunaan *Unmanned Aerial Vehicle* (UAV) dan radar sebagai media pengintaian yang lebih jauh, lebih luas, dan lebih teliti untuk mencari dan menemukan sasaran. Diterapkannya taktik *shoot and scoot*, yaitu taktik tembak dan gerak dalam operasi, adanya Meriam 155 mm Caesar yang memiliki kecepatan menembak dan berpindah kedudukan di bawah 1 menit, dengan *FAST-Hit computerized fire control system* (sistem komputer pengontrol tembakan), *muzzle velocity radar*, dan sistem navigasi dengan menggunakan GPS, taktik ini dapat digunakan dalam menghadapi insurjen yang tidak dapat diprediksi baik kedudukan, arah maupun gerakannya, sehingga insurjen tersebut dapat dengan cepat dinetralisir oleh tembakan Artileri Medan. Tembakan Armed dapat sebagai Penimbul Efek Perang Urat Syaraf (PUS). Tujuan utama peperangan psikologis adalah mengubah sikap publik atau lawan agar berkurang tingkat penentangan atau militansinya, tembakan senjata Artileri Medan memiliki daya ledak besar,

menimbulkan kerugian personel dan materiil yang besar di pihak lawan, kemampuan daya ledak tersebut memberikan efek psikologi kepada lawan di mana dapat menghancurkan mental bertempur dan hilangnya keinginan bertempur, sehingga penggunaan *hard power* sebagai kelanjutan dari perang asimetris dapat dihindari.

Kesimpulan

Perang asimetris memiliki bentuk dan sifat ancaman yang lebih mengedepankan bentuk perang dengan pola gaya baru yang lebih *soft power* di mana dalam praktek operasionalnya cenderung tanpa kekerasan dengan tujuan untuk menghancurkan nasionalisme dan ideologi suatu negara. Namun pada kenyataannya, perang asimetris disiapkan sebagai *starting point* sebelum penggunaan *hard power* yang merupakan bagian dari strategi menguasai Negara Indonesia. Guna menghadapi ancaman perang asimetris tersebut, TNI AD telah membangun postur pertahanan melalui modernisasi Alutsista, salah satunya dengan pembangunan kekuatan Korps Armed TNI AD.

Kesiapan Korps Armed TNI AD dalam menghadapi ancaman perang asimetris diwujudkan melalui peningkatan kekuatan, kemampuan dan gelar. Penerapan taktik sesuai dengan jenis alutsista antara lain taktik Gerilya/Lawan gerilya, taktik Pertempuran Kota dan taktik Serangan Artileri menjadi poin penting dalam keberhasilan pelaksanaan tugas pokok satuan Armed TNI AD.



➤ MERIAM 155 MM CAESAR

ANALISIS PEMBENTUKAN SATUAN PENERANGAN DI TINGKAT KODIM

Oleh: Kolonel Inf Drs. Mu'tamar, M.Sc.
(Sesdispenad)

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pada hakikatnya kepentingan nasional Indonesia adalah tetap tegaknya NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta terjaminnya kelancaran dan keamanan pembangunan nasional yang berkelanjutan. Kepentingan nasional tersebut diwujudkan dengan memerhatikan tiga kaidah pokok, yakni tata kehidupan, upaya pencapaian tujuan, serta sarana yang digunakan. Secara khusus, terkait sarana yang digunakan dalam mewujudkan tujuan nasional adalah seluruh potensi dan kekuatan nasional yang didayagunakan secara menyeluruh dan terpadu, salah satunya melalui upaya pertahanan negara. Strategi pertahanan Negara Indonesia selama ini diwujudkan melalui sistem pertahanan rakyat semesta, dimana dalam doktrin ini sangat memerlukan dukungan dari segenap sumber daya nasional (*Strategi Hanneg, 2014*). Dari sana lah amanat UU RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI, lahir pasal pemberdayaan wilayah pertahanan, TNI AD sebagai bagian integral dari TNI dituntut mampu mengelola potensi pertahanan beserta kekuatan pendukungnya di wilayah daratan. Agar dapat melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana tertuang dalam doktrin Kartika Eka Paksi, maka TNI AD menyelenggarakan berbagai fungsi, yang salah satu diantaranya adalah fungsi Penerangan TNI AD.

Fungsi Penerangan TNI AD memiliki kedudukan yang demikian penting dan strategis dalam mendukung keberhasilan pencapaian sasaran tugas pokok TNI AD. Sebab, baik dan buruknya citra TNI AD, secara signifikan dipengaruhi oleh penyelenggaraan fungsi Penerangan, meliputi pembinaan penerangan satuan, *penerangan media elektronik, penerangan cetak, penerangan media online, penulisan* strategis, serta produksi dan dokumentasi. Melalui fungsi inilah, Penerangan TNI Angkatan Darat pasti mampu memberikan, menyajikan dan membangun pemahaman yang terukur, terarah dan terprogram terkait berbagai kebijakan pimpinan kepada satuan jajaran TNI AD; mampu menyosialisasikan/menyebarkan/mewujudkan keseragaman visi dan misi pengabdian di tengah kehidupan masyarakat luas; mampu memberikan *counter* opini terhadap berbagai informasi yang manipulatif dan provokatif terhadap kebijakan pimpinan TNI AD dan atau informasi tentang TNI AD; serta mampu membangun opini publik yang konstruktif dalam rangka merebut simpati masyarakat yang muaranya akan memberikan daya dukung bagi keberhasilan tugas pokok TNI AD. Persoalan yang masih sering dihadapi adalah penangkalan terhadap berita bohong (hoaks) tentang TNI AD yang dapat merendahkan kredibilitas TNI AD. Namun sangat kita sadari, bahwa upaya untuk mengatasi hal tersebut, masih menghadapi berbagai kendala, sehingga pembentukan opini maupun kontra opini, serta penangkalan hoaks di lingkungan TNI AD juga belum dapat diwujudkan secara optimal. Salah satu faktor penyebabnya adalah masih rendahnya kualitas SDM dalam penguasaan fungsi teknis Penerangan dan masih terbatasnya gelar satuan Penerangan di jajaran TNI AD. Sebagaimana kita ketahui, bahwa satuan Penerangan di jajaran TNI AD saat ini hanya ada sampai tingkat Korem, sedangkan di tingkat Kodim yang dinamika kegiatan Binternya cukup padat dan dinamis belum ada (dibentuk).





► Kemampuan fotografi wajib dikuasai insan penerangan

Pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim, menjadi relevan guna menginformasikan secara cepat, tepat, dan akurat berbagai kegiatan Binter yang telah dilakukan selama ini, penangkalan hoaks dan sebagai upaya meningkatkan kemampuan personel Kodim dalam penguasaan fungsi teknis Penerangan. Apabila hal ini tidak disikapi dengan serius dan segera dicarikan solusi pemecahannya, maka ke depan pembangunan fungsi Penerangan dapat mengalami kendala yang berarti, karena tuntutan tugas yang semakin berat tidak didukung dengan penyiapan gelar satuan Penerangan yang memadai. Sebagai upaya untuk memenuhi harapan tersebut, maka perlu adanya pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim, sebagai ujung tombak dalam mendukung seluruh rangkaian kegiatan pembinaan teritorial serta melaksanakan *bombardemen informasi* secara komprehensif dan integratif yang dirancang sedemikian rupa mulai tingkat Kodim, Korem, Kodam, hingga tingkat TNI AD.

2. Rumusan Masalah. Berangkat dari latar belakang masalah tersebut di atas, maka rumusan masalah yang menjadi pokok kajian dalam tulisan ini adalah:

- a. Bagaimana agar fungsi Penerangan TNI AD dapat mengeliminasi berita hoaks tentang prajurit dan institusi TNI AD di wilayah?

- b. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemberitaan positif tentang Binter di tingkat Kodim dalam rangka membangun citra positif TNI AD?
- c. Apakah pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim saat ini merupakan langkah mendesak dan harus segera diwujudkan?

3. Tinjauan Pustaka.

Keberadaan satuan Penerangan TNI AD dalam konteks mendukung keberhasilan tugas pokok TNI AD secara umum akan sangat bersinggungan erat dengan dua fungsi Penerangan terkait isu-isu yang bersifat *external relations*. *Pertama*, Penerangan TNI AD bertujuan mendapatkan dan melipatgandakan kepercayaan serta dukungan dari masyarakat. *Kedua*, Satuan Penerangan secara profesional, obyektif dan bijak hendaknya berusaha untuk menjadi mediator dalam rangka "*mengadvokasi*" insitusi TNI AD dari berbagai opini negatif yang tidak wajar dari luar. Parameter yang digunakan untuk menilai keberhasilan tersebut adalah jika terbangun situasi *public understanding*, *public confidence*, *public supporting*, dan *public cooperation* secara nyata di lapangan, sehingga keberadaan institusi TNI AD dapat diterima oleh berbagai elemen masyarakat.

Menurut Sendjaja (1994) menyatakan fungsi komunikasi dalam organisasi adalah sebagai berikut: (1) Fungsi informatif, organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi; (2) Fungsi regulatif, yang berkaitan dengan peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi; (3) Fungsi persuasif, dalam mengatur suatu organisasi, kekuasaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah; dan (4) Fungsi integratif, setiap organisasi berusaha untuk menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat melaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik, sekaligus dapat mengintegrasikan kepentingan bawahan. Alfred Korzybski menyatakan bahwa kemampuan manusia berkomunikasi menjadikan mereka pengikat waktu (*time-binder*). Pengikatan waktu (*time binding*) merujuk pada kemampuan manusia untuk mewariskan pengetahuan dari generasi ke generasi dan dari budaya ke budaya.

Mendasarkan diri pada pemahaman teori dan kajian tentang komunikasi sebagaimana tersebut di atas, menjelaskan bahwa komunikasi merupakan unsur sangat penting bagi keberhasilan kegiatan Penerangan, terutama dengan terbentuknya *mutual understanding* atas berbagai isu yang berkembang di antara para partisipan (pihak-pihak yang terlibat dalam komunikasi, baik komunikator maupun komunikan). Dengan demikian, melalui kegiatan Penerangan yang dilakukan satuan Penerangan jajaran TNI AD secara terencana dan terukur, sangat diharapkan akan berhasil menepis berbagai berita palsu (hoaks) yang merugikan bagi pembentukan citra TNI AD.

a. **Penangkalan terhadap hoaks.** Permasalahan pemberitaan palsu atau hoaks kini sudah merambah di lingkungan TNI AD pada era globalisasi, dikarenakan perkembangan arus teknologi informasi yang bergerak sangat cepat dan dinamis telah mengubah tatanan berbagai aspek kehidupan manusia tanpa bisa dibendung lagi. Model kampanye *Leon Ostergaard* sebagai rangkaian aktivitas yang dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat (Venus, 2004: 7), serta langkah literasi media kepada prajurit/satuan

jajaran TNI AD, kiranya sangat penting guna mengakselerasi penangkalan hoaks di lingkungan prajurit/satuan TNI AD. Terkait hal tersebut, dipandang perlu adanya validasi organisasi di jajaran Penerangan, terutama perlunya pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim. Dengan pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim, dimaksudkan agar model kampanye *Leon Ostergaard* dan upaya literasi media secara menyeluruh dapat dilaksanakan dengan lebih optimal. Hal ini penting dalam rangka pembangunan publik opini dan kontra opini terhadap pemberitaan palsu tentang TNI AD dapat dilaksanakan sampai di ujung-ujung wilayah terpencil dan pinggiran yang juga sudah ditambah teknologi informasi seperti penggunaan internet.

b. **Pembangunan citra.** Menurut Soemirat dan Ardianto dalam bukunya *Dasar-Dasar Public Relations*, menjelaskan bahwa "*citra adalah kesan yang diperoleh seseorang berdasarkan pengetahuan dan pengertiannya tentang fakta-fakta atau kenyataan*" (2003:114). Agar dapat mengetahui citra seseorang terhadap suatu objek dapat terlihat dari sikapnya terhadap objek tersebut, citra (*image*) merupakan kesan, perasaan, gambaran dari publik terhadap sesuatu; kesan yang dengan sengaja diciptakan dari suatu objek, orang atau organisasi. Pada kajian



► Fotografer dalam pelaksanaan tugas liputan

tentang “**Pembentukan Penerangan di Tingkat Kodim dalam rangka Pembangunan Citra TNI AD**” ini, dalam meningkatkan citra organisasi, pengkaji menggunakan teori citra karena memiliki hubungan yang erat dengan pembentukan opini. Terdapat tiga unsur utama yang menjadi dasar teori pembentukan citra. Ketiga unsur tersebut antara lain stimulus, pengalaman, dan respons. Stimulus yang diberikan oleh komunikator, akan diproses terlebih dahulu melalui persepsi, motivasi, sikap dan kognisi atau pengalaman dari komunikan itu sendiri, yang akan menimbulkan respons berbeda pada setiap komunikan.

4. Dasar Pemikiran. Mengingat pentingnya peran Penerangan yang diimplementasikan melalui aspek komunikasi sosial di lingkungan TNI AD dalam menampung setiap aspirasi baik dari lingkungan internal TNI AD maupun masyarakat, maka TNI AD memerlukan suatu penajaman fungsi Penerangan TNI AD hingga tingkat Kodim. Dengan demikian, selain dapat mengeliminasi berita hoaks sampai wilayah perbatasan/terpencil/pinggiran, melalui satuan Penerangan tersebut dapat memberikan informasi yang benar dan akurat tentang berbagai kegiatan pembinaan teritorial satuan komando kewilayahan di daerah-daerah perbatasan/terpencil/pinggiran. Untuk itu, setiap prajurit yang mengawaknya juga dituntut dapat membangun komunikasi yang sehat dalam rangka mendukung kelancaran tugas pokok TNI AD. Kemampuan dalam mengawaki fungsi Penerangan, mestinya bukan saja harus dimiliki/dikuasai oleh Perwira Penerangan Angkatan Darat, namun dalam batas-batas tertentu seluruh prajurit TNI AD harus memiliki kemampuan dasar Penerangan.

ANALISIS

Dinas Penerangan Angkatan Darat (Dispenad) sebagai salah satu organisasi pelaksana TNI AD di tingkat pusat (Balakpus), mengemban tugas dan tanggung jawab menyelenggarakan fungsi Penerangan, baik kedalam maupun keluar organisasi Angkatan Darat, serta membentuk opini publik guna membangun dan memelihara citra positif dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD. Dengan demikian, Dispenad dan satuan jajaran Penerangan Angkatan Darat dituntut memiliki kemampuan komunikasi dalam rangka mentransformasikan kinerja TNI AD kepada publik. Tugas dan tanggung jawab tersebut akan lebih dapat dioptimalkan jika kedepan mampu menangkal berbagai berita hoaks yang berkembang secara efektif, serta berhasil menyebarkan secara

serentak berbagai kegiatan pembinaan teritorial yang dilakukan satuan kewilayahan di berbagai wilayah.

5. Penangkalan terhadap berita hoaks.

Di abad ke-21 ini, fenomena internet menjadi sangat marak, dan banyak hal yang menyangkut kepentingan hidup manusia berubah dari cara konvensional menjadi modern seperti online. Hal ini berlaku juga dalam komunikasi dan penyebaran informasi melalui dunia maya. Sebelum memasuki era internet, pemberitaan hanya dapat diakses melalui TV, radio atau media cetak melalui koran dan majalah. Namun, kini segala jenis berita dapat diakses secara mudah dan cepat melalui *website*, media sosial, atau portal berita online lainnya. Dalam era internet, semua individu dapat menjadi seorang *publisher* yang memproduksi informasi, menyusun berita dan menyebarkannya. Hal tersebut terbukti dari meningkatnya nominal individu yang diamankan kepolisian Indonesia karena menyusun dan menyebarkan berita hoaks.

Sebagaimana kita ketahui, bahwa sisi positif yang muncul dengan pesatnya perkembangan teknologi dan informasi (seperti halnya internet) adalah segala jenis informasi dapat diperoleh secara cepat dan mudah. Namun, sisi negatif timbul saat kemudahan di atas dimanfaatkan oleh oknum tidak bertanggung jawab yang menyusun dan menyebarkan berita tidak benar (hoaks), dengan motif yang variatif seperti politik, SARA, ekonomi, modus penipuan, bahkan sampai menanamkan pola pikir negatif secara psikologis kepada netizen (masyarakat pengguna internet). Menurut survei yang dilakukan Depkominfo pada tahun 2016, terdapat 800.000 situs penyebar hoaks, dan 76% di antaranya memiliki motif politik dan SARA. Ketua Masyarakat Anti Hoaks Indonesia, Septiaji Eko Nugroho (2018) dalam suatu wawancara mengungkapkan cepatnya penyebaran informasi, sayangnya tidak diimbangi dengan sikap kritis terhadap berita itu sendiri.

Dalam era internet ini, masyarakat dengan sangat mudah mengakses informasi, namun tidak disertai dengan kesadaran literasi media yang cukup, sehingga terjadi budaya menyebarkan informasi yang belum tentu valid dan faktual. Berkembangnya berita hoaks, juga seringkali berlangsung di lingkungan prajurit/satuan TNI AD, yang bukan saja dapat berdampak buruk bagi pembangunan citra TNI AD saat ini dan ke depan, sekaligus dapat mendorong para prajurit untuk bergerak secara serentak melakukan hal yang melanggar kode etik keprajuritan dan ketentuan lainnya yang berlaku bagi prajurit. Contoh

konkritnya adalah terkait penyerangan oleh oknum prajurit terhadap Polsek Ciracas akibat berita hoaks beberapa waktu yang lalu. Oleh karena itu, untuk menghindari kejadian yang sama terulang lagi, ke depan diperlukan sebuah perancangan kampanye sosial dan literasi media pada netizen (di lingkungan prajurit/satuan TNI AD) di berbagai wilayah secara serentak, terpadu, terprogram dan berkelanjutan, dengan harapan penyebaran hoaks dapat diminimalisasi, tercipta arus komunikasi yang kondusif dan kredibel di lingkungan prajurit/satuan TNI AD.

Perancangan kampanye dilakukan dalam beberapa tahap. Pada tahap pertama dilakukan pengumpulan data melalui wawancara, studi banding, studi literatur dan kuesioner. Pada tahap kedua dilakukan analisis terhadap data tersebut, dan pada tahap ketiga disusun konsep perancangan yang meliputi konsep komunikasi, konsep kreatif, dan konsep media. Adapun studi pustaka yang mendukung perancangan ini adalah model kampanye Leon *Ostergaard* yang merupakan rangkaian aktivitas dilakukan secara sistematis dan terorganisasi dalam kurun waktu tertentu, dengan tujuan untuk mendorong perubahan perilaku dan pola pikir masyarakat (Venus, 2004: 7). Model kampanye yang diterapkan sebagai upaya komunikasi agar pesan kampanye dapat tersalur dengan baik ini, dibagi menjadi tiga tahapan periode waktu pelaksanaan, yaitu *awareness*, *informing*, dan *reminding*. Tahap awal yaitu *awareness* dilakukan untuk menarik perhatian netizen tentang adanya isu yang menjadi fokus utama kampanye, kemudian tahap selanjutnya adalah *informing* untuk memberikan informasi secara detail tentang pesan kampanye, sehingga diharapkan akan menimbulkan minat dan kesadaran akan tujuan utama kampanye. Tahap akhir adalah *reminding* yang bertujuan mengingatkan kembali netizen di lingkungan TNI AD mengenai pesan-pesan komunikasi yang telah disampaikan pada dua tahapan sebelumnya, dengan harapan terjadi perubahan perilaku dan pola pikir yang berkelanjutan.

Langkah selanjutnya adalah gerakan literasi media di lingkungan prajurit/satuan TNI AD dengan terukur. Literasi media dibagi menjadi tiga kategori berdasarkan tingkat kemampuan kecakapan seseorang, yaitu literasi media tingkat awal berupa pengenalan media, terutama potensi efek negatif dan positif yang dapat ditimbulkan oleh media tersebut. Literasi media tingkat menengah yang bertujuan menumbuhkan kepekaan dan kecakapan dalam memahami konten pada sebuah

media. Literasi media tingkat lanjut, pada tahap ini mulai terbangun kemampuan memberi kritik dan saran terhadap sebuah media yang terbukti secara konkrit melanggar aturan komunikasi sosial (Purba, 2015).

Mencermati analisis tersebut di atas, terutama dalam rangka melakukan upaya pencegahan terhadap berita hoaks yang sering berkembang di lingkungan prajurit dan satuan jajaran TNI AD, kiranya model kampanye *Leon Ostergaard* dan upaya literasi media di lingkungan prajurit/satuan jajaran TNI AD merupakan langkah tepat, cerdas dan bertanggung jawab guna mengubah sikap dan perilaku agar dapat lebih bijak dalam menerima setiap informasi melalui media apapun, khususnya melalui internet. Sebuah rancangan model kampanye dan gerakan literasi media akan dapat berjalan dengan lancar, terukur, terprogram dan berkesinambungan bagi prajurit di seluruh satuan jajaran TNI AD yang tersebar hingga pelosok wilayah, hanya jika satuan Penerangan sudah dapat melaksanakan fungsinya dengan baik karena didukung oleh gelar satuan Penerangan hingga satuan kewilayahan terdepan (tingkat Kodim). Berangkat dari alasan akademis tersebut, maka **pembentukan satuan Penerangan di tingkat Kodim (penerangan Kodim)** merupakan langkah mendesak.

6. Peningkatan berita positif tentang Binter.

Meskipun perkiraan ancaman menunjukkan bahwa ancaman kedaulatan kecil kemungkinan, namun sebagai negara yang merdeka, berdaulat dan bermartabat, kepentingan strategis untuk mempertahankan diri harus selalu disiapkan dan dilaksanakan tanpa memandang ada atau tidak adanya ancaman secara nyata. Sementara itu, berbanding paralel dengan perubahan politik dunia yang terjadi di era globalisasi, telah menghadirkan suatu ancaman bersifat yang semakin kompleks, diantaranya adalah berkembangnya ancaman asimetris sebagaimana yang juga tumbuh subur di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Guna mengatasi hal tersebut, keterlibatan prajurit/satuan TNI AD, khususnya Apkowil dan Satkowil akan sangat efektif apabila dimulai melalui pengembangan langkah preventif, misalnya dengan menggelorakan kembali semangat nasionalisme, meningkatkan kesejahteraan rakyat, dan lain sebagainya. Pada prinsipnya selama ini Satuan Komando Kewilayahan jajaran TNI AD telah melaksanakan melalui program pembinaan teritorial (Binter) baik sasaran fisik maupun non fisik, seperti TMMD, Karya Bakti, RTLH (Rumah Tidak

Layak Huni), penyuluhan hukum, Narkoba, bahaya komunisme/radikalisme lain dan sebagainya, dimana melalui program tersebut muaranya akan dapat mempersempit ruang gerak setiap ancaman yang mungkin berkembang di wilayah.

Persoalan selanjutnya pada penyelenggaraan program Binter tersebut, selain masih mengalami kendala juga belum tersosialisasi secara luas di tengah masyarakat yang salah satunya disebabkan keterbatasan publikasi. Dalam penyelenggaraan program Binter yang semestinya dapat diintegrasikan dengan program Pemda maupun dinas-dinas terkait, sampai saat ini cenderung bertumpu pada *personal aproach* Aparat Kowil kepada Pemda atau instansi terkait lain, dan belum karena *systemic approach*, dengan alasan memadukan program. Hal tersebut mengindikasikan besarnya ketergantungan program Kowil terhadap bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah setempat maupun instansi terkait lainnya, yang semestinya tidak boleh terjadi.

Ketergantungan ini akan dapat diatasi dengan pengembangan sistem Binter yang tepat dan terukur, sehingga dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Belum tersistemasi program Binter tersebut, selain berpengaruh terhadap pencapaian hasil capaian Binter juga berdampak kurang tersosialisasinya secara luas capaian Binter yang telah dilakukan prajurit/satuan TNI AD.

Pengembangan Binter secara sistemik (*systemic approach*) harus segera dibangun dengan melibatkan berbagai unsur/komponen, yang salah satunya adalah unsur fungsi Penerangan di tingkat Kodim, agar secara sistemik hasil capaian Binter dapat lebih optimal dan sosialisasi/publikasi terhadap kegiatan tersebut juga cukup representatif dalam rangka pembangunan citra TNI AD. Namun sebagaimana diketahui, bahwa unsur satuan Penerangan di tingkat Kodim hingga saat ini belum terbentuk, sehingga publikasi kegiatan Binter tingkat Kodim masih bersandar kepada Penerangan Korem/Kodam atau upaya para Dandim sendiri dalam menggali unsur media yang ada di wilayah. Mencermati hal tersebut di atas, dalam rangka membangun sistem Binter yang terintegrasi secara utuh, dipandang perlu dibentuk **satuan Penerangan tingkat Kodim (Pendim)**.

7. Pembentukan satuan penerangan di tingkat Kodim.

Sebagaimana amanat Undang-Undang RI No. 34 tahun 2004 tentang TNI, serta untuk mewujudkan eksistensi Binter sebagai salah satu fungsi utama TNI AD, maka dipandang perlu untuk mengaktifkan peran Komando Kewilayahan (Kowil), yang antara lain adalah dengan senantiasa meningkatkan ketanggapsegeraan dan kepekaan terhadap perkembangan situasi maupun aspirasi, serta kesulitan warga masyarakat sekitar. Guna



➤ Suasana taping video buletin TNI AD di lapangan



► Editing foto dan video

memantapkan pembinaan kewilayahan melalui Binter, Apkowil/Satkowil diharapkan dapat menjalin sinergitas dengan instansi/aparat lain di daerah, seperti Polri, Pemerintah Daerah maupun komponen masyarakat lainnya. Pola *tripartit* (Pemda, Satkowil dan Polri) harus benar-benar dapat diwujudkan dalam setiap pelaksanaan tugas di lapangan dengan tetap memedomani ketentuan yang ada. Justru karena itulah, untuk mengoptimalkan Binter, ke depan benar-benar diperlukan penataan Binter secara sistemik (*systemic approach*), khususnya di satuan operasional tingkat Kodim.

Penyelenggaraan Binter di satuan operasional tingkat Kodim harus mendapatkan penguatan, penajaman, penilaian, pengukuran berdasarkan kinerja pembinaan berikut perangkat lainnya, sehingga Binter juga merupakan bagian dari penyelenggaraan pertahanan negara yang dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien, serta menjamin tertibnya tata kelola penyelenggaraan pertahanan nirmiliter dan militer yang dapat terpublikasikan secara masif di tengah-tengah masyarakat. Publikasi kegiatan Binter sangat penting, bukan saja dalam rangka merebut simpati warga masyarakat luas agar dapat memantapkan kemanunggalan TNI – Rakyat, sekaligus dalam rangka mengimbangi berkembangnya berita hoaks tentang TNI AD yang sering dihembuskan pihak tertentu. Dengan demikian, penataan Binter di satuan operasional

tingkat Kodim benar-benar terukur dan sistemik melibatkan berbagai unsur, termasuk perlunya pembentukan satuan penerangan di tingkat Kodim. Melalui penataan Binter sebagaimana di atas, diharapkan capaian Binter akan semakin optimal dan dapat tersosialisasikan serta terpublikasikan secara luas di tengah-tengah masyarakat.

PENUTUP

Berangkat dari seluruh rangkaian analisis ini, dapat disimpulkan bahwa **pembentukan Satuan Penerangan di Tingkat Kodim** jajaran TNI AD sebagai bagian dari upaya membangun Binter secara sistemik, merupakan kebutuhan mendesak dan tidak dapat ditawar-tawar lagi untuk segera dibentuk agar pelaksanaan Binter kedepan dapat lebih terencana, terkonsep, dan terintegrasi, serta lebih tersosialisasi/terpublikasikan dengan baik. Berkenaan dengan hal tersebut di atas, disarankan kepada unsur pimpinan TNI AD kiranya berkenan untuk merumuskan secara komprehensif terkait perlunya **pembentukan Satuan Penerangan di Tingkat Kodim (Pendim)** jajaran TNI AD.

Demikian analisis singkat ini, penulis sangat menyadari masih banyak kekurangan dan perlu masukan dari berbagai pihak dalam rangka penyempurnaan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif sangat kami harapkan dari segenap pembaca.

TUGAS PENGAMANAN WILAYAH SEBAGAI KEWAJIBAN BERSAMA APARAT KOREM DAN KEPOLISIAN

Oleh: Kolonel Inf Asep Nugraha, S.E., M.Si
(Danrem 022/PT)



TNI merupakan alat negara yang bertugas menegakkan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara. Sedangkan Kepolisian Negara RI merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberi pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. (Undang-undang RI Nomor 2/2002 tentang Kepolisian RI). Walaupun peran, tugas pokok dan fungsi antara TNI dan Polri berbeda, namun pada kondisi tertentu TNI mempunyai tugas memberi bantuan kepada Polri. (Undang-undang RI Nomor 34/ 2004 tentang TNI, pasal 7 b poin 10).

Perubahan pada sistem pemerintahan nasional, secara langsung mempengaruhi dinamika pada sektor pertahanan dan keamanan, terutama karena perubahan tersebut berlangsung secara cepat dan tidak didasarkan pada satu *grand strategy* transformasi sistem nasional. Salah satu perkembangan yang memperlihatkan pengaruh tersebut terlihat dari pemisahan tugas dan fungsi TNI dan Polri di satu sisi, tetapi juga tetap membuka keterlibatan TNI dalam

domain yang diberikan kepada Polri yaitu menyangkut keamanan masyarakat. Walaupun TNI dan Polri kini memiliki perbedaan dalam lingkup tugasnya, namun dalam keadaan tertentu kedua institusi tersebut bekerjasama, yakni dalam hal tugas perbantuan kepada Polri. Berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 tentang TNI Pasal 7 ayat (2), disebutkan bahwa tugas pokok yang diemban TNI ada dua yaitu operasi militer untuk perang (OMP) dan operasi militer selain perang (OMSP), seperti penanggulangan terorisme, separatisme, bantuan kepada kepolisian dalam menjaga ketertiban masyarakat hingga penanggulangan bencana alam.

Sebagai satu dari tiga matra TNI, berdasarkan UU No. 34 tahun 2004 Pasal 8, salah satu tugas TNI AD adalah melaksanakan tugas TNI matra darat di bidang pertahanan. Salah satu tugas yang lain adalah memberdayakan wilayah pertahanan di darat. Ini berarti bahwa dalam rangka tugas OMP dan OMSP di darat, termasuk dalam hal ini menjaga keamanan masyarakat dalam kerangka keselamatan seluruh warga negara, juga merupakan tugas dan tanggung jawab TNI AD.

Pembahasan

Sebagai salah satu komando kewilayahan TNI AD, Korem 022/Pantai Timur sebagai pelaksana tugas Kodam I/Bukit Barisan, dituntut memiliki kesiapsiagaan dalam hal pengamanan wilayah. Sinkronisasi dengan Kepolisian di wilayah menjadi sebuah keharusan. Namun, hambatan yang ada dan selalu berulang adalah belum adanya kejelasan batasan kewenangan tentang tugas pengamanan wilayah, sehingga seringkali terjadi tumpang tindih peran dan tanggung jawab di lapangan.

1. Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2005).



► Apel gabungan dan pemeriksaan pasukan pengaman TNI dan Polri di wilayah Korem 022/PT

Bantuan TNI kepada Polri sampai saat ini sudah ada dalam Undang-undang RI Nomor 34/tahun 2004 tentang TNI, pasal 7.b. poin 10 dan UU RI Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia pasal 41 ayat (1), namun belum ada sinkronisasi Undang-undang ataupun Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang bantuan TNI secara taktis, teknis, maupun administrasi, sehingga tidak jelas siapa yang menyatakan Polri tidak mampu mengatasi keadaan dan siapa yang mempunyai wewenang meminta bantuan kepada TNI, serta siapa yang berwenang memutuskan permintaan bantuan tersebut, karena dalam konteks tugas Operasi Militer Selain Perang (OMSP) yang dilakukan TNI dalam implementasinya membutuhkan keputusan politik negara.

Nota Kesepahaman (MoU) antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia tentang Perbantuan TNI kepada Polri dalam rangka Memelihara Keamanan dan Ketertiban Masyarakat yang ditandatangani oleh Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto dan Jenderal Polisi Tito Karnavian pada tanggal 23 Januari 2018 memang merupakan sebuah upaya sinkronisasi dan meningkatkan sinergi antara TNI dan Polri dalam rangka pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat.

Dalam tataran implementasi, kebijakan perbantuan TNI kepada Polri memang mengalami sedikit masalah. Agar koordinasi dalam implementasi kebijakan berjalan dengan baik, maka menurut Nurcholis¹ diperlukan: 1) Adanya kesesuaian antara kebijakan dasar dan keputusan pelaksanaannya; 2) Adanya perlakuan yang sama terhadap semua aktor yang terlibat; 3) Adanya perilaku yang konsisten antara pejabat dalam menyelenggarakan tugasnya sesuai dengan deskripsi tugas masing-masing; 4) Adanya tindakan para pejabat yang taat asas terhadap prosedur dan batas waktu yang telah ditentukan; 5) Adanya kejelasan kebijakan itu sendiri dan cara melaksanakannya.

Situasi dan kondisi sosial di beberapa daerah menyebabkan terganggunya stabilitas keamanan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Realitas tersebut menunjukkan besarnya kerawanan potensi ancaman, baik dalam tataran nasional maupun lokal. Bila tidak diantisipasi sedini mungkin, baik melalui koordinasi kerja sama aparat keamanan dan intelijen antarinstansi terkait di pusat dan di daerah maupun melalui operasi keamanan, dapat menimbulkan instabilitas nasional dan lokal. Atas dasar perkembangan tersebut, maka pemberdayaan Kowil mutlak diperlukan dalam rangka menjamin rasa aman masyarakat, yang merupakan bagian dari tugas TNI sebagai

komponen utama sistem pertahanan negara dalam hal melindungi segenap bangsa dan tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.

Tugas perbantuan TNI kepada Polri adalah salah satu kebijakan publik yang lahir pada era reformasi nasional, yang dihasilkan dari proses reformasi sektor keamanan seiring dengan penerapan proses demokratisasi di Indonesia. Lahirnya kebijakan ini juga tidak terlepas dari dinamika keamanan internasional yang berkembang di luar negeri, khususnya terkait dengan semakin menguatnya peran aktor-aktor non-negara dalam berbagai isu-isu keamanan global dan regional. Dimensi internal dan eksternal tersebut saling memengaruhi dan mendorong lahirnya kebijakan ini, yang dimaksudkan untuk mengatur keterlibatan militer dalam penanganan beberapa bentuk ancaman yang berdimensi non-militer, namun berpotensi membahayakan keamanan negara apabila tidak ditangani dengan baik.

Sinkronisasi aparat Kowil dengan Polri diperlukan setiap saat, terutama pada saat aparat yang diperbantukan kepada Polri. Personel yang diperbantukan berstatus BKO, status suatu satuan di mana satuan tersebut di bawah kendali operasi suatu satuan atasan tertentu yang bukan satuan atasan organiknya. Hubungan yang di-BKO-kan dengan yang menerima BKO: *Pertama*, yang di-BKO-kan menerima perintah untuk melaksanakan operasi tetapi tidak keluar dari tugas pokok di bawah satuan organiknya.

Kedua, bantuan administrasi oleh satuan atasan organiknya bukan satuan yang menerima BKO. Sebenarnya status BKO ini hanya tepat jika diterapkan antar-sesama satuan TNI saja, mengingat akan tugas pokok dari TNI berbeda dengan Polri. Mungkin yang lebih tepat untuk Satuan TNI yang dilibatkan dalam membantu Polri dalam rangka tugas Kamtibmas dibentuk “Satgas Kamtibmas” yang berdiri sendiri dengan status S3B (Setiap Saat Siap Bergerak) dengan Daerah Persiapan yang dimajukan (DP Aju) dan disiapkan di wilayah yang membutuhkan bantuan tersebut, DP Aju merupakan suatu tempat berkumpul dari satuan dan sebagai titik awal bagi satuan untuk melaksanakan tugas atau kegiatan selanjutnya. Dengan Komando dan Pengendaliannya di bawah Dansatgas Kamtibmas. Dansatgas Kamtibmas dipimpin oleh perwira yang ditunjuk atau Komandan

Satuan Teritorial setempat, minimal setingkat Komandan Kodim dan bertanggungjawab kepada Panglima Daerah Militer setempat, dan untuk Satgas sendiri dibentuk oleh Satuan Atasan (Mabes TNI, Kodam), hal ini diperlukan untuk memperjelas tugas, kewenangan, dan tanggung jawab, serta Komando dan Pengendalian bagi personel TNI yang diperbantukan. Dan untuk uang saku dan dukungan logistik bagi personel yang dilibatkan dalam tugas Kamtibmas disiapkan oleh Satuan Atasan dengan dana dari APBN/APBD sesuai aturan hukum yang berlaku.

Penutup

Dalam pelaksanaan pengamanan wilayah, secara umum berlaku prinsip universal bahwa dalam melaksanakan OMSP: TNI tidak berarti mengambil alih peran Kepolisian dan tidak berperan secara sendiri. Dalam melaksanakan tugas perbantuan, TNI bekerjasama dengan instansi pemerintah lain, termasuk Polri, secara terpadu dan lebih memprioritaskan pada tindakan preventif dibandingkan dengan tindakan represif. Tugas perbantuan TNI kepada Polri yang diamanatkan UU pada prinsipnya sangat dipengaruhi oleh eskalasi ancaman yang berkembang. Bila spektrum ancaman masih bersifat kriminal dan bisa ditangani oleh Polri, maka TNI tidak boleh terlibat. Sebaliknya, apabila ancaman bereskalasi hingga melahirkan situasi gawat/mendesak, TNI dapat dilibatkan berdasarkan keputusan politik negara, dalam hal ini melalui keputusan Presiden dan persetujuan DPR.

Suatu kebijakan diambil untuk dapat mencapai suatu tujuan. Hal ini berarti kebijakan yang dipilih haruslah dapat diimplementasikan dalam tataran pelaksanaan di lapangan. Jika kebijakan tidak implementatif, maka kebijakan tersebut sulit untuk dapat dilaksanakan dengan baik, dan tujuan yang diharapkan dari kebijakan tidak dapat tercapai. Atau dengan kata lain kebijakan tersebut *absurd*. Oleh karena itu, kebijakan yang baik haruslah dapat diimplementasikan oleh para pelaksana kebijakan tersebut.

Nota Kesepahaman antara TNI dan Polri yang telah diperbarui di tahun 2018 untuk 5 (lima) tahun ke depan masih harus dibuatkan aturan yang dapat diimplementasikan di lapangan agar tidak terjadi tumpang tindih peran, tugas dan tanggung jawab antara aparat TNI dan Polri pada saat pelaksanaan pengamanan wilayah.

OPTIMALISASI PUSKODALAD DALAM MENDUKUNG KODAL PIMPINAN TNI AD

Oleh: Kolonel Tri Haryono, S.Sos., M.M.
(Kapuskodadalad)



Perkembangan lingkungan strategis disertai perkembangan teknologi Alutsista yang sangat cepat telah mengubah paradigma peperangan dan cara bertempur serta berdampak pada perubahan spektrum ancaman militer dan ancaman bersenjata. Dampak perubahan ini harus segera disikapi dengan bijak oleh TNI dan khususnya TNI Angkatan Darat dengan mewujudkan Komando Kendali pimpinan yang didukung dengan Sistem Informasi dan Sistem Komunikasi sebagai *platform* dasar pengembangan fungsi Puskodal.

Berdasarkan Peraturan Kasad Nomor Perkasad/109/XII/2012 tanggal 12 Desember 2012 Pusat Komando dan Pengendalian Angkatan Darat (Puskodalad) adalah badan pelayanan staf di lingkungan Markas Besar Angkatan Darat (Mabesad) yang mempunyai tugas pokok menyiapkan fasilitas Komando dan Kendali (Kodal) Pimpinan Angkatan Darat yang dilengkapi dengan Sistem Informasi (Sisfo) dan Sistem Komunikasi (Siskom). Dari tugas pokok tersebut di atas, terlihat bahwa sebagai badan pelayanan staf, Puskodalad dituntut mampu menyiapkan sarana Kodal pimpinan dilengkapi Sisfo dan Siskom dalam rangka mendukung tugas pokok Angkatan Darat. Namun demikian, masih ditemukan beberapa kendala dan hambatan sehingga diperlukan optimalisasi fungsi Puskodal sebagai sarana Kodal pimpinan TNI AD.

Bertitik tolak dari permasalahan belum optimalnya pelaksanaan tugas Puskodal Angkatan Darat dalam mendukung Kodal pimpinan tersebut maka perlu dibuat suatu pembahasan tentang *Bagaimana upaya optimalisasi yang dilakukan Puskodalad dalam mendukung Kodal pimpinan TNI AD?* Hal tersebut di atas jelas merupakan bagian tugas pokok Puskodalad dalam menyiapkan fasilitas Komando dan Kendali (Kodal) Pimpinan Angkatan Darat.

Pembahasan

Dikaitkan dengan Sistem Informasi dan Sistem Komunikasi yang merupakan bagian dari *interoperability data link* pertahanan matra darat mengatur pola komunikasi antar Pusat Komando Pengendalian Operasi (Puskodalops) Kotama yang menggunakan saluran yang sama, sedangkan dengan Puskodal jajaran TNI menggunakan saluran berbeda. Hal ini menyebabkan penyampaian pesan dan informasi mengalami tantangan pada standardisasi. Langkah ini penting dilakukan mengingat jajaran Puskodal TNI masih memiliki sistem komunikasi dengan jenis yang berbeda-beda dan menjadi masalah dalam hal *interoperability* antarsistem komunikasi. *Interoperability* menjadi kata yang kerap mudah diucapkan dalam dunia militer dan merupakan salah satu indikator kemajuan militer suatu negara¹.

Sistem Informasi dan Sistem Komunikasi masih terbatas hanya pada proses pelaksanaan kegiatannya, belum tergelarnya fasilitas informasi dan komunikasi ke dalam sistem *interoperability* TNI sehingga tata kelola manajemen informasi dan komunikasi secara terpusat baik komunikasi *voice* dan *data/informasi* belum ter-*encryption*. Selain itu juga keamanan bagi personel yang mengawaki (operator)

1. Kata Pengantar Letjen TNI Dr. I Wayan Midhio, M.Phil, *Sistem Informasi TNI Dalam Rangka Interoperability Data Link Pertahanan Negara*, Bogor: Unhan, 2017, hal v-vi



➤ Ruang Pusat Komando dan Pengendalian TNI AD

juga bagi penyedia layanan telekomunikasi belum terintegrasi secara menyeluruh.

Ruang Pusat Komando dan Pengendalian

Keberadaan suatu tempat yang didukung dengan sarana Sistem Informasi dan Sistem Komunikasi sangat diperlukan guna pengambilan keputusan bagi pimpinan. Konsep dasar mengenai Ruang Pusat Komando dan Pengendalian sebagai sarana pengambilan keputusan bagi pimpinan untuk memberikan komando, koordinasi, dan pengambilan keputusan terhadap respons atas suatu insiden. Sehingga insiden yang terjadi dapat dikumpulkan dan diproses melalui semua sarana informasi yang dikelola dengan kesadaran situasional secara cepat dan efektif. Ruang Pusat Komando dan Pengendalian pada dasarnya untuk mengelola tujuan dengan mengandalkan atas rencana aksi suatu insiden.

Selain itu juga sebagai rantai komando dan kesatuan perintah, membangun dan memelihara gambaran operasi secara umum, serta membuat keputusan dan menetapkan tugas. Dari hal-hal yang berkenaan dengan Ruang Pusat Komando dan Pengendalian tersebut dapat dijadikan deskripsi guna pemanfaatan pengambilan keputusan pimpinan.

Saat ini penggunaan Ruang Pusat Komando dan Pengendalian digunakan untuk melakukan komunikasi tatap muka melalui sarana *video conference* dengan satuan jajaran TNI pada umumnya dan satuan jajaran TNI AD pada khususnya maupun dengan instansi lainnya.

Ruang Monitor Perkembangan Situasi

Sebagai fungsi penyedia fasilitas informasi bagi Pimpinan Angkatan Darat dalam melaksanakan

Komando dan Kendali maka jelas bahwa Puskodal Angkatan Darat memiliki peran sentral dalam memanfaatkan Ruang Monitor Perkembangan Situasi atau yang disingkat dengan Ruang Monitor Bangsit sebagai sarana pengambilan keputusan pimpinan. Dihadapkan dengan peran Puskodalad saat ini masih jauh dari yang diharapkan. Peranan Puskodal Angkatan Darat saat ini hanya terkesan pada kegiatan pengiriman laporan situasi kepada Pimpinan TNI AD dan mengatur/mengendalikan petugas Posko Siaga Mabesad.

Untuk peran lain terutama dalam hal penyajian data dan informasi yang akurat baik berupa data intelijen, operasi, personel, materiil dan data lainnya yang disajikan di Ruang Monitor Bangsit dengan menggunakan teknologi yang modern belum dapat dilaksanakan secara maksimal dikarenakan input data yang dilakukan oleh satuan terkait dirasakan kurang optimal.

Komunikasi Data

Guna mendukung fungsi Kodal pimpinan, Puskodalad dalam melaksanakan kegiatan administrasi penyelenggaraan komunikasi menggunakan jaringan baik yang bersifat LAN (*Local Area Network*), atau WAN (*Wide Area Network*) serta bersifat *private* atau *public*. Komunikasi data berbasis TCP/IP dengan menggunakan WAN (*Wide Area Networking*) baik menggunakan jaringan *metro ethernet* penyedia jasa layanan telekomunikasi ataupun menggunakan transmisi VSAT IP.

Untuk jaringan WAN VPN e-Militer digunakan untuk menyalurkan pertukaran informasi di internal lingkungan TNI AD dan bersifat tertutup dari jaringan publik (*internet*) sedangkan jaringan WAN internet digunakan untuk penyalurkan pertukaran

informasi yang bersifat umum di lingkungan TNI AD ataupun di luar lingkungan TNI AD, umumnya digunakan untuk pengiriman e-mail ke dan antar-Satker lembaga pemerintahan lainnya berikut dengan komunikasi data individual personel TNI AD ataupun mencari informasi berita berskala nasional.

Video Conference

Salah satu Kodal pimpinan yang dimiliki oleh Puskodal adalah dengan melalui *video conference (Vicon)*. Sistem komunikasi Puskodal melalui *vicon* memerlukan langkah-langkah khusus dalam penyelenggaraannya. Pengoperasian *vicon* Puskodal sangat penting untuk mewujudkan komando dan pengendalian pimpinan guna pengambilan keputusan dalam rangka mendukung tugas pokok TNI AD.

Penyelenggaraan kegiatan pengoperasian *vicon* Puskodal agar dapat mencapai sasaran yang diharapkan diperlukan suatu sistem komunikasi yang tepat dan terarah agar siap digunakan untuk pimpinan dengan mempertimbangkan aspek-aspek prosedur pengoperasiannya. Selama ini pengoperasian *vicon* Puskodal masih menggunakan Prosedur Tetap (Protap) sebagai acuan dalam pelaksanaannya.

Sistem Informasi

Sistem informasi Puskodal merupakan kombinasi dari teknologi informasi dan personel yang bertugas menyajikan data/informasi terkini kepada Pimpinan yang cepat, akurat, *real time*, dan aman sebagai bahan masukan dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan. Kegiatan sistem informasi Puskodal secara teknis terdiri dari penggunaan aplikasi Sistem informasi, pemeliharaan jaringan LAN dan keamanan informasi, yang memerlukan langkah khusus dalam penyelenggaraannya. Penyelenggaraan Sistem Puskodal sangat penting untuk mewujudkan Kodal bagi pimpinan TNI AD.

Sistem Komunikasi

Sistem Komunikasi Puskodal yang dilaksanakan saat ini untuk komunikasi radio menggunakan RoIP (*Radio over Internet Protocol*). Dalam implementasinya adalah menggunakan 2 jenis WAN yaitu WAN VPN e-Militer dan WAN internet. Sedangkan komunikasi berbasis TCP/IP dengan menggunakan WAN (*Wide Area Networking*) baik menggunakan jaringan *metro ethernet* penyedia jasa layanan telekomunikasi

ataupun menggunakan transmisi VSAT IP antara lain WAN VPN e-Militer dan WAN internet.

Penggelaran jaringan WAN ini diperuntukkan guna pelaksanaan kegiatan *video conference*. Kegiatan *video conference* baik dilaksanakan oleh Para Pejabat di lingkungan Mabesad maupun dalam rangka memonitor kegiatan TNI dan TNI AD. Peralatan *video conference* Angkatan Darat sudah diintegrasikan dengan peralatan *video conference* di jajaran Mabes TNI. Peralatan *video conference* Angkatan Darat yang sudah digelar Pushubad yang menggunakan fasilitas satelit maupun jaringan E-Militer sudah dapat diintegrasikan menggunakan *Cisco Meeting Server (CMS)*.

Puskodal TNI AD Berfungsi Sebagai Sarana Kodalops

Komando dan pengendalian operasi yang efektif dan efisien merupakan salah satu penunjang untuk mencapai keberhasilan suatu operasi militer. Adapun tujuan dari Kodalops TNI AD adalah mewujudkan Kodalops secara efektif untuk mendukung pelaksanaan operasi TNI AD, sedangkan sasarannya terwujudnya sistem Kodalops TNI AD yang efektif dalam mendukung tugas operasi. Agar dapat mengendalikan suatu operasi secara baik maka komando dan pengendalian yang dilaksanakan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: dapat mentransformasi keinginan pimpinan/komandan secara tepat; dapat dioperasionalkan atau bekerja dengan cepat; dapat disesuaikan dengan perubahan situasi yang terjadi; dan tetap efektif pada berbagai jenis operasi.

Adapun pertimbangan dasar penyelenggaraan Kodalops sebagai berikut²: Kodalops berpengaruh langsung terhadap keberhasilan suatu operasi militer; Kompleksitas dan tantangan tugas mengalami peningkatan secara signifikan dari waktu ke waktu sehingga memerlukan penyesuaian penyelenggaraan Kodalops dalam pelaksanaan suatu operasi militer.

Perkembangan dan kemajuan teknologi persenjataan modern memerlukan penyesuaian penyelenggaraan Kodalops dalam pelaksanaan suatu operasi militer; Perubahan dan perkembangan organisasi militer, doktrin, taktik, dan teknik pertempuran memerlukan penyesuaian penyelenggaraan Kodalops dalam operasi militer; Perlunya sinkronisasi sistem Kodalops TNI AD dengan sistem Komando, Kendali, Komunikasi, Komputer, Intelijen, Pengamatan,

2. Keputusan Kasad Nomor Kep/922/XII/2017 tanggal 4 Desember 2017, tentang Doktrin Pelaksanaan Komando dan Pengendalian Operasi TNI AD

dan Pengintaian (K4IPP). Kondisi yang diharapkan dari penyelenggaraan Kodalops bagi Puskodal TNI AD dapat memberikan pemahaman tentang Kodalops yang efektif dan efisien sebagai salah satu penunjang pencapaian keberhasilan suatu operasi militer.

Upaya yang telah dilaksanakan Puskodal TNI AD

Dalam pelaksanaan komando dan pengendalian pimpinan TNI AD diperlukan dukungan fasilitas sarana dan prasarana baik sistem informasi dan sistem komunikasi yang memadai dan kesiapan dalam memberikan data/informasi terkait. Adapun upaya-upaya yang telah dilaksanakan oleh Puskodal TNI AD sebagai sarana Kodal pimpinan adalah sebagai berikut:

- **Video Conference**

Para pejabat di lingkungan TNI AD memanfaatkan fasilitas komando dan kendali TNI AD yang ada di Puskodal Angkatan Darat secara maksimal. Alat komunikasi dan alat informasi yang tergelar untuk jaring komando dapat terkoordinasi dan terintegrasi. Misalnya pembangunan jaring fiber optik oleh Disinfolahtad diharapkan digelar sampai dengan Puskodalad, sehingga jaringan fiber optik yang saat ini difokuskan untuk *video conference* dapat diintegrasikan dengan sistem *video conference* yang ada di Puskodal Angkatan Darat yang menggunakan jaringan VSAT.

Kegiatan laporan situasi Padis Siaga Mabas menggunakan sarana Vicon Puskodal TNI AD berjalan baik dilakukan pada: Hari Senin pukul 08.00-10.00 WIB Laporan Situasi kepada Padis Siaga Mabas TNI, hari Selasa s.d Minggu pukul 06.00-08.00 WIB; Setiap hari pukul 10.00-13.00 WIB monitor perkembangan situasi dengan Padis Siaga Mabas; Setiap hari pukul 15.00-17.00 WIB menerima laporan situasi dari Padis Siaga Kotama. Selama masa Pandemi Covid-19 ini kegiatan bapak Kasad dalam berkomunikasi dengan menggunakan sarana Vicon berdasarkan data dari Staf Komlek sebanyak 30 kali melaksanakan Vicon dengan RSPAD guna mengetahui sejauhmana perkembangan wabah Covid-19 khususnya bidang penanganannya.

Kegiatan Vicon lainnya yang melibatkan pejabat di lingkungan Mabas baik menggunakan CMS (*Cisco Meeting Server*), aplikasi *Zoom Meeting* maupun *Cloud-X* dapat terlaksana

dan dilayani dengan baik dari segi penggunaan Ruang Puskodal dan alat peralatan yang dimiliki oleh Puskodal TNI AD. Kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan jarak jauh diikuti Pasis Seskoad dapat dilaksanakan dan dilayani dengan baik yang terbagi dalam beberapa kelompok. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan sarana Vicon menjadi sangat dibutuhkan dalam kegiatan proses belajar di lingkungan TNI AD ini.

- **Laporan Situasi via *Dashboard* Puskodal**

Pengisian *Dashboard* Puskodal dilakukan oleh Piket Puskodalad saat terjadi kejadian yang melibatkan personel militer maupun PNS serta KBT AD. Kejadian berskala besar misalnya bencana alam dimana unsur personel TNI AD dilibatkan dalam penanganan bencana tersebut dapat dilaporkan melalui aplikasi *Dashboard* Puskodal ini sehingga dari pelaporan ini pimpinan TNI AD dapat mengaksesnya guna pengambilan keputusan lebih lanjut.

- **Radio Over Internet Protocol (RoIP)**

Radio over Internet Protocol (RoIP) merupakan peralatan komunikasi yang menggunakan teknologi sistem radio dengan standar *Voice over Internet Protocol* (VoIP) bekerja melalui perangkat lunak maupun keras bertujuan untuk komunikasi dua arah secara terpadu dalam rangka mendukung pelaksanaan Komando dan Pengendalian (Kodal). Perangkat RoIP Puskodal yang tergelar saat ini digunakan sebagai sarana alur ganda jika sarana utama seperti Vicon Puskodal mengalami kendala. Pelaksanaan kegiatan apel jaring dapat terlaksana dengan baik melalui sarana jaringan E-Militer maupun jaringan internet publik, kegiatan dilakukan baik dengan jajaran Puskodalops Kotama maupun satuan jajaran TNI AD lainnya.

Kesimpulan

Optimalisasi Puskodalad dalam mendukung Kodal pimpinan TNI AD perlu penyempurnaan lebih lanjut sehingga guna mendukung proses pengambilan keputusan pimpinan secara cepat dan tepat diperlukan kesiapan operasional satuan baik peralatan maupun fasilitas sarana dan prasarana pendukung Kodal pimpinan. Dengan demikian penataan Sistem Komando dan Pengendalian (Siskodal) perlu ditingkatkan kualitasnya.

STRATEGI PENYIAPAN KEMAMPUAN SDM TNI AD DALAM MENGHADAPI ERA INDUSTRI 4.0

Oleh: Kolonel Czi Muslim Jaya, S.E.
(Komandan Pusdikzi Kodiklatad)

Era Revolusi Industri 4.0 adalah suatu Era Teknologi yang serba otomatis dan terjadi pertukaran data terkini dalam skala besar yang mencakup Sistem Siber Fisik (*Physical Cyber System*), di mana penggunaan jaringan internet secara masif, penggunaan teknologi dan sistem digital yang mutakhir.

Konsep Revolusi Industri 4.0 pertama kali diperkenalkan oleh Profesor Klaus Schwab, seorang ekonom asal Jerman yang menggagas tentang *World Economic Forum (WEF)*. Klaus Schwab menyatakan bahwa Revolusi Industri 4.0 secara fundamental dapat mengubah cara hidup kita, cara bekerja, dan cara berhubungan antar satu dengan yang lain. Inti dari analisisnya adalah Revolusi Industri Keempat berada dalam kendali kita semua, selama kita dapat berkolaborasi secara lintas geografi, lintas sektoral, dan lintas berbagai disiplin ilmu untuk menangkap peluang yang dihidirkannya.¹

Era ini ditandai dengan adanya *Internet of Things (IoT)*, *Big Data*, *Augmented Reality*, *Cyber Security*, *Artificial Intelligence*, *Addictive Manufacturing*, *Integrated System*, dan *Cloud Computing*. Sedangkan prinsip-prinsip implementasi era Revolusi Industri 4.0 adalah: Interoperabilitas (kesesuaian); Transparansi informasi; Bantuan teknis; dan Pengambilan Keputusan secara mandiri. Era Revolusi Industri 4.0 dalam dunia militer ditandai dengan kendaraan tak berawak (*unmanned system*), *Artificial Intelligence (AI)*, *Robotic*, dan *Big Data*. Aplikasi penggunaan *Artificial Intelligent* di dunia militer antara lain adalah: (a) Pengembangan kecerdasan buatan oleh Militer dalam menganalisa data pertempuran dan *Turret SGR-A1* produksi Samsung yang Selatan dan Utara, yang mampu melakukan pelacakan, penembakan peluru serta senjata otonom oleh Britania Raya seperti

AS pada Tank untuk membantu personil untuk menentukan target; (b) Penggunaan ditempatkan di zona demiliterisasi Korea fungsi pengawasan, pengenalan suara, pelontaran granat; dan (c) Pengembangan *Drone Taranis* produksi *BAE systems*.

TNI AD sebagai salah satu alat secara cepat dan tepat tentang dengan Revolusi Industri 4.0. salahsatuunsurpentingkarena juga telah mengubah seluruh sendiri. Hal ini menuntut untuk ditingkatkan mengawaki teknologi

Implementasi dari yang sudah dilakukan lain: (a) Pengembangan yang disebut "*GeNose*" sama dengan BIN, TNI AD, *GeNose* merupakan teknologi

Negara harus mengantisipasi perkembangan global terkait Kekuatan militer menjadi perkembangan teknologi tatanan strategi militer itu kualitas Prajurit TNI sehingga mampu militer terkini.

Artificial Intelligence oleh TNI AD antara alat deteksi *Covid-19* oleh UGM bekerja dan pihak swasta. pengendus elektronik



1. World Economic Forum "The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab" (<https://www.weforum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab>, diakses pada 29 September 2020 pukul 17.10)
2. Yohanes Enggar Harususilo, "Alat Pengendus Covid-19 Inovasi Anak Bangsa", (<https://www.kompas.com/edu/read/2020/09/25/145325471/genose-alat-pengendus-covid-19-inovasi-anak-bangsa?page=all>, diakses pada tanggal 30 September 2020 pukul 10.00)

cepat dan berbiaya rendah, serta dengan sensitivitas tinggi untuk mendeteksi *Covid-19* melalui embusan napas yang diidentifikasi melalui sensor-sensor yang kemudian datanya diolah dengan bantuan kecerdasan artifisial untuk pendeteksian dan pengambilan keputusan²; dan (b) Penggunaan pesawat tanpa awak (*Drone*) untuk menghadapi kasus terorisme di Poso. Para prajurit di lapangan berhasil mendapatkan data-data penting tentang keberadaan para teroris dan makhluk hidup lainnya melalui sistem informasi yang ditangkap dan diolah oleh *Drone*, sehingga mereka lebih mudah dalam menemukan target.

Kedua contoh ini bukan berarti TNI AD sudah siap menghadapi tantangan di Era Revolusi Industri 4.0, namun TNI AD harus terus dapat bekerja dengan lebih cerdas dari era sebelumnya, seperti mampu menggunakan *Artificial Intelligence* untuk mempercepat proses pengambilan keputusan dan lain sebagainya. Konsep Revolusi Industri 4.0 juga memperluas konektivitas digital ke dunia fisik.

Teknologi Industri 4.0 menggabungkan informasi digital dari berbagai sumber dan lokasi fisik dan digital, termasuk *Internet of Things* (IoT) dan analitik, manufaktur aditif, robotika, komputasi berkinerja tinggi, kecerdasan buatan dan teknologi kognitif, material canggih, serta *augmented reality*. Hal-hal tersebut akan menjadi permasalahan tersendiri apabila tidak didukung oleh tersedianya Sumber Daya Manusia (SDM) yang mumpuni.



Walaupun Indonesia memiliki jumlah SDM yang sangat banyak, namun jumlah orang-orang yang memiliki kualitas yang bagus dalam hal Teknologi Informasi dan Digital sangat sedikit. Hal ini berimplikasi pada kualitas Sumber Daya Prajurit TNI. Saat ini jumlah prajurit TNI AD sebanyak 483.000 orang. Kurang dari 50 persen prajurit TNI yang dapat menguasai teknologi dan bahasa asing dengan baik. Padahal guna membangun Postur TNI AD yang modern dibutuhkan SDM yang berkompeten yang memiliki dasar kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mumpuni. Melihat fenomena yang ada, maka perlu adanya strategi penyiapan sumber daya prajurit yang baik sehingga dapat menjawab segala tuntutan tugas di Era Revolusi Industri 4.0.

Strategi Penyiapan Sumber Daya Prajurit TNI dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0

Menghadapi tantangan era Revolusi Industri 4.0, maka TNI AD memerlukan strategi khusus untuk menyiapkan Sumber Daya Prajuritnya, yaitu dengan menggabungkan kesiapan penyediaan dan pembinaan SDM. Proses penyiapan SDM TNI AD di Era Revolusi Industri 4.0 sebaiknya menganut prinsip pendidikan sepanjang hidup atau *long life education* bagi Prajurit TNI, baik melalui proses pendidikan reguler yang diikuti oleh Prajurit ataupun pendidikan-pendidikan yang bersifat non reguler sesuai bidang keahliannya masing-masing seperti melalui program seminar, penataran dan pelithan-pelatihan. Prinsip selanjutnya adalah menerapkan *link and match* dengan melaksanakan pendataan, pembinaan, dan penempatan jabatan sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh Prajurit tersebut.

Hal ini dimaksudkan untuk menyesuaikan pengembangan kapasitas diri Prajurit TNI AD baik secara kesamaptaan,

sikap dan perilaku, serta ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga dapat melaksanakan tugas dengan maksimal,

Adapun pentahapan strategi penyiapan SDM TNI AD dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0 adalah: **(A) Fase perekrutan**, proses perekrutan prajurit selain memperhatikan *Soft Skill* atau kemampuan khusus dari calon, juga menelusuri rekam jejak calon terkait minat dan motivasi untuk belajar. Ini ditelusuri di luar kemampuan umum seperti kecakapan bahasa dan pengoperasionalan alat piranti keras maupun lunak, sehingga implementasinya dalam proses seleksi calon prajurit TNI diperlukan penambahan penilaian minat dan motivasi belajar, selain kemampuan bahasa asing dan penguasaan teknologi informasi (komputer). Kemudian, calon juga akan mendapatkan nilai lebih jika mahir dalam pemrograman serta digitalisasi;

B) Fase Pembinaan di Satuan, merupakan upaya meningkatkan SDM Prajurit yang sudah aktif sebagai anggota TNI AD, pada fase ini berbagai kemampuan diasah sesuai dengan kebutuhan (*link and match*), misalnya meningkatkan kemampuan dalam penggunaan informasi digital untuk meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan dan tindakan yang diambil di dunia fisik, meningkatkan kemampuan prajurit di bidang bahasa, mengirimkan untuk menempuh program S1, S2, dan S3 baik di dalam maupun luar negeri, yang berkaitan dengan materi kecabangannya sebagai bentuk *knowledge upgrade* dan komparasi serta evaluasi penguasaan teknologi bagi prajurit. Selanjutnya, diperlukan peningkatan kualitas lembaga pendidikan TNI AD yang meliputi 10 komponen pendidikan. Secara aplikatif melengkapi sarana prasarana dengan sistem komputerisasi yang menunjang metode pengajaran yang mengedepankan prinsip *paperless concept*, selanjutnya setiap Lemdik sepatutnya mampu menyelenggarakan simulasi tempur baik secara *single corps*, *joint corps*, *single service*, dan *joint service* secara komputerisasi dan terintegrasi.

Penerapan penggunaan Simulator Alutsista yang berbasis komputerisasi dirasa sangat perlu karena dapat memberikan latihan pendahuluan dan meminimalisir resiko kerugian dalam praktek/ latihan sebenarnya; dan **(C) Fase Pembinaan Purna Tugas**, merupakan pembinaan khusus sebagai apresiasi terhadap prajurit yang telah menyelesaikan tugasnya, namun memiliki keahlian

khusus yang dibutuhkan negara, maka pengabdian dapat dilakukan khusus sesuai keahliannya tersebut, selama yang bersangkutan mampu. Keahlian ini kemudian terus ditingkatkan sepanjang waktu.

Di samping program pembinaan *Soft Skill* terhadap prajurit TNI AD sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, strategi pembinaan SDM juga harus ditujukan kepada pembinaan yang bertujuan untuk membentuk kepribadian, integritas dan karakter prajurit yang baik. Harapannya akan terbentuk prajurit yang Sapta Marga dan tidak terpengaruh atau terjerumus ke dalam pergaulan sosial yang bersifat negatif. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pembinaan mental dalam satuan melalui kegiatan keagamaan, santi aji, santi karma, dan jam komandan secara berkesinambungan. Dan yang terakhir, prajurit TNI AD harus memiliki fisik yang prima. Bila kondisi fisik dan mental seorang prajurit baik, maka produktivitas dalam bekerja akan mencapai hasil yang maksimal, seperti pepatah Latin "*men sana in corpore sano*" atau di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Seorang prajurit yang memiliki kesempatan yang baik akan dapat berkonsentrasi pada tujuan dengan jernih, memiliki energi lebih untuk mencapai tujuannya, memiliki pikiran lebih segar dan lebih produktif, berpikir positif dan lebih kreatif serta lebih percaya diri.

Penutup

Demikian tulisan tentang strategi penyiapan SDM TNI AD dalam menghadapi era Revolusi Industri 4.0, di mana TNI AD memerlukan penyiapan prajuritnya, agar dapat berkompetisi dan menguasai kemajuan teknologi. Strategi untuk mencapai kapasitas SDM TNI AD yang mumpuni dititikberatkan pada aspek peningkatan kemampuan akademis, kepribadian dan fisik serta mental yang prima. Penyiapan SDM TNI AD dilakukan dalam 3 fase yaitu: fase perekrutan, fase pembinaan di Satuan, dan fase pembinaan purna tugas. Dalam implementasinya menganut prinsip pendidikan sepanjang hidup atau *long life education* bagi seluruh prajurit TNI, dan menerapkan *link and match* untuk menyesuaikan pengembangan kapasitas diri Prajurit TNI AD baik secara kesamaptaaan, sikap dan perilaku, serta ilmu pengetahuan dan teknologi agar dapat melaksanakan tugasnya dengan maksimal. Selanjutnya harapan penulis adalah semoga tulisan ini bermanfaat dan dapat memberikan gambaran serta tambahan pengetahuan bagi para pembaca.

UPAYA KODIM 1207/BS PONTIANAK DALAM PENANGANAN KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN

Oleh: Kolonel Inf Jajang Kurniawan, S.IP., M.M
(Dandim 1207/Pontianak)



Kebakaran hutan dan lahan masih terus terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Presiden Joko Widodo kembali menegaskan bahwa pihaknya tak akan memberikan toleransi bagi aparat TNI dan Polri yang di wilayah kerjanya tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan. Aturan tegas yang berlaku sejak 2016 itu kembali disampaikan Presiden saat memberikan arahan mengenai upaya peningkatan pengendalian kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) tahun 2020 di Istana Negara, Jakarta, Kamis, 6 Februari 2020. “Khusus untuk TNI dan Polri yang wilayahnya ada kebakaran besar, hati-hati Pangdamnya, Kapoldanya, Danremnya, Dandimnya, dan Kapolresnya. Pasti saya telepon Panglima dan Kapolri kalau ada kebakaran di wilayah kecil (jadi) agak membesar. Saya tanya pasti Dandimnya sudah dicopot belum?” kata Presiden. Adanya instruksi dari Kepala Negara tersebut harus menjadi perhatian para Komandan Satuan Kewilayahan khususnya Dandim yang selama ini di wilayahnya kerap terjadi kebakaran hutan dan lahan.

Wilayah Kalimantan Barat termasuk ke dalam wilayah tanggung jawab Kodam XII/Tanjungpura. Kalimantan Barat memiliki luas lahan gambut 1.680.000 hektar dan pada tahun 2019 kurang lebih 3.315 hektar lahan gambut terbakar. Kalimantan Barat berada pada urutan ke-7 dari 34 provinsi yang mempunyai lahan gambut yang terbesar dan terbakar pada tahun 2019. Sejak tahun 2019, Pemprov Kalbar telah mengeluarkan Peraturan Gubernur Nomor 39 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan tertanggal tanggal 13 Agustus 2019, di mana pada pasal 17 ayat 2) menyatakan penghentian sementara konsesi selama 3 (tiga) tahun terhadap hutan dan atau lahan yang terbakar karena kelalaian dan penghentian sementara konsesi selama 5 (lima) tahun terhadap hutan dan atau lahan yang terbakar karena disengaja serta pada ayat (3) menyatakan pembebanan keseluruhan biaya yang timbul akibat kebakaran hutan dan atau lahan pada pemegang konsesi. Namun Pemprov Kalbar tidak melakukan pelarangan total terhadap pembukaan lahan melalui pembakaran.

Sejak lama kebakaran hutan menjadi persoalan lingkungan di Kalimantan Barat. Tidak hanya melepaskan karbon, kebakaran lahan dan hutan menyebabkan hilangnya kekayaan hayati, menimbulkan berbagai penyakit, menciptakan kemiskinan bagi masyarakat, bahkan merugikan keuangan negara dalam jumlah yang besar serta memunculkan kritikan dari negara-negara lain. Persoalan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) merupakan dampak dari perubahan bentang alam baik hutan dan rawa gambut, akibat aktivitas HPH, pembukaan lokasi transmigran, perkebunan, pertambangan dan pembangunan infrastruktur. Apalagi pemerintah daerah Kalimantan Barat tidak melakukan pelarangan pembukaan lahan pertanian dan perkebunan dengan pembakaran lahan. Kondisi ini tentunya tetap menimbulkan kerawanan terjadinya kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat termasuk di wilayah tanggung jawab Kodim 1207/BS Pontianak.



Dengan pertimbangan tingginya potensi kebakaran hutan dan lahan gambut di wilayah Kodim 1207/BS Pontianak, maka Dandim 1207/BS Pontianak melaksanakan dua strategi penanggulangan kebakaran hutan dan lahan dalam jangka pendek dan jangka panjang. Dalam jangka pendek, Kodim 1207/BS Pontianak melaksanakan penanganan kebakaran hutan dan lahan secara langsung dengan menggunakan Nusantara Foam 44 sebagai bagian dari upaya tanggap darurat.

Nusantara Foam 44 ini merupakan produk hasil karya dari Korem 44/Gapo Kodam II/Sriwijaya yang ramah lingkungan bahkan aman bagi manusia. Keunggulan Nusantara Foam 44 karena produk ini hemat air sehingga dapat efektif dan efisien dipergunakan di wilayah-wilayah yang sulit air atau jauh dari tempat air. Dari segi biaya/harga pembuatan Nusantara Foam 44 lebih murah dari alat atau cairan pemadam api lainnya.

Keunggulan lain dari cairan pemadam Nusantara Foam 44 ini adalah dapat mengurangi *water damage* atau kerusakan akibat semprotan air saat dilakukan pemadaman. Biasanya dalam pemadaman kebakaran pada rumah, semprotan air dari alat pemadam kebakaran akan merusak atau menghancurkan bagian yang dilakukan penyemprotan, dengan Nusantara Foam 44 ini *water damage* bisa dihindari sehingga produk Nusantara Foam 44 ini akan juga dapat dipergunakan oleh tim pemadam kebakaran.

Saat ini Kodim 1207/BS Pontianak terus mensosialisasikan penggunaan Nusantara Foam

44 kepada berbagai pihak, di antaranya kepada Polri, Manggala Agni dan kelompok masyarakat khususnya di wilayah konsesi perkebunan. Kodim 1207/BS Pontianak saat ini telah melaksanakan simulasi pemadaman api dengan menggunakan Nusantara Foam 44 bagi para Babinsa jajaran Kodim 1207/BS Pontianak terutama pada Koramil di daerah yang memiliki lahan gambut yang memiliki terjadi ancaman kebakaran lahan.

Upaya Kodim 1207/BS Pontianak ini mendapat dukungan dari berbagai pihak khususnya dari pemerintah daerah. Selain turut dan membantu sosialisasi penggunaan Nusantara Foam 44, pemerintah juga mendukung dalam segi regulasi dengan mengeluarkan Pergub Nomor 103/2020 tentang cara pertanian tradisional yang berkearifan lokal, yang mengatur tata cara pelaksanaan terbatas dan terkendali, dan juga melaporkan kegiatan pembakaran ladang. Tidak hanya itu dukungan dari Kodam XII/Tanjungpura juga cukup besar di antaranya dengan menggelar apel siaga dan simulasi penanganan Karhutla yang bertujuan memastikan TNI, Polri, Manggala Agni, dan kelompok masyarakat untuk dapat mengantisipasi Karhutla dan penggunaan Nusantara Foam 44.

Selain penggunaan Nusantara Foam 44 sebagai upaya tanggap darurat penanganan kebakaran lahan dan hutan. Kodim 1207/BS Pontianak juga mengupayakan penggunaan Bios 44 sebagai upaya jangka panjang dalam mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Bios 44 merupakan dekomposer cairan dari jenis perpaduan beberapa mikroorganisme yang

disatukan berfungsi untuk memperkecil hingga menutupi rongga-rongga pada lahan gambut dalam tempo tertentu. Cairan tersebut membuat lahan gambut tidak akan mudah terbakar.

Bios 44 merupakan produk terobosan untuk mengatasi persoalan lingkungan khususnya penurunan kualitas lingkungan. Produk Bios 44 merupakan produk inovasi yang sangat efektif dalam membantu perekonomian petani hingga mampu beradaptasi dengan perubahan iklim perubahan kualitas lingkungan atau lahan yang terjadi selama ini.

Produk Bios 44 ini dibuat untuk mengubah kualitas lahan gambut menjadi lahan layak tanam tanpa melakukan pembakaran dengan prinsip menaikkan PH tanah dan membuat lahan-lahan kritis menjadi subur dan menjadi berkualitas serta tidak mudah terbakar. Bios 44 ini juga bisa dipergunakan pada lahan-lahan bekas tambang yang tidak lagi dapat dipergunakan sebagai lahan pertanian, karena akan mengembalikan unsur hara yang sangat dibutuhkan oleh tanaman.

Berdasarkan hasil uji coba di lahan pertanian, penggunaan Bios 44 ini juga ternyata dapat meningkatkan hasil produksi pertanian. Bahkan penggunaan Bios 44 juga aman digunakan pada sektor perikanan, karena memperkuat kekebalan ikan dari penyakit dan mempercepat pertumbuhan ikan. Penerapan Bios 44 oleh petani sangat memungkinkan karena Bios 44 ini mudah diproduksi masyarakat di mana bahan-bahan pembuatannya relatif mudah didapatkan dan cukup murah.



Melalui penerapan teknologi modern berupa Nusantara Foam 44 dan pupuk organik Bios 44, Kodim 1207/BS Pontianak diharapkan dapat dengan cepat melakukan penanganan bencana kebakaran hutan dan lahan serta mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan di wilayah Pontianak. Oleh karena itu, Kodim 1207/BS Pontianak terus melakukan pendekatan kepada masyarakat khususnya petani di lahan gambut, meminta masyarakat untuk tidak membuka lahan dengan cara pembakaran dan mengedukasi masyarakat untuk melakukan cara pembukaan lahan dengan modern melalui penggunaan Bios 44.

Bagi Dandim 1207/BS Pontianak upaya penanggulangan kebakaran lahan dan hutan dengan penerapan Nusantara Foam 44 dan Bios 44 ini tidak semata merupakan tugas dari pemerintah maupun pimpinan namun merupakan bentuk pengabdian kepada negara dan kecintaan terhadap lingkungan serta kepedulian terhadap kehidupan para petani di wilayah yang menjadi tanggung jawabnya.



PELIBATAN KODIM 0418/PALEMBANG KEPADA PEMERINTAH DAERAH DALAM RANGKA MENDUKUNG PEMBANGUNAN DAERAH

Oleh: Kolonel Inf Heny Setyono
(Dandim 0418/Palembang)



Tugas perbantuan kepada pemerintah daerah/otoritas sipil di wilayah merupakan salah satu tugas TNI yang termasuk ke dalam pola Operasi Militer Selain Perang (Pasal 7 ayat 2 poin b UU No. 34/2004). Dengan demikian, maka TNI AD yang merupakan bagian dari TNI memiliki tugas pokok dalam membantu tugas pemerintahan di daerah.

Dalam hal ini tugas dan peran TNI AD dapat dilakukan dengan melaksanakan Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagai bagian dari Pembinaan Teritorial yang merupakan fungsi utama TNI AD yang dapat dikatakan paling sesuai dalam membantu tugas pemerintah di daerah. Dalam kerangka Operasi Militer Selain Perang (OMSP) meningkatkan peran dan fungsi pemerintah di bidang pertahanan di daerah dilaksanakan oleh TNI AD dalam hal ini Satuan Komando Kewilayahan khususnya Kodim 0418/Palembang melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan yang diselenggarakan secara sistematis, berlanjut, dan terpadu melalui penguatan peran, tugas, dan fungsi perbantuan kepada pemerintahan di daerah. Hal ini diwujudkan melalui optimasi tugas dan peran Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan ke dalam penguatan kemitraan strategis pemerintah daerah, LSM, dan masyarakat guna mendukung pembangunan daerah terutama dalam hal mengatasi akibat bencana alam, rehabilitasi infrastruktur, mengatasi akibat kebakaran lahan dan hutan, konflik sosial, penanganan Covid-19 dan tugas bantuan lain sesuai dengan kebutuhan di daerah.

Di sisi lain dalam perspektif pemerintah daerah, seharusnya tugas perbantuan yang diberikan oleh Kodim 0418/Palembang melalui Pemberdayaan Wilayah Pertahanan sebagai bagian dari Pembinaan Teritorial diarahkan untuk menyiapkan potensi di daerah menjadi kekuatan pertahanan aspek darat. Namun, faktanya apabila dicermati tugas dan peran Kodim 0418/Palembang dalam memberikan bantuan kepada pemerintah di daerah saat ini masih terdapat kendala-kendala. Kendala tersebut apabila dihadapkan dengan perkembangan situasi di daerah di antaranya seperti perbedaan persepsi oleh Pemerintah Daerah mengenai pelibatan Kodim dalam kegiatan di daerah baik dalam penanggulangan bencana alam, Covid-19, konflik sosial hingga perbedaan mengenai peran dan fungsi Pemerintah Daerah di bidang pertahanan khususnya dalam menyiapkan potensi pertahanan di daerahnya.

Menyikapi latar belakang permasalahan di atas diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam tugas dan peran Kodim 0418/Palembang dalam membantu pemerintah di daerah. Untuk itu rumusan masalah yang ingin dijawab dalam esai ini adalah: *“Bagaimana pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam memberikan perbantuan kepada Pemda guna membantu lancar dan suksesnya pembangunan daerah di era adaptasi kenormalan baru dihadapkan pada kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki?”*



Metode yang digunakan untuk menjawab rumusan di atas adalah menggunakan metode deskriptif analisis dengan menggambarkan permasalahan terkait dengan pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada pemerintah daerah, sehingga dapat ditemukan solusi dari permasalahan tersebut. Mengingat Kodim sebagai satuan kewilayahan TNIAD memiliki peran dalam membantu pemerintah daerah di samping menyiapkan potensi di daerah menjadi kekuatan pertahanan aspek darat, juga sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas keamanan wilayah dan turut membantu mensukseskan program pembangunan di daerah.

Nilai guna dari penulisan esai ini adalah untuk memberikan gambaran mengenai pelibatan satuan kewilayahan TNI AD dalam tugas perbantuan kepada pemerintah daerah yang dibatasi pada Kodim 0418/Palembang dihadapkan pada kemampuan dan batas kemampuan yang selaras dengan tugas pokok TNI AD.

Maksud dari penulisan esai ini adalah agar dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi pimpinan dalam menentukan kebijakan lebih lanjut dalam meningkatkan pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki. Sedangkan **tujuan** dari penulisan esai ini adalah untuk mengetahui permasalahan terkait dengan pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam membantu Pemerintah

Daerah, sehingga mampu dirumuskan langkah kongkrit dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Pembahasan

Pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada Pemerintah Daerah tidak terlepas dari makna yang terkandung dalam pembukaan UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Melindungi dan mewujudkan kesejahteraan umum merupakan tugas dan kewajiban negara.

Dikarenakan besar dan luasnya lingkup tugas dan tanggung jawab negara, maka tugas tersebut didelegasikan menjadi tugas dan tanggung jawab alat dan aparat negara yang salah satunya diemban oleh TNI AD sebagai alat pertahanan negara matra darat dan pemerintah atau pemerintah daerah sebagai aparatur pemerintah yang mengelola dan menjalankan pemerintahan umum. Mengenai peran dan tugas TNI AD dalam membantu tugas pemerintahan di daerah disebutkan dalam UU RI Nomor 34/2004 tentang TNI sebagai bagian tugas pokok yang termasuk ke dalam pola OMSP.

Berdasarkan landasan pemikiran tersebut di atas, maka menjadi tugas Kodim 0418/Palembang untuk dapat terlibat serta aktif dalam membantu lancar dan suksesnya pembangunan daerah di era adaptasi kenormalan baru dihadapkan pada

kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki. Namun demikian pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada pemerintah daerah dalam hal ini Pemerintah Kota Palembang dalam pelaksanaannya saat ini masih terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. **Belum adanya ketentuan yang mengikat dan mengatur secara rinci tugas dan peran TNI AD, khususnya Satkowil, utamanya Kodim 0418/Palembang dalam membantu tugas pemerintah di daerah.** Saat ini diketahui bahwa tidak diuraikan jenis dan bentuk tugas perbantuan kepada pemerintah daerah secara rinci dan jelas. Hal ini telah menimbulkan tumpang tindih dan simpang siur mengenai bantuan yang dapat diberikan oleh Kodim 0418/Palembang sesuai tugas dan perannya dalam memberikan perbantuan kepada Pemerintah Daerah guna membantu lancar dan suksesnya pembangunan daerah di era adaptasi kenormalan baru yang secara umum belum diatur berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang mengikat dan mengatur pelibatan tersebut.
2. **Belum terwujudnya sinergitas menyangkut pelibatan Kodim 0418/ Palembang dalam membantu tugas Pemerintah di Daerah secara umum.** Belum terwujudnya sinergitas menyangkut tugas dan peran Kodim 0418/Palembang dalam membantu tugas Pemerintah di Daerah dapat dilihat dari: 1) Belum adanya sinkronisasi rencana pemberdayaan wilayah dengan rencana pembangunan daerah. Akibatnya meskipun pembangunan infrastruktur dapat dilaksanakan melalui program pembangunan, namun masyarakat kurang memiliki ketahanan dan sangat mudah terprovokasi untuk melakukan tindakan anarkhis yang pada akhirnya menimbulkan terjadinya konflik. Sebagai data dapat dilihat bahwa Kota Palembang dihadapkan pada tiga potensi konflik yaitu permasalahan lahan, tenaga kerja, dan kesenjangan sosial. 2) Belum adanya sinkronisasi antara program Pembinaan Teritorial Kodim 0418/Palembang dan program Pembangunan Daerah. Hal ini mengakibatkan pengelolaan potensi daerah untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam mewujudkan ketahanan wilayah menjadi tidak optimal.
3. **Belum adanya anggaran yang dialokasikan kepada satuan kewilayahan TNI AD khususnya Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada pemerintah di daerah.** Hingga saat ini berdasarkan tugas-

tugas perbantuan yang telah dilaksanakan, dukungan anggaran masih belum terdukung. Misalnya dalam penanganan konflik sosial yang terjadi di masyarakat di mana memerlukan anggaran baik pada saat sebelum terjadinya konflik sampai dengan selesainya konflik.

Dari kondisi di atas, diketahui bahwa pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam membantu lancar dan suksesnya tugas Pemerintah Daerah secara umum masih belum dapat dilaksanakan secara maksimal. Hal ini dikarenakan faktor-faktor yang mempengaruhinya di antaranya: a. **Kendala**, terdiri dari: 1) Kepala Daerah sebagai pemegang otoritas politik di daerah hingga saat ini kurang memanfaatkan keberadaan TNI yang memiliki tugas untuk membantu pemerintahan di daerah. 2) Masih menguatnya ego sektoral oleh aparatur Pemerintahan Daerah sehingga dalam tugas perbantuan yang dilaksanakan oleh Kodim 0418 seakan-akan bias karena kurangnya dukungan dari aparat Pemerintah Daerah yang pada akhirnya Pemerintah Daerah dalam menjalankan kewenangannya masih bersifat sektoral dan tidak dalam keterpaduan sistem untuk mengatasi permasalahan yang terjadi dan membutuhkan bantuan dari TNI AD. 3) Belum adanya konsep yang jelas mengenai keterlibatan dan implementasi tugas dan peran yang dilaksanakan oleh Kodim 0418/Palembang yang bersinergi dengan pemerintah di daerah terutama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi (bencana, Covid-19, konflik sosial dan sebagainya) maupun dalam mendukung program-program pembangunan melalui metode Pembinaan Teritorial yang dilaksanakan. b. **Kelemahan**, terdiri dari: 1) Terbatasnya piranti lunak berupa ketentuan perundang-undangan, ketentuan, dan peraturan lainnya hingga buku petunjuk yang dapat dijadikan oleh TNI AD khususnya Komando Kewilayahan dalam melaksanakan tugas perbantuan kepada pemerintah daerah. 2) Terbatasnya anggaran yang diberikan kepada TNI AD dalam hal ini Satuan Kewilayahan untuk membantu tugas pemerintahan daerah dihadapkan dengan kondisi yang dihadapi khususnya dalam mendukung program-program pembangunan di daerah.

Didasari permasalahan dan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pelibatan satuan kewilayahan TNI AD khususnya Kodim 0418/Palembang dalam membantu tugas Pemerintah Daerah di atas, diperlukan adanya suatu upaya untuk meningkatkan kembali pelibatan

Kodim 0418/Palembang dalam membantu tugas Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi dan sekaligus mendukung program-program pembangunan secara umum. Upaya yang dimaksud tersebut di antaranya: 1. **Membuat regulasi dan ketentuan lainnya yang mengikat dan mengatur secara rinci tugas dan peran Kodim 0418/Palembang dalam membantu tugas pemerintah di daerah.** Dalam pembuatan regulasi tersebut, diharapkan dapat dijelaskan secara rinci jenis dan bentuk tugas perbantuan serta yang dapat diberikan oleh Kodim 0418/Palembang kepada Pemda, disertai dengan mekanisme prosedur kerjasamanya. Sebagai contoh misalnya dalam penanggulangan bencana alam, Covid-19 hingga penanganan konflik sosial, yang diharapkan pelibatan Kodim dapat dimasukkan ke dalam peraturan daerah setempat yang mengatur secara jelas pelibatan satuan Kodim dan instansi terkait lain di wilayah dalam hal pengerahan personel dan materiil serta dukungan anggarannya. 2. **Mewujudkan sinergitas menyangkut tugas dan peran TNI AD dalam membantu tugas Pemerintah di Daerah.** Hal ini dapat dilakukan melalui sinkronisasi RTRW yang dimiliki oleh Kodim dengan rencana pembangunan daerah atau RTRW Pemerintah Daerah. Oleh karena pemerintah daerah dan Kodim harus sama-sama membangun inisiatif dan membangun kerja sama dalam mengatasi permasalahan yang terjadi di daerah khususnya yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Di sisi lain untuk penguatan fungsi dan peran antara Kodim dan Pemerintah Daerah perlu dibuat MOU kerjasama yang ditujukan pada langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan di daerah mulai dari penanganan bencana alam, penanganan Covid-19 dan pencegahan konflik sosial yang memerlukan penggunaan sarana dan alat perlengkapan TNI untuk mendukung program pembangunan dan penyelenggaraan Pembinaan Teritorial sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan. Dalam hal penguatan fungsi tersebut tidak hanya dibangun melalui kemitraan antara Pemerintah Daerah dan Kodim, namun juga dapat bersinergi dengan seluruh *stakeholders* di wilayah baik LSM, Lembaga Non Departemen dan masyarakat untuk mendukung tugas perbantuan yang dilaksanakan. 3. **Memberikan dukungan anggaran yang memadai kepada Satkowil TNI AD khususnya Kodim 0418/ Palembang sehingga tugas dan perannya dalam**

membantu tugas pemerintah di daerah dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat sasaran.

Hal yang dirasa tepat mengingat anggaran yang diberikan oleh Kementerian Pertahanan melalui APBN kepada TNI AD saat ini difokuskan dalam pemenuhan alutsista dan kekuatan menuju MEF. Maka sudah seyogyanya Pemerintah Kota Palembang dapat mendukung anggaran TNI AD dalam tugas perbantuan yang dianggarkan dalam APBD. Untuk itu Kodim 0418/Palembang dapat meminta kebutuhan anggaran tiap tahun sesuai dengan permasalahan utama yang sering terjadi di wilayah Palembang (bencana alam, konflik sosial dan baru-baru ini Covid-19) kepada SKPD di daerah yang selanjutnya dianggarkan oleh Pemerintah Kota Palembang untuk kemudian disetujui oleh DPRD sebagai anggaran tetap Kodim 0418/Palembang dalam pelibatannya untuk membantu tugas pemerintah di daerah.

Penutup

Dari uraian di atas dapat disimpulkan yaitu pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam memberikan perbantuan kepada Pemerintah Daerah guna membantu lancar dan suksesnya pembangunan daerah di era adaptasi kenormalan baru dihadapkan pada kemampuan dan batas kemampuan yang dimiliki belum terlaksana secara optimal. Kondisi ini disebabkan masih adanya permasalahan menyangkut pelibatan Kodim 0418/Palembang dalam tugas perbantuan kepada pemerintahan di daerah baik yang dapat dilihat dari regulasinya, pada pelaksanaan hingga kebutuhan anggaran yang diberikan.

Untuk itu perlu adanya upaya dalam meningkatkan kembali pelibatan Kodim 0418/Palembang guna membantu lancar dan suksesnya tugas pemerintah di daerah yang diarahkan untuk membantu pelaksanaan fungsi pemerintah dalam kondisi yang memerlukan sarana, alat, dan kemampuan TNI AD dalam rangka mengatasi situasi yang sedang dihadapi, penyiapan potensi di daerah menjadi kekuatan pertahanan aspek darat dan sekaligus membantu pemerintah daerah dalam mensukseskan program-program pembangunannya.

Sebagai akhir dari tulisan ini disarankan perlu segera dibuatnya regulasi dan ketentuan lainnya yang mengikat dan mengatur secara rinci pelibatan Kodim 0418/ Palembang dalam membantu tugas Pemerintah Kota Palembang yang dapat dijadikan payung hukum dan pedoman dalam menyelenggarakan kegiatan di daerah.

BABINSA *NEW NORMAL* TRANSFORMASI UPSUS TNI AD DALAM KETAHANAN PANGAN

Oleh : Letkol Inf Budi Rahman
(Dandim 1422/Maros)



Merebut lebih mudah daripada mempertahankan”. Sebuah ungkapan yang lazim kita dengar yang menggambarkan bahwa merebut suatu posisi atau pencapaian memang berat dan penuh perjuangan. Namun tidak lebih mudah juga, bahkan bisa jadi jauh lebih berat mempertahankannya. Dibutuhkan suatu konsistensi yang kuat dan kesabaran untuk menjalani suatu usaha serta upaya untuk menjaga agar bisa terus menyesuaikan berbagai dinamika variabel tantangan dan hambatan.

Begitu pula dalam berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara yang kita jalani. Banyak hal yang pernah diraih secara gemilang, tapi di kemudian hari sedikit demi sedikit menurun atau bahkan ditinggalkan.

Fenomena ini terindikasi dalam perjalanan panjang upaya mencukupi kebutuhan bahan pangan khususnya padi nasional. Pada Masa Orde Baru, bangsa Indonesia dikenal sebagai negara agraris dengan swasembada beras sebagai salah satu *feature* unggulannya. Sayangnya evolusi dan reformasi kehidupan bernegara satu sisi telah membawa kita ke kehidupan yang lebih baik dalam tata laksana pemerintahan dan berbagai kemudahan aspek kehidupan, namun di sisi lain data statistik menunjukkan kita pernah jatuh di lembah impor pasokan beras.

Tahun 2011 dan 2012 total impor beras Indonesia masing-masing mencapai 2,75 Juta Ton dan 1,81 Juta Ton dengan nilai USD 1,5 Milyar dan USD 945 Juta, terbesar sepanjang sejarah sepuluh tahun terakhir sejak tahun 2000. Serta merta seluruh komponen bangsa terhenyak kala itu, beberapa lapisan masyarakat secara berani bahkan menyampaikan kurangnya intervensi pemerintah, khususnya pemerintah daerah dalam sektor pertanian yang signifikan.

Terketuk oleh jeritan petani dan ibu pertiwi. TNI AD memandang ini sebagai tantangan sekaligus ancaman bagi kedaulatan pangan bangsa Indonesia yang tidak lain adalah bagian dari tugas pokoknya sebagai penegak kedaulatan bangsa. Undang – undang nomor 3 tahun 2002 telah memberi koridor aturan tentang pertahanan negara didalamnya termasuk pertahanan nir militer. Sementara pada Undang-undang RI nomor 34 tahun 2004 dengan tegas memberi ruang bagi TNI untuk membantu pemerintah daerah serta melaksanakan pemberdayaan wilayah pertahanan. Dari sini muncul keyakinan bahwa, bila ruang itu diartikan wilayah dengan segala isinya, maka Padi sebagai sumber pangan utama adalah kondisi yang menjadi bagian tak terpisahkan pertahanan negara yang perlu dikawal kedaulatannya.

Berangkat dari fenomena dan aturan yang memadai, disetujuiilah MoU antara TNI dan Kementerian pertanian dalam upaya khusus ketahanan pangan dengan target utama mencapai surplus pangan melalui peningkatan produksi beras.

Program kemudian dimulai sejak tahun 2012 melalui MoU No.03/MoU/310/M/4/2012 dan No.NK/9/IV/2012 tentang program kerjasama dalam mendukung peningkatan ketahanan pangan, merupakan nota kesepahaman pertama antara Kementan dan TNI AD. sementara dalam kelanjutannya diperbaharuinya MoU baru bernomor MoU No.41/RC.210/B1/01/2014 dan No.KERMA/5/2/1/2014 dan pada tanggal 8

januari 2015 dilakukan perpanjangan MoU kedua oleh kementan dan TNI tentang perluasan kegiatan cetak sawah. Kemudian, dilanjutkan perpanjangan MoU ketiga yakni dalam rangka upaya percepatan pelaksanaan kegiatan cetak sawah 2019 bersama TNI di Lorin Hotel Sentul, Bogor pada 29 Maret 2019. “Gebyah uyah” seketika itu juga TNI AD menyambutnya dengan penuh semangat. Berbagai formulasi dikeluarkan dalam kerangka judul yang terkenal dengan istilah serbuan teritorial ketahanan pangan.

Serbuan teritorial yang dicanangkan sejak tahun 2014 merupakan penajaman dari implementasi Binter dalam berbagai bidang. Dan benar saja. Mengacu pada data Produksi Padi Nasional BPS tahun 2014 s.d 2018. Terjadi lonjakan yang cukup signifikan. Bahkan kenaikan ini terus berlanjut hingga 4 tahun berikutnya. Tercatat produksi panen pada rentang 2014 ke 2018 mengalami kenaikan signifikan antara 1 hingga 3 juta ton per tahunnya. Suatu prestasi yang luar biasa.

Sayangnya, kebutuhan pangan bukanlah sesuatu prestasi yang cukup “pernah” dicapai sekali dua kali. Pemenuhan kebutuhan pangan khususnya bahan pangan utama, harus menjadi suatu komitmen tetap sebagai bagian tak terpisahkan dari kedaulatan negara.

Menghadapi modernisasi yang tak terbendung seyogyanya mendorong kesadaran kita bahwa kita bukan berpacu dengan orang lain, tapi berpacu dengan diri sendiri. Inilah hakekat perang terbesar yang sekarang kita hadapi.

Bagaimana tidak, pencetakan sawah baru berpacu dengan laju perubahan fungsi lahan pertanian. Pertambahan penduduk adalah rival utama perlombaan pemenuhan stok pangan. Polusi udara juga tak kalah menjadi musuh besar dalam penyediaan sumber daya pertanian berupa iklim/cuaca dan pengairan. Dan yang lebih berat lagi, digitalisasi kehidupan melalui hadirnya *gadget* sangat cepat menggerus semangat bertani generasi penerus bangsa. Maka sampailah kita pada pertanyaan, akankah masih ada pertanian sebagai kekuatan penyangga bangsa?

Bangunlah Jiwanya Bangunlah Badannya

Dipercaya atau tidak, Lagu kebangsaan Indonesia Raya mengandung filosofi mendalam bila kita tafsirkan maknanya dengan penuh penghayatan. Makna lirik “Bangunlah Jiwanya, Bangunlah Badannya” banyak menarik pandangan pemerhati filosofi, karena seolah telah sejak jauh masa memprediksi bahwa menempatkan pembangunan jiwa atau dapat diartikan SDM jauh



➤ Gambar 1 : pendampingan fisik Upsus Ketahanan Pangan dimulai sejak perencanaan dan penyiapan



► Gambar 2 : Perwujudan pendampingan secara fisik Upsus Ketahanan Pangan, Babinsa turun langsung pada fase tanam Padi

lebih penting daripada pembangunan badan atau boleh diartikan pembangunan fisik. Pada konteks yang lebih besar SDM sangat berhubungan dengan Budaya Masyarakat atau Aspek Sosial Budaya. Aspek sosial budaya ini sangat penting untuk disiapkan sebelum pembangunan fisik menyentuh aspek kehidupan. Aspek sosial budaya juga akan sangat menentukan kelanjutan proses dan kualitas pembangunan aspek-aspek lainnya. Begitupun pada skop ketahanan pangan. Pembangunan budaya agraris modern haruslah menjadi visi terbesar bangsa agraris supaya karakter manusianya terarah pada konsistensi pemenuhan kebutuhan pangan secara swasembada. Komoditi pangan adalah variabel tetap dalam kehidupan antar bangsa. Kehilangan ketercukupan pangan sama saja hilangnya kedaulatan negara tersebut. Lalu apa yang sudah dan harus dilakukan?

Tantangan Milenial dan Pengaruh Digitalisasi

Kembali ke hikmah pencapaian hasil Upsus Ketahanan Pangan. Melalui berbagai formula program di dalamnya, telah terbukti *by data* bahwa TNI AD mampu memberi sumbangsih besar dalam peningkatan signifikan luas panen dan produksi beras skala nasional. Selanjutnya mengambil prinsip yang sama, hal ini tentunya bisa ditarik pada skop kecil di daerah – daerah oleh komandan Satkowil. Namun demikian perlu disadari bahwa dinamika tantangan dan hambatan tentu saja akan selalu berkembang pula berpacu bersama langkah kita. Diluar perkembangan iklim global yang sudah barang tentu menjadi pertimbangan, kita juga harus berhadapan dengan tantangan yang tak kalah hebat yaitu milenial dan digitalisasi. Pendekatan serbuan teritorial yang selama ini dilaksanakan secara fisik akan mubazir manakala ini hanya

menjadi kepentingan sepihak TNI AD. Prakarsa masyarakat dan pemerintah serta komponen terkait haruslah menjadi visi ke depan. Eksistensi dan budaya milenial yang lekat dengan predikat praktis, minimalis, bahkan cenderung hedonis pastinya akan menurunkan semangat bertani generasi muda di negara-negara agraris. Mereka lebih memilih hidup yang penuh “keasyikan” dengan *gadget* dan komunitas virtualnya. Ini merupakan tantangan yang luar biasa, sebagaimana disinggung diatas bahwa **keberhasilan Upsus Ketahanan pangan pada beberapa tahun terakhir tidak boleh menjadi tujuan akhir, tapi justru menjadi standar baru bagi kinerja binter satuan TNI AD.** Selanjutnya untuk menghadapi hal ini dan untuk meng-*upgrade* standar kinerja ke level berikutnya, tentu harus ada upaya keras dan cerdas serta kreatif. Perlu adanya tambahan fokus program, tidak hanya sasaran fisik berupa perluasan lahan dan angka produksi tapi perlu adanya kesinambungan program berupa pembangunan semangat bertani dan inovasi pertanian cerdas. Pembangunan semangat dan daya kreasi inovasi dimaksud sangat membutuhkan figur komunikator yang cerdas berbasis penguasaan wawasan dan teknologi untuk mempengaruhi masyarakat. Apalagi dihadapkan dengan teknologi pendukung kehidupan saat ini yang membawa masyarakat “mencari mudahnya”.

Transformasi Upsus Ketahanan Pangan

Setelah mengupas satu persatu latar belakang, kondisi ideal dan tren tantangan yang terjadi, maka sampailah kita pada pertanyaan “terus gimana dong?” (red-Kemudian bagaimana menghadapinya?). Di sinilah Transformasi Upsus Ketahanan Pangan dibutuhkan. Selain prinsip Masif, Bermanfaat, Terpadu, Serentak, Prioritas dan Kesatuan Komando yang telah digariskan dalam serbuan teritorial yang telah terbukti keampuhannya mendobrak kelesuan produktifitas. Level selanjutnya diperlukan konsistensi program dan penanaman pengaruh. Hal ini diperlukan untuk mendorong agar Prajurit tetaplah menjadi Prajurit dan Petani berubah menjadi Petani Gaya Baru yang bersemangat, berwawasan modern, cerdas dan kreatif serta terkoneksi erat dengan komponen sistem ketahanan pangan lainnya. Maka dari itu dipandang perlu bila mulai saat ini memperhatikan beberapa tambahan prinsip yaitu : **A. Fokus pada Prakarsa Masyarakat**, hal ini bertujuan agar menjaga konsistensi semangat bertani dan menghadapi gerusan zaman yang kian membuat generasi muda meninggalkan pekerjaan sebagai

petani. Petani harus didorong agar memiliki pandangan dan semangat sebagai Pengusaha atau *entrepreneur* pertanian, bukan hanya sebagai penyedia komoditi atau bahkan buruh di rumah sendiri; **B. Berjangka Waktu**, penetapan jangka waktu diperlukan untuk memberi kerangka kerja yang tepat dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Dinamika pertanian tak ubahnya dengan sistem perdagangan, akan terus berubah dihadapkan dengan fluktuasi pasar komoditi. Maka jangka waktu perlu ditetapkan untuk menyeimbangkan upaya khusus yang dilaksanakan; **C. Reposisi Aparat Kewilayahan menjadi Harmonisator yang Handal**, ini diperlukan selain untuk menjaga agar domain bertani tidak beralih ke TNI AD guna menghindari stigma kembalinya penguasaan militer, atau militerisasi.

Dan pada saat bersamaan juga bertujuan untuk *upgrade* kredibilitas peran TNI AD, tidak menjadi buruh, *event organizer* atau *provider* jasa lebih dari itu harus bertransformasi menjadi harmonisator pertanian cerdas atau *Smart Farming Agent*. Pada posisi ini Prajurit harus bisa didudukkan sebagai harmonisator yang mutlak dibutuhkan fungsinya dalam sistem. **D. Kompetensi “Zaman Now”**, untuk bisa dipercaya sebagai harmonisator yang handal di era milenial ini sangat diperlukan peningkatan wawasan dan kemampuan berkomunikasi ala-ala jaman sekarang. Melihat bagaimana *Influencer* dan *Buzzer-buzzer* bekerja mempengaruhi terbentuknya suatu opini publik dengan hebatnya, maka

seperti itulah idealnya kader-kader aparat kewilayahan di garda depan. Eksistensi Apwil tidak cukup hanya di lapangan, mereka juga harus hadir dan mempengaruhi generasi “zaman *now*” melalui Medsos. Semangat, wawasan dan dorongan komunikasi kreatif harus terus menggelora di jiwa Aparat Kewilayahan. Menguasai mendalam bidang pertanian sudah tentu, tapi penguasaan media sosial dan aplikasi-aplikasi *performance booster* lainnya seperti youtube, *video editor*, *graphic editor*, dan semacamnya secara otomatis menjadi kebutuhan.

Kesimpulan

Sebagai akhir dari perbincangan ini, diperoleh suatu simpulan bahwa menghadapi dinamika perubahan zaman yang begitu cepat dikuasai teknologi, jangan lantas serta merta mendorong

TNI AD mengambil alih semua peran termasuk pertanian. Keberhasilan serbuan teritorial ketahanan pangan harus menjadi standar normal baru bagi peran TNI AD. Selanjutnya kita harus melompat ke level yang lebih tinggi, dalam kerangka Transformasi Upaya Khusus Ketahanan Pangan TNI AD seyogyanya yang ditonjolkan bukan lagi Prajurit berseragam yang bercocok tanam, tetapi bagaimana kinerja profesional TNI mempengaruhi dan memfasilitasi petani dengan cara-cara baru yang luar biasa. Sekali lagi, marwah Prajurit harus tetap dijaga layaknya figur yang gagah dan disegani, dan Petani-lah yang harus didorong memiliki semangat dan kebanggaan yang sama seperti Prajurit dalam berjuang dengan keras dan cerdas sebagai Penyangga Tatanan Negara Indonesia (Ir Soekarno, 1950).



➤ Gambar 3 : pendampingan fisik Babinsa TNI AD telah diakui mampu mendongkrak grafik produksi panen nasional

PERAN KODIM 1605/BELU DALAM MENJAGA KEUTUHAN DAN KEDAULATAN WILAYAH NKRI DI PERBATASAN RI-RDTL

Oleh: Letkol inf Wiji Untoro
(Dandim 1605/Belu)



Indonesia yang berada pada posisi silang antara dua benua (Asia dan Australia) dan dua samudera (Pasifik dan Hindia) yang berbatasan dengan 10 negara (India, Thailand, Malaysia, Singapura, Vietnam, Philipina, Palau, PNG, Australia, dan Timor Leste). Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbentuk kepulauan tersebut terdiri dari dimensi daratan, lautan, dan dirgantara serta merupakan negara kepulauan terbesar yang telah mendapat pengakuan dunia internasional terdiri dari pulau-pulau besar dan kecil sebanyak 17.504 dan didiami oleh penduduk yang berjumlah 220 juta.

Sesuai dengan UUD 1945 alinea keempat telah mengamanatkan bahwa Pemerintah Negara Indonesia “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa”. Oleh sebab itu, dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia khususnya di daerah perbatasan, maka dalam penyelenggaraan pengamanan, wilayah perbatasan harus senantiasa diselenggarakan secara terencana, terkoordinasi, dan terpadu dengan menggunakan pendekatan keamanan dan kesejahteraan secara seimbang.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 Pasal 7 (1) bahwa “Tugas pokok TNI adalah menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara”. Selanjutnya pada pasal (2) Tugas pokok yang dilakukan dengan Operasi militer selain perang pada poin (4) mempunyai tugas “mengamankan wilayah perbatasan”.

Kodim 1605/Belu memiliki wilayah yang berbatasan langsung dengan RDTL yang terbagi menjadi dua kabupaten yaitu Kabupaten Belu dan Kabupaten Malaka. Pada umumnya daerah perbatasan RI-RDTL belum mendapat perhatian secara maksimal dan proporsional. Kondisi ini terbukti dari kurangnya sarana prasarana pengamanan daerah perbatasan. Hal ini telah menyebabkan terjadinya berbagai permasalahan seperti pilar batas-batas wilayah banyak yang rusak dan bergeser karena faktor alam, penyelundupan barang dan jasa, penyelundupan narkoba serta kejahatan trans nasional (*transnational crimes*).

Kondisi umum daerah perbatasan dapat dilihat dari aspek: **a. Aspek Ideologi.** Kurangnya akses pemerintah, baik pusat maupun daerah, ke kawasan perbatasan dapat menyebabkan masuknya pemahaman ideologi lain seperti paham komunis dan liberal kapitalis, yang mengancam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari rakyat Indonesia. Pada saat ini penghayatan dan pengamalan Pancasila sebagai ideologi negara dan falsafah hidup bangsa tidak disosialisasikan dengan gencar seperti dulu lagi, karena tidak seiramanya antara kata dan perbuatan dari penyelenggara negara. Oleh karena itu, perlu adanya suatu metoda pembinaan ideologi Pancasila yang terus-menerus, tetapi tidak bersifat indoktrinasi dan yang paling penting adanya keteladanan dari para pemimpin bangsa. **b. Aspek Ekonomi.** Daerah perbatasan merupakan daerah tertinggal (terbelakang) disebabkan antara lain: 1) Lokasinya yang relatif terisolir (terpencil) dengan tingkat aksesibilitas yang rendah. 2) Rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan

masyarakat. 3) Rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal. 4) Langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan masyarakat di daerah perbatasan (*blank spot*).

Kesenjangan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan dengan masyarakat negara tetangga mempengaruhi watak dan pola hidup masyarakat setempat dan berdampak negatif bagi pengamanan daerah perbatasan dan rasa nasionalisme. Maka tidak jarang daerah perbatasan sebagai pintu masuk atau tempat transit pelaku kejahatan dan teroris.

c. Aspek Sosial Budaya. Akibat globalisasi dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu pesat, teknologi informasi dan komunikasi terutama internet, dapat mempercepat masuk dan berkembangnya budaya asing ke dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Pengaruh budaya asing tersebut banyak yang tidak sesuai dengan kebudayaan kita dan dapat merusak ketahanan nasional, karena mempercepat dekulturisasi yang bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Masyarakat daerah perbatasan cenderung lebih cepat terpengaruh oleh budaya asing, dikarenakan intensitas hubungan lebih besar dan kehidupan ekonominya sangat tergantung dengan negara tetangga. **d) Aspek Pertahanan dan Keamanan.** Daerah

perbatasan merupakan wilayah pembinaan yang luas dengan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintah, pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan efektif dan efisien. Seluruh bentuk kegiatan atau aktivitas yang ada di daerah perbatasan apabila tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak terhadap kondisi pertahanan dan keamanan. Daerah perbatasan rawan akan penyelundupan dan kriminal lainnya termasuk terorisme, sehingga perlu adanya kerjasama yang terpadu antara instansi terkait dalam penanganannya.

Kodim 1605/Belu, yang terdiri 9 (Sembilan) Koramil, 5 Koramil di antaranya berbatasan langsung dengan RDTL yaitu: Koramil 1605-02/Atapupu mempunyai satu pos, berkedudukan di Pos Kabuna; Koramil 1605-03/Weluli mempunyai dua pos, yaitu Pos Lakus dan Pos Makir; Koramil 1605-05/Kobalima dengan pos Satgaster di Motamasin; Koramil 1605-06/Halilulik mempunyai satu pos, berkedudukan di Pos Fatubesi Bawah; dan Koramil 1605-08/Haekesak mempunyai satu pos di Halibete. Masing-masing pos Satgaster diperkuat 3 orang.

Selain 3 orang tersebut, pos itu dibantu oleh para Babinsa. Tugas mereka sehari-hari antara lain: a) Melaksanakan binter di

wilayah mereka masing-masing. b) Melaksanakan sosialisasi batas wilayah. Masih ada wilayah yang belum memiliki patok batas negara karena reaksi masyarakat yang tidak menerima pemasangan patok tersebut. c) Memantau wilayah yang terkena bencana alam, memantau lintas batas RI-RDTL di pos Satgaster, faktor kemiskinan akibat keterisolasian kawasan menjadi pemicu tingginya keinginan masyarakat kedua negara menjadi pelintas batas berlatar belakang untuk keperluan hidup sehari-hari. Kesenjangan perbedaan kurs mata uang antara rupiah dan dolar menjadi pemicu orientasi perekonomian masyarakat Indonesia di sepanjang perbatasan dengan cara melakukan kegiatan ilegal. Masih terdapat jalur tikus yang digunakan pelintas batas secara ilegal yang memperbesar terjadinya kegiatan secara ilegal.

Dengan demikian dalam rangka menjaga Kedaulatan NKRI sesuai dengan tugas pokoknya maka dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:

1. Di Bidang Ideologi. Pada umumnya masyarakat perbatasan memiliki jiwa nasionalis dan cinta tanah air yang tinggi dan siap mempertahankan NKRI sampai titik darah penghabisan. Walaupun demikian tetap perlu dilaksanakan pembinaan dengan melaksanakan langkah-langkah sebagai berikut: a) Kegiatan penanaman Bela Negara dan cinta Tanah Air kepada masyarakat melalui komunikasi sosial kreatif. b) Menanamkan pendidikan Bela Negara dan Cinta Tanah Air kepada anak-anak sekolah sebagai generasi muda melalui kegiatan belajar mengajar, melatih upacara bendera, dan mensosialisasikan lagu-lagu wajib nasional. c) Mensosialisasikan wajib mengibarkan bendera merah putih di rumah-rumah saat ada peringatan hari-hari besar nasional. d) Mengadakan lomba menyanyikan lagu-lagu wajib nasional, lomba membaca UUD 1945 pada HUT RI.



2. Di Bidang Ekonomi. Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting dalam peningkatan ketahanan di daerah perbatasan. Kualitas sumber daya manusia ataupun tingkat kesejahteraan yang rendah akan mengakibatkan kerawanan terutama dalam hal yang menyangkut masalah sosial dan pada gilirannya dapat mengganggu stabilitas nasional secara keseluruhan.

Salah satunya yang dilakukan oleh Babinsa Koramil 1605-02/Ataupu Serka Duarte di desa Silawan dan Serka Januar di desa Atapupu, mereka memelopori usaha menanam anggur di halaman rumah, dan sekarang Serka Duarte sudah berhasil menanam anggur seluas 5.000 meter persegi, masyarakat sekitar sudah mulai menanam di halaman rumah maupun pekarangan masing-masing.

3. Di Bidang Sosial Budaya. Kesamaan kultur budaya antara masyarakat perbatasan RI–RDTL menyebabkan kehidupan sosial budayanya tidak ada perbedaan. Ikatan keluarga di daerah perbatasan sangat kental, tetapi karena keluarga besar terpisah oleh batas negara sehingga mereka terpisah demi keyakinan dan kecintaan kepada negara masing-masing. Dalam rangka menjaga, menumbuhkan, dan meningkatkan kecintaan budaya masyarakat perbatasan terhadap eksistensi bangsa, maka perlu dilakukan pembinaan budaya dengan cara tetap menumbuhkan rasa bangga dengan budaya Indonesia dan meyakinkan bahwa budaya yang ada adalah merupakan budaya milik bangsa Indonesia melalui pengawasan dan ikut secara aktif membina kelompok-kelompok budaya yang berada di daerah binaan.

4. Di Bidang Hankam. Melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya bekerja sama dengan Satgas Pamantas maupun instansi lainnya guna mendukung tugas pokok Kolakops Pamantas Darat RI–RDTL serta menjaga keutuhan wilayah darat NKRI. Diharapkan dengan melaksanakan pembinaan teritorial di wilayah tanggung jawabnya maka akan dapat menumbuhkan rasa cinta tanah air dan rasa memiliki daerah perbatasan di hati masyarakat untuk ikut bersama-sama dengan TNI menjaga perbatasan darat RI–RDTL.

Kemudian melaksanakan pembinaan teritorial dalam rangka memantapkan pola pertahanan negara sehingga dapat melaksanakan deteksi dini dan cegah dini di wilayah perbatasan dengan memberikan penyuluhan tentang pemahaman kesadaran bela negara dan rasa

cinta tanah air. Kegiatan dilaksanakan dengan cara sosialisasi pendidikan bela negara kepada seluruh komponen masyarakat sehingga dengan kesadaran sendiri masyarakat ikut terlibat secara langsung didalam menjaga perbatasan darat dengan secara aktif memberikan informasi apabila terjadi perkembangan di perbatasan untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini. Dengan melaksanakan pembinaan kepada masyarakat di sekitar perbatasan serta kegiatan patroli yang intensif serta menutup jalan-jalan pelolosan ilegal, maka akan dapat mengurangi kegiatan ilegal di perbatasan berupa penyelundupan barang, BBM dan kebutuhan pokok lainnya ke Timor Leste.

Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan Polres, Pemda dan Instansi terkait di wilayah dalam rangka mencegah tindakan illegal dan pelanggaran hukum. Dalam pelaksanaan tugas Pamantas tidak bisa berdiri sendiri dan harus selalu bekerja sama dan koordinasi dengan instansi terkait dalam mencegah dan menangani setiap kegiatan ilegal maupun yang berkenaan dengan pelanggaran hukum yang terjadi di perbatasan, sehingga setiap kejadian bisa diselesaikan secara baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.

Dalam tulisan tentang Optimalisasi Perlibatan Kodim 1605/Belu dalam mendukung tugas Pamantas RI–RDTL dalam rangka menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI di perbatasan, disampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut: 1) Dalam rangka menjaga pertahanan dan keamanan di wilayah perbatasan, tidak terlepas dari kerawanan alami yang mungkin terjadi di wilayah binaan, seperti masalah kesehatan, dan gesekan antara masyarakat pengunjung eks Tim-Tim dan masyarakat setempat karena kesenjangan ekonomi serta merasa diperlakukan tidak adil. 2) Daerah perbatasan merupakan kawasan khusus sehingga dalam penanganannya memerlukan pendekatan yang khusus pula. Penanganan yang mungkin dilakukan adalah secara adat, tetapi apabila sudah menyangkut stabilitas dan keamanan nasional maka hal tersebut akan menjadi urusan pemerintah. 3) Masih sering terjadi tindakan pidana yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia berupa penyelundupan barang dan BBM ke RDTL karena nilai jual di RDTL lebih mahal dibanding di Indonesia.

Demikian tulisan tentang Peran Kodim 1605/Belu dalam mendukung tugas Pamantas RI–RDTL dalam rangka menjaga Keutuhan dan Kedaulatan Wilayah NKRI di perbatasan. Semoga bermanfaat.

IMPLEMENTASI SINERGITAS TNI AD-POLRI DALAM MEWUJUDKAN STABILITAS DAN KONDUSIVITAS WILAYAH

Oleh: Mayor Inf Davit Sutrisno Sirait, S.E.,
(Danyonif 733/Raider)



Tujuan Negara Republik Indonesia yang tertuang secara jelas dalam pembukaan UUD 1945 pada alinea empat yaitu: “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Salah satu tujuan yang terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat tersebut yang berbunyi “Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia” merupakan tujuan dari hal-hal yang termasuk wajib untuk dilindungi adalah semua komponen yang membentuk bangsa Indonesia, mulai dari rakyat, kekayaan alam, serta nilai-nilai bangsa yang patut dipertahankan untuk menjaga stabilitas dan kedaulatan NKRI.

Dalam rangka mencapai tujuan Negara Indonesia yang tercantum dalam UUD 1945 tersebut, maka keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus tetap terjaga yaitu dengan memiliki pertahanan dan keamanan negara yang kuat. Adapun pihak yang memiliki peran dan fungsi pertahanan dan keamanan tersebut adalah TNI – POLRI. Pada masa sebelum reformasi, TNI – POLRI berada dalam satu kesatuan ABRI dan bertanggung jawab atas Pertahanan Keamanan Nasional (Hankamnas). Namun pada masa reformasi, kedua institusi ini dipisah dan menjadi lembaga yang otonom dan mandiri dengan peran dan fungsi yang berbeda, yaitu TNI sebagai alat pertahanan, dan POLRI sebagai alat keamanan. Ide dasar pemisahan kedua institusi itu tak lain supaya bisa meningkatkan profesionalitas fungsi dan organisasi TNI dan Polri. Selain itu, sumber daya manusia yang berada di TNI khususnya TNI-AD dan Polri dapat lebih berdayaguna dan berhasil dalam menjalankan tugas pokoknya masing-masing.

Seiring perjalanan waktu dalam pelaksanaan tugasnya di lapangan, terkadang muncul gesekan-gesekan maupun pertikaian antar-instansi khususnya TNI-AD maupun Polri, dikarenakan ego sektoral masing-masing instansi. Untuk itu diperlukan suatu konsep yang strategis dan komprehensif dengan mengesampingkan ego sektoral masing-masing institusi baik TNI-AD maupun Polri yang sama-sama bergerak di jalur pengamanan wilayah NKRI, penegakan hukum, disiplin, menjaga stabilitas dan kedaulatan negara yang dibagi dalam koridor yang berbeda sesuai dengan Tupoksi-nya masing-masing sehingga dapat mengatasi berbagai macam ancaman baik yang datang dari dalam negeri, maupun luar negeri secara selaras dan seimbang. Sehingga seluruh permasalahan negara dapat terselesaikan dengan baik serta berbagai elemen dan komponen masyarakat dapat merasa aman, nyaman, dan saling mendukung, bahkan roda pemerintahan dan perekonomian dapat terus bergerak menuju ke arah yang lebih baik.



Jika dilihat dari Tupoksi antara TNI maupun Polri terdapat perbedaan yang telah diatur dalam undang-undang. Namun jika tidak disinergikan tentunya akan ada tumpang tindih dari pelaksanaan tugas masing-masing instansi tersebut, bahkan memungkinkan untuk terjadinya gesekan. Untuk itu melalui sinergitas, kerja sama dari Paradigma (Pola Pikir) yang berbeda akan mewujudkan hasil lebih besar dan efektif sehubungan proses yang dijalani menunjukkan tujuan yang sama dan kesepakatan demi hasil positif. Ber-Sinergi berarti saling menghargai perbedaan ide, pendapat, dan bersedia saling berbagi. Ber-Sinergi tidak mementingkan diri sendiri, namun berpikir menang-menang dan tidak ada pihak yang dirugikan atau merasa dirugikan. Ber-Sinergi bertujuan memadukan bagian-bagian terpisah.

Menurut Covey dalam Wati (2013) mengartikan sinergi sebagai “kombinasi atau paduan unsur atau bagian yang dapat menghasilkan keluaran lebih baik atau lebih besar.” Indikator untuk menganalisis sinergitas menurut Doctoroff (1977: 76), yakni syarat utama bagi suatu sistem sinergi yang ideal adalah mencakup indikator komunikasi yang efektif, kerja sama, umpan balik yang cepat, kepercayaan, dan kreativitas. Kerjasama, dan komunikasi antar TNI - Polri yang dapat dilakukan adalah (1) Meningkatkan kembali pemahaman jiwa korsa dan pengaplikasiannya sehingga solidaritas fanatisme

yang salah dapat ditinggalkan; (2) Meningkatkan dan memperbaiki koordinasi inter dan antar institusi; (3) Meningkatkan intensitas latihan bersama dalam menghadapi operasi gabungan untuk mengatasi berbagai ancaman dan gangguan; (4) Memperjelas dan mempertegas undang-undang dan SOP pelibatan serta perbantuan pelaksanaan tugas bersama yang mengatur mekanisme dan teknis di lapangan; (5) Membentuk media sosial/jurnalistik yang terintegrasi antara TNI-AD dan Polri untuk mempublikasikan keberhasilan tugas di lapangan serta dapat mengantisipasi *hoax* di masyarakat.

Tupoksi masing-masing instansi sudah jelas tertuang dalam Undang-Undang yang mengatur tentang TNI dan Polri. Kemudian kita lihat apa saja yang menjadi ancaman dan tantangan dalam implementasi pelaksanaan Tupoksi tersebut. **Adapun bentuk ancaman yang mengganggu stabilitas dan keamanan wilayah:**

1. **Ancaman Militer.** Ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata terorganisir yang dapat membahayakan kedaulatan, keutuhan serta keselamatan bangsa dan negara, biasanya berasal dari negara luar. Ancaman ini dapat berupa agresi, invasi, bombardemen, blokade, spionase, sabotase, aksi teror dan pemberontakan bersenjata dan perang saudara.

2. **Ancaman Non/Nir Militer.** Ancaman yang tidak menggunakan kekuatan bersenjata yang mengancam terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta mengancam keamanan dan stabilitas bangsa. Adapun bentuk ancaman ini berupa perdagangan dan penyalahgunaan narkoba, kejahatan lintas negara (penyelundupan manusia, barang ilegal, dan narkoba), konflik horizontal antar suku ras dan agama, tindakan pengrusakan lingkungan serta *illegal fishing* dan *illegal mining*, aksi unjuk rasa yang anarkis, wabah penyakit menular, terorisme dalam negeri, kemiskinan dan kebodohan.

Berdasarkan ancaman yang timbul di wilayah NKRI tersebut, maka dibentuklah satuan-satuan tugas gabungan antara TNI-AD dan Polri secara bersinergi sehingga dapat mengatasi berbagai ancaman dan permasalahan yang terjadi. **Adapun bentuk kegiatan Pengamanan Wilayah dalam rangka mengatasi ancaman dan gangguan keamanan yang dilaksanakan secara terintegrasi antara TNI-AD dan Polri dalam rangka mewujudkan stabilitas dan kondusivitas.**

1. **Penanganan permasalahan perbatasan NKRI.** Permasalahan yang ada tersebut bersifat kompleks, bukan hanya mengenai teknis penentuan tapal batas (Delimitasi), tetapi juga pelanggaran pelintas batas, *illegal trading* dan *illegal fishing*. Dalam pengamanan wilayah perbatasan TNI-AD menyiapkan Satuan Tugas Pengamanan Perbatasan yang biasa disebut Satgas Pamtas untuk mencegah permasalahan tapal batas maupun pelanggaran ilegal yang kerap kali terjadi. Amannya perbatasan juga tidak dapat menjadi satu-satunya indikator dari keberhasilan tugas TNI, karena penilaian aman timbul sebagai hasil penilaian terhadap ancaman secara subjektif. Konsep kapabilitas dapat menjadi alternatif indikator keberhasilan tugas TNI yang lebih objektif, karena konsep tersebut mempertimbangkan interaksi antara kemampuan yang terkandung dalam postur dengan faktor-faktor yang berpengaruh dalam operasi yaitu ancaman, lingkungan, dan kontribusi partner di wilayah tugas. Untuk itu TNI-AD tidak dapat bekerja sendiri, dibutuhkan sinergitas dari instansi lainnya khususnya Polri yang bertugas dalam penegakan hukum terhadap pelanggar ataupun kegiatan kriminal

yang terjadi di wilayah perbatasan sesuai dengan Tupoksi-nya. Hal ini sudah dibuktikan dengan dilaksanakannya kegiatan pengamanan wilayah perbatasan secara terintegrasi antara TNI-AD dan Polri dengan melaksanakan patroli gabungan ataupun *sweeping* di beberapa titik rawan perbatasan untuk mencegah terjadinya pelanggaran ataupun kegiatan ilegal yang dapat merugikan negara.

2. **Penanganan separatistis ataupun Kelompok Kriminal Bersenjata.** Dalam penanganan masalah separatistis bersenjata ataupun sebutannya KKB (Kelompok Kriminal Bersenjata), TNI-AD menerjunkan satuan tugas pengamanan daerah rawan yang disingkat Satgas Pamrahwan yang bertugas untuk menetralsir berbagai ancaman keamanan dari kelompok separatistis bersenjata yang telah menunjukkan niatnya memisahkan diri dari bingkai NKRI melalui berbagai aksi separatistis, terorisme, dan kejahatan terkoordinasi. Sedangkan Kepolisian menyiapkan satuan tugas Brimob gabungan yang diberikan





kewenangan atau diskresi oleh hukum pidana kita untuk melakukan seluruh rangkaian proses penindakan terhadap siapa saja yang terlibat dalam kejahatan. Wewenang kepolisian bukanlah untuk memengaruhi jalannya proses pemidanaan, namun untuk memperkuat proses penegakan hukum terhadap KKB yang melakukan tindakan kriminal.

Sinergitas pun sudah terwujud dan dapat terlihat di lapangan antara TNI-AD dan Polri saat penanganan kasus KKB di wilayah Papua, di mana sampai saat ini masih diterjunkan Tim ataupun Satgas gabungan TNI-AD dan Polri dalam menumpas KKB yang mengganggu stabilitas wilayah di Papua.

3. **Penanganan terorisme.** Permasalahan terorisme masih menjadi ancaman yang berpotensi mengganggu stabilitas keamanan nasional di beberapa wilayah. Salah satu implementasi penanggulangan terorisme secara bersinergi sudah terwujud melalui dibentuknya satuan tugas Tinombala, di mana satgas ini terdiri dari unsur gabungan antara TNI-AD dan Kepolisian. Satgas Operasi Tinombala berhasil untuk menangkap kelompok teroris Santoso di daerah Poso.

Penanganan konflik sosial. Suksesnya penanganan konflik sosial di berbagai daerah dikarenakan tersinerginya berbagai institusi terutama TNI-AD dan Polri. Beberapa konflik sosial yang sukses berhasil ditangani berkat sinergitas TNI-AD dan Polri yaitu penanganan aksi kerusuhan ataupun unjuk rasa yang berujung anarkis yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia. Beberapa konflik sosial yang berhasil ditangani secara terintegrasi yaitu kerusuhan yang terjadi di Maluku (1999), kerusuhan ataupun unjuk rasa di Jakarta hingga

saat ini. Namun semua berhasil ditangani sehingga membuat masyarakat di berbagai wilayah dapat hidup dengan tenang dan damai.

4. **Pengamanan kegiatan pemerintah di masa damai.** Beberapa event kegiatan yang berhasil dikawal pelaksanaannya hingga tuntas di antaranya kegiatan pengamanan Pemilu baik Pilpres, Pilkada maupun Pemilu Legislatif yang terkadang menimbulkan gejolak di berbagai daerah. Selain itu, TNI-AD dan Polri juga bersinergi dalam kegiatan pengamanan VVIP ataupun kunjungan tamu kenegaraan.

Selain tugas-tugas di atas masih banyak kegiatan pengamanan yang terintegrasi antara TNI-AD dan Polri di mana salah satunya diwujudkan melalui kebersamaan tugas Babinsa dan Bhabinkamtibmas yang selalu bersinergi dalam berbagai tugas di wilayah. Yang terpenting adalah adanya kesamaan visi, misi, dan tujuan yang sama baik dari unsur pimpinan hingga ke unsur bawahan dalam instansi TNI-AD dan Polri serta selalu komunikatif dan saling menghargai sebagai kunci keberhasilan pelaksanaan tugas. Keberhasilan pelaksanaan tugas pengamanan di daerah tidak dilakukan sendiri oleh pemerintah daerah, TNI ataupun Polri, namun membutuhkan koordinasi dengan *stakeholders* lainnya. Artinya perlu ada sinergi antara pemerintah, TNI, Polri dan serta komponen masyarakat lainnya. Sehingga NKRI dapat diakui sebagai negara yang kuat berdaulat penuh secara *De Facto* dan *De Jure*. Hal ini sejalan dengan paradigma *Good Governance* yang mengedepankan keterpaduan antara pemerintah (*state*) yang di dalamnya terdapat unsur TNI - Polri dan masyarakat (*society*).



PENGEMBANGAN KEKUATAN ARHANUD KOSTRAD DALAM MENGHADAPI PERANG MODERN

Oleh: Mayor Arh Helmy Ariansyah
(Danyonarhanud 1/PBC Divif 1/Kostrad)



Siapa bilang perang bukan lagi opsi yang populer dekade ini? Di tahun 2020 yang diwarnai dengan wabah virus corona ini dunia dihentakkan dengan perang yang meletus antara dua negara yang bertetangga di Laut Hitam, Armenia dan Azerbaijan. Gambaran perang modern yang identik dengan perang teknologi senjata nyata terjadi antara dua negara yang ‘tidak terlalu kaya’ tersebut. Pertempuran antara tank kelas berat, artileri kaliber besar dan roket-roket jarak jauh, serta teknologi *combat drone* atau UAV (*Unmanned Aerial Vehicle*) bersenjata antara pihak-pihak yang berseteru dapat kita temukan rekaman/*footage*-nya di televisi dan internet. Para pengamat pertahanan dan tentunya angkatan bersenjata dari banyak negara turut serta menurunkan tim *observer*-nya untuk mempelajari taktik dan teknik bertempur yang dipraktikkan kedua angkatan bersenjata yang bertikai. Tidak ketinggalan para kontraktor industri pertahanan yang juga mencari celah untuk mempromosikan produk-produk terbarunya. Semuanya demi mengejar tuntutan kemajuan teknologi dan kecanggihan strategi serta taktik militer yang efektif di era teknologi informasi. Ya,... semuanya. Tidak terkecuali TNI AD.

Bagi TNI AD, pelajaran tentang perang aktual tersebut kini menjadi objek pembahasan wajib di berbagai lembaga pendidikan dan bahan diskusi yang cukup populer di kalangan perwira. Salah satunya tentang bagaimana kedua negara yang berperang tersebut menggunakan UAV dan Alutsista canggih guna menghancurkan kekuatan tempur dan fasilitas militer lawannya. Lalu, bagaimana dominasi kekuatan udara yang menjadi salah satu tolok ukur keunggulan dalam perang modern diperebutkan oleh kedua pihak. Yang juga sama pentingnya adalah bagaimana kekuatan militer masing-masing negara digelar untuk menghadapi ancaman udara lawan yang dapat menyerang kekuatan darat secara efektif? Apakah kedua pihak menerapkan taktik pertahanan udara yang berbeda, bagaimana perbandingan kekuatan Alutsista masing-masing, serta faktor apa yang menjadi penentu keunggulan kedua seteru dalam perang terbuka yang *head-to-head* ini? Itu semua pertanyaan yang sedang mengemuka di kalangan pakar militer dunia saat ini. Pertanyaan-pertanyaan itu pula yang menjadi bahan renungan para pemangku kepentingan dalam penentuan kebijakan pembangunan kekuatan militer TNI AD di era modern seperti saat ini.

Secara umum, strategi pembangunan kekuatan TNI AD disusun sejalan dengan strategi penggunaan kekuatan TNI AD, yaitu dengan kekuatan tersebar yang diwadahi dalam Kodam-Kodam dan kekuatan terpusat dengan Kostrad dan Kopassus sebagai tulang punggungnya. Kodam berperan strategis dalam pembangunan kekuatan kewilayahan yang disesuaikan dengan karakteristik Sumber Daya Alam, SDM, dan infrastruktur yang ada di daerah. Sedangkan Kostrad dan Kopassus adalah kekuatan pemukul yang sifatnya *mobile* serta mempunyai daya tempur optimal yang siap diterjunkan di seluruh wilayah tanah air, serta mampu menghadapi semua spektrum ancaman militer. Karena itulah, kajian tentang perkembangan lingkungan strategis yang aktual menjadi sangat vital bagi TNI AD, terutama bagi Kostrad sebagai kekuatan pemukul strategis TNI AD dalam hampir semua operasi militer.

Salah satu kekuatan Kostrad dalam operasi militer adalah kemampuan pertahanan udaranya. Setiap Divisi Infanteri Kostrad diperkuat 1 Batalyon Arhanud yang dipersenjatai Alutsista Arhanud terbaik yang dimiliki TNI AD. *Operational requirement* bagi Alutsista Arhanud di jajaran Kostrad diprioritaskan pada jenis rudal dan meriam dengan daya tembak dan daya hancur yang tinggi, serta memiliki mobilitas di segala medan, baik menggunakan *platform* kendaraan roda ban maupun roda rantai. Tentunya semua persyaratan tersebut dipenuhi dengan memperhatikan jenis ancaman udara yang dihadapi, taktik yang digunakan, serta kebutuhan serta kemampuan organisasi, baik dari segi personel, anggaran, maupun dukungan logistik dan pemeliharaan.

Saat ini satuan-satuan Arhanud Kostrad telah diperkuat Alutsista rudal Mistral buatan Perancis dan rudal Starstreak tipe terbaru buatan Inggris. Kedua jenis rudal tersebut termasuk dalam rudal Hanud jarak pendek terbaik di dunia dan telah *combat proven* di berbagai medan konflik. Starstreak menggunakan jenis rudal HVM (*High velocity missile*) berkecepatan 3,5 mach yang dipandu laser sehingga sulit dikecoh oleh sistem *countermeasure* dari pesawat tempur manapun. Rudal ini diklaim mampu menghancurkan sasaran hingga jarak 8 km pada ketinggian 3.000 m. Sementara itu, rudal Mistral merupakan jenis rudal berpenuntun inframerah dengan sistem kendali *fire and forget* teknologi terbaru yang telah disempurnakan sehingga tingkat akurasi sangat tinggi. Kedua jenis rudal ini didukung dengan radar penangkap sasaran udara dengan kemampuan deteksi 3D dan cakupan yang



luas. MCP (*Mistral Coordination Post*) adalah kombinasi antara Radar 3D dan sistem kendali operasi bagi satuan-satuan tembak rudal Mistral yang ampuh mendeteksi 20 sasaran sekaligus mengendalikan hingga 12 Satbak rudal secara simultan. Sementara itu, Radar Shikra atau dikenal juga dengan nama Control Master 200 (CM200) yang dimiliki oleh setiap baterai Rudal Starstreak selain mampu menyuplai data sasaran udara bagi 20 Satuan rudal juga mampu difungsikan sebagai *Air Space Control* (Pengendali ruang udara) dengan kemampuannya mengawasi 200 penerbangan dalam radius hingga 250 km. Kedua jenis radar ini juga dilengkapi dengan sistem komunikasi yang tangguh yang diklaim tahan terhadap *jamming* berkekuatan sedang dan tinggi, setara dengan kemampuan radar-radar milik negara anggota NATO.

Meski di atas kertas Alutsista Arhanud Kostrad tersebut cukup memberi efek gentar yang besar, masih banyak 'PR' yang harus dibenahi guna mewujudkan kemampuan Hanud Kostrad yang benar-benar handal. Diantaranya adalah tentang modernisasi Alutsista satuan Arhanud Kostrad yang angkanya baru mencapai 60% dan rencana pembentukan satuan-satuan Arhanud baru yang sejalan dengan pengembangan kekuatan dan tuntutan tugas Kostrad yang semakin luas.

Guna menjawab tantangan tersebut TNI AD telah menyusun kebijakan pengembangan kekuatan Arhanud TNI AD yang mencakup pemenuhan Alutsista dan validasi serta pembentukan satuan-satuan Arhanud, baik di jajaran Kostrad maupun di Kodam-Kodam yang memiliki wilayah-wilayah strategis atau objek vital nasional. Bagi Kostrad, dalam 5 s.d 10 tahun ke depan satuan-satuan Arhanudnya akan diperkuat rudal-rudal jarak sedang dan jarak jauh yang mampu menghadang berbagai jenis pesawat udara modern, rudal jelajah (*cruise missile*), dan rudal balistik jarak jauh (*ballistic missile*), bahkan UAV/*drone*. Tidak hanya itu, guna menjamin perlindungan udara bagi unsur manuver di darat, Alutsista berkemampuan C-RAM (*Counter Rocket, Artillery, and Mortar*) juga dipastikan akan diprioritaskan untuk melengkapi satuan-satuan Arhanud Kostrad. Jenis Alutsista terakhir ini adalah hasil kajian tentang ancaman udara terkini yang sering dihadapi pasukan darat di berbagai medan konflik aktual di seluruh dunia. Dengan proyeksi pembangunan Alutsista tersebut diharapkan satuan-satuan Arhanud Kostrad nantinya akan mampu memberikan perlindungan udara bagi satuan-satuan manuver, seperti satuan artileri, kavaleri, pusat konsentrasi pasukan, jalur logistik utama, dan pos komando, serta objek-objek vital bernilai taktis dan strategis

lainnya di medan operasi dari semua spektrum ancaman udara, mulai dari pesawat udara, UAV, rudal jelajah, rudal balistik, roket artileri, hingga tembakan mortir, artileri, atau bom yang dijatuhkan dari udara sekalipun.

Namun tidak hanya itu. 'Pekerjaan rumah' dalam membangun kekuatan Arhanud Kostrad tidak hanya soal senjata atau '*gun*'. Yang sama pentingnya adalah *man behind the gun* atau siapa yang menggunakan senjata itu, dan lebih penting lagi yaitu *how we man the gun* atau bagaimana kita menggunakan/memperlakukan senjata itu sendiri. Di sini yang menjadi perhatian utama adalah bagaimana menyusun doktrin taktik bertempur Arhanud yang efektif lalu bagaimana melatihkannya ke satuan-satuan, dan bagaimana menjamin jalur logistik serta pemeliharaan Alutsista tersebut agar selalu siap operasional.

Perkara pengembangan doktrin bukanlah urusan 'sekali jadi'. Bukan pula dengan hanya menyadur dari buku-buku referensi atau *field manual* yang diberikan oleh pabrikan atau operator Alutsista di negara pembuatnya. Doktrin harus selalu di-*update* sesuai perkembangan zaman dan melalui proses uji teori dan uji praktik, baik di forum akademis, di medan latihan maupun di medan operasi. Senjata boleh sejenis, kemampuan Alutsista boleh dibanding-bandingkan, namun dalam urusan taktik dan teknik bertempur satuan-satuan Kostrad memiliki kekhasan yang menjadikannya andalan di medan tugas. Hal ini dikarenakan doktrin yang digunakan terus-menerus diperbarui guna meng-*counter* ancaman yang terus berkembang dan mewadahi tuntutan tugas yang berbeda-beda. Hal ini juga berlaku bagi satuan-satuan Arhanud Kostrad. Latihan-latihan yang mencakup pengerahan satuan Arhanud Kostrad menjadi ajang pengujian dan implementasi doktrin taktik dan teknik yang disusun oleh Pussenarhanud (Pusat Kesenjataan Arhanud) sebagai pembina teknis kecabangan. Latihan-latihan tempur juga terbuka bagi eksperimen taktik-taktik baru yang tengah digodok TNI AD. Evaluasi pelaksanaan latihan tersebut serta hasil kajian pertempuran yang aktual dijadikan sebagai bahan baku dalam merumuskan doktrin yang valid. Jadi, jangan heran bila dalam berbagai kesempatan latihan, Alutsista Arhanud Kostrad diuji hingga batas kemampuan optimalnya, dan digunakan dalam medan-medan serta skenario yang mungkin tidak terbayangkan oleh perancang Alutsista itu sendiri. Penerapan taktik *shoot and scoot* atau *hit and run* contohnya, yang lazim digunakan dalam patroli satuan infanteri atau gerilya sudah beberapa kali diterapkan dalam latihan satuan Arhanud Kostrad. Teknik menembak rudal secara *cross fire* atau menembak sasaran

udara dari arah bersilangan juga ditemukan dalam latihan Arhanud Kostrad. Teknik ini terbukti sangat ampuh melumat habis pesawat musuh yang terbang rendah. Saat ini satuan-satuan Arhanud di luar Kostrad turut mengadopsi teknik menembak rudal yang mampu mendongkrak kemampuan teknis Alutsista ini sampai batas maksimal.

Bila doktrin telah dirumuskan, maka organisasi satuan dan karakteristik Alutsista akan disesuaikan guna mewadahi taktik dan teknik bertempur yang telah dianggap valid tersebut. Selanjutnya, organisasi yang telah divalidasi dan kemampuan Alutsista akan kembali diuji dalam berbagai tugas dan latihan. Disinilah siklus pengembangan kekuatan Arhanud Kostrad akan berulang. Proses ini juga diterapkan dalam menyusun kebijakan strategis pengembangan kekuatan TNI AD pada umumnya.

Terakhir, yang juga menjadi bagian dari pengembangan kekuatan Arhanud Kostrad adalah kemitraan dengan industri pertahanan. Sejalan dengan itu, satuan-satuan Arhanud Kostrad kini menjadi *partner* penting mitra pabrikan Alutsista. Pabrikan asing melalui mitra dalam negeri, seperti PT Pindad dan PT LEN menjalin kerjasama pemeliharaan dan asistensi dalam penggunaan Alutsista di satuan-satuan Arhanud. Kegiatan pemeliharaan berkala juga diwadahi dalam program kerja dan anggaran di level Mabesad. Memang, disadari bahwa sistem pemeliharaan materiil Alutsista di lingkungan TNI AD masih jauh dari sempurna. Maka dari itu, berbagai upaya terus dikerahkan, anggaran yang ada juga dioptimalkan. Salah satunya dengan penguatan fungsi pemeliharaan Alutsista Arhanud oleh Dohar (Depo Pemeliharaan) Sista Arhanud yang langsung dikoordinir oleh Pussenarhanud. Sedikit demi sedikit sistem pemeliharaan ini diperbaiki dan dijadikan *role model* pemeliharaan Alutsista bagi satuan-satuan pengguna Alutsista modern lainnya di TNI AD. Dengan sistem pemeliharaan dan suplai logistik materiil yang terpusat maka Alutsista yang ada di satuan-satuan Arhanud akan selalu mendapat servis terbaik dan selalu siap operasional.

Mungkin inilah yang bisa dikatakan sebagai penjabaran dari adagium kuno "*Si vis pacem para bellum*" yang sudah dikenal di mana-mana itu. Kekuatan militer TNI AD dan TNI pada umumnya, dibangun dengan susah payah dan dengan biaya yang tidak murah bukan semata-mata untuk memantik konflik dengan siapa pun. Tapi, inilah bentuk investasi negara demi melindungi kehormatan dan kepentingan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sama-sama kita cintai ini.



***Taruna Akademi Militer
Generasi Penerus TNI AD
yang disiplin dan profesional***

**LATIHAN MENEMBAK
DENGAN MERLAM
CAESAR
155 MM**

